

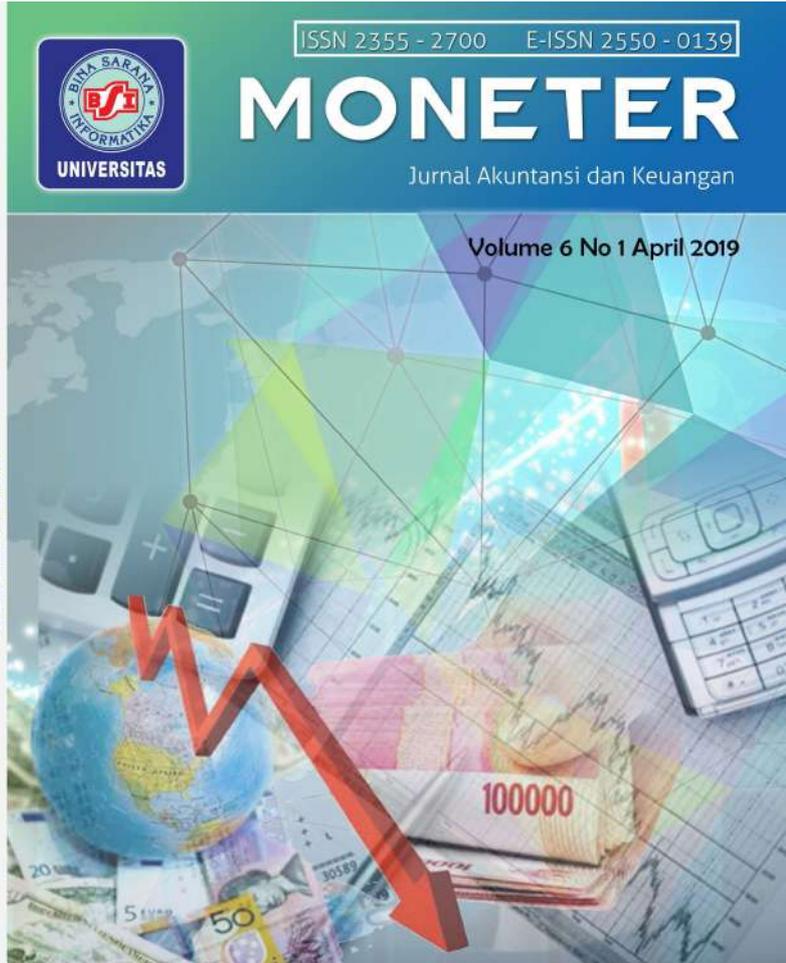


UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.289, Cawang - Jakarta Timur
Telepon : 021 736515 / Fax. 021 7365704
URL : <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>



9 772550 013007



ISSN 2355 - 2700 E-ISSN 2550 - 0139

MONETER

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Volume 6 No 1 April 2019

MONETER



Diterbitkan Oleh :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



**Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Untuk Mengurangi NPL
(Studi Kasus BTN Cabang Bogor)**

Vina Islami

Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur

Dede Suleman

**Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK
Konvergensi IFRS**

Sarlina Sari

**Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(Studi Kasus PT PCT Tangerang)**

Badar Murifal

**Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Pada PT. Citarum Borneo Quantum**

Dian Indah Sari¹, Rizky Ulya²

**Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit**

Dedi Suharyadi

**Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan
Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama –
Palembang)**

Andreas Rudiwantoro

**Penerapan Teknologi Gasifikasi Dalam Mencapai Efisiensi Biaya Overhead
Bahan Bakar Produksi Serta Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Harga Jual**

Syafuddin

**Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan**

Dinar Riftiasari

**Analisis Pengaruh Perubahan dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Net Profit
Margin (NPM) pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.**

Popon Rabia Adawia¹, Ayu Azizah² Abdul Rokhim³

**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earnings Ratio (PER)
Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia**

Sonny Fransisco Siboro

**Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Pada
Perusahaan Pertambangan**

Seno Hadi Saputro

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Untuk Mengurangi NPL (Studi Kasus BTN Cabang Bogor) Vina Islami	1-6
Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur Dede Suleman	7-12
Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS Sarlina Sari	13-22
Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang) Badar Murifal	23-28
Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT. Citarum Borneo Quantum Dian Indah Sari ¹ , Rizky Ulya ²	29-38
Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Dedi Suharyadi	39-44
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang) Andreas Rudiwantoro	45-52
Penerapan Teknologi Gasifikasi Dalam Mencapai Efisiensi Biaya Overhead Bahan Bakar Produksi Serta Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Harga Jual Syafuddin	53-62
Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan Dinar Riftiasari	63-68
Analisis Pengaruh Perubahan dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Popon Rabia Adawia ¹ , Ayu Azizah ² Abdul Rokhim ³	69-80
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earnings Ratio (PER) Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Sonny Fransisco Siboro	81-90
Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Seno Hadi Saputro	91-96

MONETER

Editorial Team

Chief Editor

Eka Dyah Setyaningsih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI

Editor

Agus Junaidi, Sistem Informasi Akuntansi Universitas BSI
Kartika Yuliantari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI

Reviewers

Susan Rachmawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI
Amin Setio L, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI
Dwiyatmoko P, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI

Advisory Boards

Ida Zuniarti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI

Administrative Staff

Maya Sopa, LPPM Universitas BSI

Published by

LPPM Universitas BSI
Jl. Dewi Sartika No. 289, Cawang,
Jakarta Timur
Telp : 021-8010836



<http://www.bsi.ac.id>

e-mail: jurnal.moneter@bsi.ac.id

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>

p-ISSN: 2355-2700 | e-ISSN: 2550-0139

Indexed by



PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrohmanirrohim

Redaksi mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Jurnal Moneter Edisi Volume VI No. 1 bulan April 2019 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Jurnal Moneter yang telah terindex oleh Google Scholar, dalam edisi ini menerbitkan 12 artikel naskah yang berasal dari dosen atau peneliti. Artikel telah melalui proses review oleh reviewer yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing.

Redaksi menerima naskah berupa artikel, hasil penelitian atau karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya pada media-media lainnya melalui laman <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>

Akhirnya, Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan peneliti yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Jurnal Moneter edisi ini. Semoga Jurnal Moneter kali ini dapat memenuhi khasanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI serta masyarakat pada umumnya.

Wassalam,

Redaksi

Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Untuk Mengurangi NPL (Studi Kasus BTN Cabang Bogor)

Vina Islami

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika
Email : vina.vii@bsi.ac.id

Vina Islami. (2019). Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Untuk Mengurangi NPL (Studi Kasus BTN Cabang Bogor). *Moneter*, 6(1 April 2019), 1–6.

Abstract - *The purpose of this study to determine: (1) on the system mortgage (mortgage) PT. Bank Bank Tabungan Negara Tbk. Bogor Branch, (2) analyze the effectiveness of the system of mortgage (mortgage) in order to reduce non-performing loans. This type of research is a descriptive study. Studies using primary data sources and secondary data sources, with the data from interviews with employees. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the research showed that the system of credit is good enough to see the results of the NPL, but still lack a document - a document that is used to clarify the penginformasian system of mortgage (mortgage). And there is a discrepancy of employees in the implementation of tasks and responsibilities.*

Keywords: *System, Housing Loan, Non-performing loan, the Internal Control*

PENDAHULUAN

Semakin pentingnya bank untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatnya perkonomian, maka diketahuilah pula bahwa fungsi bank yaitu sebagai penghimpunan dana bagi masyarakat sertamenyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat. Penyaluran dana yang diberikan bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Begitu pula penelitian ini dilakukan pada bank umum konvensional yang salah satu produknya adalah kredit. Dimana hingga saat ini sebagian besar kemungkinan bank menganggap bahwa pemasukan operasional yang paling utama berasal dari produk kredit. Tapi sebenarnya kredit merupakan salah satu aktiva yang memiliki resiko terbesar yang berakibat buruk pada bank yaitu berpengaruh terhadap kesehatan bank dan kelangsungan hidup bank tersebut. dengan begitu sebuah bank dalam memberikan suatu kredit haruslah berhati – hati yaitu dengan memberikan kualitas baik dan sesuai pada prosedur – prosedur kredit.

Semakin besar tingkat penjualan kredit yang terjadi maka semakin besar pula investasi yang di miliki oleh bank tersebut. Dan berpengaruh juga terhadap kelangsungan arus perdangan di Indonesia yang menjadi lancar. Kredit juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kebutuhan masyarakat yang diketahui tidak terbatas, dan merupakan makhluk *Homo Economicus* yang berusaha untuk selalu memenuhi keingan akan kebutuhannya.

Seiring dengan mahalnya biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa papan, maka pemerintah menunjuk lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan jasa berupa kredit pemilikan rumah (KPR). Kredit pemilikan rumah merupakan jenis kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan secara langsung. Kredit pemilikan rumah diberikan oleh lembaga keuangan dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam membangun rumah, merenovasi, membeli atau memperluas tanah dengan pembayaran yang dapat diangsur setiap bulan dengan bunga yang ringan. Dengan begitu kredit pemilikan rumah ini sangat banyak diminati oleh para nasabah, yang mengakibatkan terjadinya naik turunnya rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang tidak terduga oleh bank.

1. Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. (Kasmir, 2012)

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari

perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan – urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi – transaksi perusahaan yang sering terjadi (Badriwan, 2012).

2. Bank

Menurut Undang – Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedang pengertian bank menurut (Hasibuan, 2015) adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

3. Kredit

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, dikutip bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai perjanjian yang disepakati oleh debitur dengan jumlah pinjaman beserta bunganya (Hasibuan, 2015)

4. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian oleh badan hukum menurut sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas – berkas

Dalam prosedur pertama dalam pemberian kredit yaitu pemohon kredit harus mengajukan permohonan kreditnya yang dibuat dalam sebuah proposal. Pengajuan proposal kredit tersebut tentang latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, besarnya kredit ditinjau dari laporan keuangan perusahaan, selanjutnya cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci, yang terakhir yaitu memberikan jaminan kredit berupa akte notaris, TDP, NPWP, neraca laporan rugi laba, dan lain – lain.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui kelengkapan berkas dan kebenaran mengenai berkas tersebut. Kalau menurut perbankan berkas tersebut masih ada yang kurang maka pemohon kredit diminta untuk segera melengkapi berkas – berkas tersebut dengan diberikan batas waktu. Tapi batas waktu yang diberikan tetap belum terlengkapi berkasnya maka permohonan kredit itu

dinyatakan batal.

c. Wawancara I

Wawancara ini dilakukan oleh pihak bank secara langsung dengan pemohon kredit. Tujuannya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya juga untuk mengetahui tentang kebenaran mengenai berkas – berkas yang sudah diajukan.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan yang langsung dilakukan dilapangan untuk mengetahui objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan dari permohonan kredit yang sesuai dengan proposal dan jawaban pada saat wawancara I. Pemeriksaan ini tanpa memberitahu nasabah karena ingin melihat langsung kondisi lapangan sesuai dengan yang dilampirkan pada proposal pengajuan kredit.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan, apabila mungkin ada kesalahan atau ketidak cocokan waktu kegiatan on the spot yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya cacatan pada permohonan kredit dicocokkan dengan wawancara I dan on the spot apakah ada kecocokan atau tidak.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit ini adalah menentukan apakah kredit di terima atau ditolak oleh bank. Kalau keputusan ditrima maka akan mencakup jumlah uang yang ditrima, jangka waktu pengembalian dan biaya – biaya yang harus dibayar. Sedangkan kalau keputusan kredit ditolak maka bank akan mengirim surat penolakan dengan memberikan alasan – alasan penolakan.

g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Penandatanganan akad kredit / perjanjian ini kelanjutan dari keputusan kredit, jadi sebelum kredit dicairkan debitur dan kreditur membuat perjanjian. Penandatanganan surat perjanjian atau akad kredit tersebut dilakukan secara langsung atau melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Realisasi ini dilakukan setelah surat – surat perjanjian sudah ditanda tangani dengan lengkap, guna untuk pembukaan rekening giro atau tabungan pada bank tersebut.

i. Penyaluran /penarikan dana

Yaitu pengambilan uang dari rekening setelah direalisasi dari kreditur yang biasanya dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit secara bertahap atau sekaligus.

5. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sebaik mungkin dalam menganalisis dan menjalankan prosedur kredit. Setiap kemungkinan terjadinya kredit macet tetap terjadi. Menurut (Ibrahim, 2004) teknik yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet sebagai berikut :

a. *Rescheduling*

- b. *Reconditioning*
- c. *Restructuring*
- d. Kombinasi
- e. Penyitaan jaminan

6. Pengendalian Intern Perkreditan

Pengendalian intern adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga pemberian kredit tetap lancar, produktif dan tidak macet Tujuan dari adanya pengendalian intern menurut (Hasibuan, 2015) sebagai berikut:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu tetap lancar atau tidak
- c. Melakukan pencegahan dan penyelesaian kredit macet

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data untuk dikembangkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Fokus penelitian merupakan faktor yang penting dalam melakukan penelitian dan berguna untuk membatasi peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Fokus penelitian pada Sistem pemberian kredit pemilikan rumah PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor dan Sistem pengendalian intern pemberian kredit pemilikan rumah dalam rangka mengurangi Non Performing Loan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data diharapkan untuk mendapatkan data mengenai prosedur sistem pemberian kredit, struktur organisasi dan mengenai pengendalian intern yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor

- a. Fungsi yang terkait
- b. Informasi yang diperlukan
- c. Dokumen yang digunakan
- d. Jaringan prosedur dalam sistem

Serta Menganalisis mengenai pengendalian intern sistem pemberian kredit pemilikan rumah dalam rangka mengurangi non performing loan pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi yang diberikan dari hasil penelitian sistem pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor mengenai dokumen – dokumen dan fungsi yang terkait dengan sistem pemberian kredit. Evaluasi tersebut dilakukan

untuk mengantisipasi kelemahan – kelemahan mengenai sistem pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor dan juga untuk mengurangi terjadinya kecurangan pada saat melakukan pemberian kredit kepada debitur. Tahap – tahap pemberian kredit setelah di evaluasi sebagai berikut :

- a. Pengajuan berkas – berkas

Prosedur tahap pertama dalam pengajuan dana kredit pemilikan rumah adalah pengajuan berkas – berkas. PT Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor, memberikan pengawasan kredit mulai sejak awal dalam terjadinya transaksi kredit yang dibukukan dalam sebuah formulir pengajuan kredit. Formulir yaitu digunakan untuk merekam semua peristiwa awal dalam pengajuan kredit. Formulir tersebut berisi tentang data – data riwayat calon debitur dan ada berkas – berkas yang harus dilengkapi oleh calon debitur.

Semua berkas permohonan yang tercantum di formulir sudah lengkap selanjutnya diberikan ke bagian layanan kredit cabang (LKC), dan formulir akan diberikan nomor registaris agar mempermudah bagian kredit untuk melakukan pengawasan. Dan pada tahap ini pengawasan kredit sudah dilakukan dengan baik, karena formulir – formulir yang digunakan sudah sesuai dan ditangani oleh bagian yang berwenang.

- b. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan berkas pinjaman ini tujuannya adalah untuk mengetahui kelengkapan berkas. Pihak PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor pada tahap penyelidikan ini memberikan formulir persyaratan yang berisi daftar – daftar dokumen yang digunakan untuk memeriksa berkas – berkas yang sudah ada lalu diberikan checklist pada formulir persyaratan tersebut. Pengawasan dari pihak bank ini sudah berjalan dengan baik karena dilengkapinya formulir – formulir rekaman pada transaksi kredit.

- c. Wawancara pertama

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui sumber dana yang digunakan untuk membayar angsuran kredit. Pengawasan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor, sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan prinsip kredit 5C tetapi kurang baik karena yang melakukan wawancara adalah *Account Officer* yang seharusnya dilaksanakan oleh bagian layanan kredit cabang (LKC).

- d. On the spot

Pengawasan untuk tahap *on the spot* ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Karena pada prosedur tahap ini pemeriksaan yang dilakukan langsung ke objek yang dijadikan jaminan oleh debitur, yang selanjutnya hasil on the spot tersebut dococokkan dengan hasil wawancara pertama. Sedangkan pada tahap on the spot ini yang berwenang adalah bagian *Account Officer* , yang sudah sesuai dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor.

- e. Wawancara kedua

Prosedur pemberian kredit pemilikan rumah

(KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor, tidak ada tahap wawancara kedua yang dilaksanakan melainkan sesudah on the spot langsung melakukan analisis kredit. Tahap analisis kredit dilakukan berdasarkan dari hasil wawancara pertama dan pemeriksaan on the spot saja. Meskipun dalam pengawasan kredit tahap yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor sudah baik walaupun tanpa melakukan tahap wawancara kedua. Karena pada tahap analisis kredit bagian Account Officer sudah sangat teliti dalam menganalisis hasil dari wawancara pertama dan kegiatan on the spot yang menghasilkan data – data yang sesuai dengan berkas – berkas yang sudah diajukan oleh calon debitur. Tetapi lebih baiknya juga kalau PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor untuk melakukan tahap wawancara kedua untuk menghasilkan data – data mengenai sumber keuangan dan kebenaran mengenai jaminan yang benar – benar dapat menanggung resiko dalam pembayaran angsuran. Dan yang dapat menjamin untuk mengurangi terjadinya kredit macet.

f. Keputusan kredit

Pada tahap keputusan kredit sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, karena dilakukan oleh dua pejabat yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Dalam pengambilan keputusan kredit tidak hanya pejabat saja yang dilibatkan *Account Officer* juga ikut dalam pengambilan keputusan untuk menghindari terjadinya penyalagunaan dalam pengambilan keputusan kredit. Setelah keputusan kredit diberikan maka selanjutnya *Account Officer* melanjutkan persiapan prosedur tahap penandatanganan akad kredit. Dan dilampirkannya formulir putusan kredit (PTK).

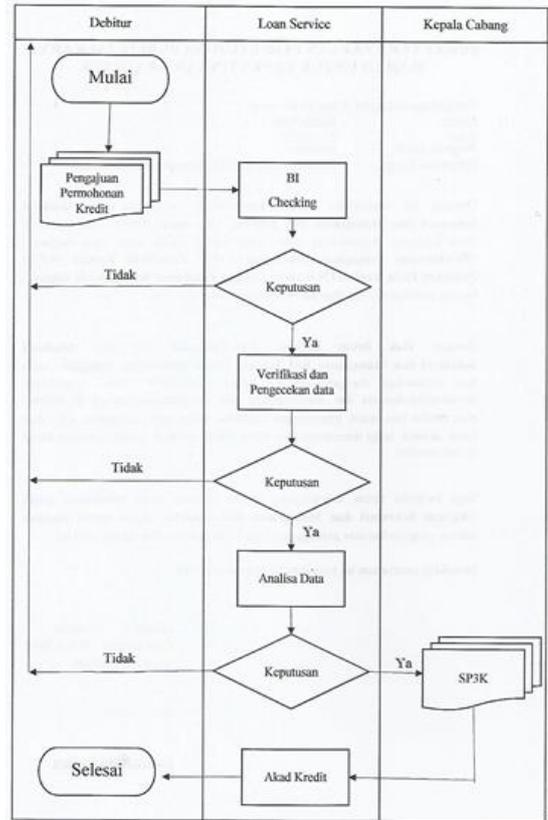
g. Penandatanganan akad kredit

Pada tahap penandatanganan akad kredit dilakukan oleh debitur dengan kreditur, dan notaris selaku pembuat surat perjanjian. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian dapat dilakukan apabila semua dokumen yang sudah lengkap. Pengawasan kredit pada tahap prosedur penandatanganan akad kredit ini sudah baik karena ada debitur, kreditur dan notaris. Tetapi pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor.

h. Realisasi kredit

Tahap realisasi kredit dilakukan setelah perjanjian akad kredit di tanda tangani oleh debitur dan kreditur. Menurut pengawasan kredit tahap realisasi kredit sudah berjalan dengan baik karena setiap proses dari kredit sudah ditangani oleh bagian yang berwenang dan menggunakan formulir – formulir yang sesuai.

Prosedur sistem pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor yang disarankan sebagai berikut :



Sumber : data diolah 2018

Gambar 1. Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah

Sistem pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor dengan pemberian saran yang sudah di gambarkan di atas. Sedangkan suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki pengendalian intern. Dari pengendalian intern yang dimiliki oleh PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor, pengendalian intern tersebut di analisis sebagai berikut :

- Sistem pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor adalah mengenai kebijakan kredit, struktur organisasi, dan sistem prosedur pemberian kredit.
- Melakukan dan memberikan pengawasan kredit secara ketat terhadap kredit yang disalurkan untuk mengetahui lancar atau tidak lancar.
- Mengevaluasi prosedur penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh karyawan sudah baik atau belum baik.
- Pada prosedur pemberian kredit, karyawan yang bertugas memberikan pelayanan harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadi kecurangan.

Proses sistem pengendalian intern dilakukan sendiri oleh pihak bank.

- Pengawasan kredit dilakukan setiap hari kepada debitur – debitur yang sudah mendekati jatuh tempo pembayaran kredit
- Pengawasan pemberian kredit langsung dilakukan oleh pimpinan bank dengan laporan yang dibuat oleh bawahan.
- Memberikan motivasi kepada karyawan untuk

meningkatkan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.

Pengendalian intern yang dilakukan sebelum terjadinya kredit macet dan pengendalian intern setelah terjadinya kredit macet sebagai berikut :

a. *Preventive Control of Credit* adalah pengendalian intern yang dilakukan sebelum terjadinya kredit macet. Pengendalian intern sebelum terjadinya kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut

1) Penetapan plafon

Penetapan plafon diberikan untuk mengetahui batas maksimal pemberian kredit. Tetapi pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor tidak diberikan batas maksimal dalam penyaluran dana kredit, hanya saja PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor memberikan batas minimum dalam penyaluran kredit.

2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur dimaksudkan agar tidak terjadinya tunggakan dalam pembayaran angsuran. Pemantauan tersebut dilakukan dengan selalu mengawasi perkembangan usaha yang dilakukan oleh debitur, apakah menurun atau semakin berkembang.

3) Pembinaan debitur

Pada tahap pembinaan debitur yang berupa pembinaan mengenai manajemen dan administrasi pengelolaan perusahaan tidak diberikan kepada debitur. Yang sebaiknya diberikan kepada para debitur agar debitur dapat lebih mengerti dalam manajemen dan administrasi dalam mengelola perusahaannya dengan baik.

b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian intern yang dilakukan setelah penyelesaian kredit macet. Pada proses ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) *Rescheduling*

Penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu angsuran. Misalnya, pada perjanjian awal pembayaran dapat diangsur selama 5 tahun, tetapi pembayaran angsuran menjadi 5,5 tahun sehingga debitur bisa lebih lama dalam mengangsurnya.

2) *Reconditioning*

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat – syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.

3) *Restructuring*

Penataan kembali yaitu perubahan syarat – syarat kredit. Misalnya Tuan AB memiliki usaha mebel, tuan AB ini tidak mampu untuk membayar hutang pokok tetapi tuan AB dapat membayar bunga yang tetap berjalan. Dan dikatakan bahwa usaha yang di miliki tuan AB berjalan cukup baik, yang menyebabkan kemunduran usahanya adalah

faktor ekonomi. Salah faktor ekonomi tersebut adalah kenaikan BBM yang menyebabkan barang – barang kebutuhan yang digunakan untuk membuat mebel tersebut. Melihat keadaan tersebut pihak kreditur melakukan negoisasi dengan debitur yang diketahui bahwa itikad tuan AB yang baik dan prospek usahanya yang cukup baik juga, maka hasil negoisasi tersebut pihak kreditur memberikan keputusan untuk memberikan penambahan modal.

Sedangkan penelitian yang sudah dilakukan pada kredit macet KPR PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Jumlah KPR yang Disalurkan dengan Jumlah Kredit Macet KPR BTN Periode 2017 (dalam Rupiah)

Bulan	KPR		KPR		NPL (%)
	Debitur	Jumlah (jutaan)	Debitur	Jumlah (jutaan)	
Januari	4	3.264	4	1.723	0,13
Febuari	3	7.443	3	1.692	0,50
Maret	6	9.382	3	1.517	0,62
April	3	1.952	3	1.690	0,12
Mei	12	10.394	4	1.706	0,06
Juni	4	6.678	3	1.786	0,37
Juli	7	1.454	2	1.509	0,09

Sumber : data diolah 2018

Berdasarkan data yang sudah di olah pada tabel 1, membuktikan bahwa kredit macet yang dialami oleh PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor mengalami naik turun setiap bulannya. Tetapi prosentasen NPL sudah baik.

KESIMPULAN

Kelebihan dari sistem pemberian kredit pemilikan rumah PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor , antara lain :

1. Penerapan sistem pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor sudah baik
2. Pada analisis kredit pihak *Account Officer* (AO) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan melakukan kunjungan dan selanjutnya menganalisis hasil kunjungan
3. Pada tahap perjanjian kredit sudah dilakukan dengan baik oleh layanan kredit cabang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
4. Pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan bank melalui laporan yang telah dibuat oleh bawahannya

Kelemahan dari sistem pemberian kredit pemilikan

rumah PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor, antara lain :

1. Tidak adanya nomor registrasi yang digunakan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor yang digunakan dalam memudahkan penyimpanan dan penyelidikan
2. Pada saat prosedur pemberian kredit dilakukan oleh *Account Officer* (AO) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan survey dan menganalisis kredit
3. Tahap pencairan kredit tanggung jawab ada pada bagian pelayanan kredit cabang dan realisasi dana juga pada layanan kredit cabang.
4. Tidak adanya pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh pimpinan, untuk mengetahui karyawan benar – benar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya apa belum

Pada penelitian sistem pemberian kredit dan berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Bogor mengenai sistem pemberian kredit pemilikan rumah sebagai berikut :

1. Tahap prosedur pemberian kredit seharusnya pada saat pengajuan memiliki registrasi nomor yang digunakan untuk penyimpanan dan untuk membantu memudahkan *Account Officer* (AO) dalam melakukan penyelidikan.
2. Pada pemberian kredit pemilikan rumah seharusnya dilakukan oleh layanan kredit cabang, yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kecurangan.
3. Pencairan dana seharusnya dilakukan oleh teller yang ditunjuk. Cuma melayani pencairan dan kredit saja, sedangkan untuk realisasi dana dilakukan oleh *Account Officer* (AO), yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab supaya tidak ada kerangkapan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.
4. Seharusnya dilakukannya pemeriksaan secara mendadak kepada karyawan agar karyawan tidak melakukan kecurangan dan karyawan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

REFERENSI

- Badriwan, Z. (2012). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode* (Kesepuluh). Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, J. (2004). *Mengupas Tuntas (Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (11th ed.). Jakarta: Rajawali.
- Vina Islami. (2019). Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Untuk Mengurangi NPL (Studi Kasus BTN Cabang Bogor). *Moneter*, 6(1 April 2019), 1–6.

PROFIL PENULIS

Vina Islami, S.Pi, MM, lahir di Bima 25 Desember 1985, menyelesaikan S1 pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) tahun 2008. Tahun 2010 menyelesaikan program Magister Manajemen Bisnis pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB – IPB). Mengajar pada STIE Dewantara Bogor dan Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Sarana Informatika Jakarta dari Maret 2013 sampai sekarang. Di BSI sebagai Dosen dan masuk komisi ASM (Akademi Sekretari dan Manajemen) dan mengampu matakuliah Komunikasi Bisnis, Hukum dan Etika Bisnis, Administrasi Bisnis, Service Excellent dan Entrepreneur. Artikel ilmiah yang pernah ditulis “Analisis Penerapan Manajemen Strategik Perubahan Studi Kasus LPK Success Bogor” pada *Jurnal Widya Cipta* Vol. VIII No.2 September 2016 ISSN 1411-8637, “Prosedur Lelang Hak Tanggungan Di Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Jakarta Pusat” pada *Jurnal Cakrawala* Vol VII No 1 Maret 2017 ISSN 2579-3314, “Pengaruh Perkembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sucofindo (persero) Jakarta” p ISSN 1411-8629 e ISSN 2579-3314. Selain itu, mengikuti kegiatan seminar-seminar baik yang bersifat lokal kampus, nasional dan internasional serta aktif sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur

Dede Suleman

Universitas BSI JAKARTA
dede.dln@bsi.ac.id

(Suleman, 2019)Suleman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter*, 6(1), 7–12.

Abstract *one of the local taxes is restaurant tax. in this research, it will give a big picture of contributing restaurant tax to Jakarta Timuel's original revenue. Regional taxes are divided into three types, taxes levied by local governments, taxes collected based on national regulations, but income tariffs made by local governments. Restaurant tax is a service provided by payment, a service provided by a restaurant called service includes the sale of food and / or drinks consumed by the buyer, whether consumed at the service place or elsewhere. The subject of restaurant tax is an individual or entity that makes payments to restaurants or restaurants, cafes, bars and the like, while taxpayers are individuals or entities that run restaurants. The restaurant tax rate set is 10%. restaurant tax revenue increases every year and can exceed the target set only in 2014 restaurant tax revenue is only 82%. restaurant tax contribution increases every year for East Jakarta administrative city tax revenues, which has a significant influence in 2014 amounting to 46.78% and 2015 at 50.19% and 2016 at 55.69%*

Keywords: *Restaurant Tax, Local Income*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kuliner saat ini sangat pesat dan merupakan fenomena dimana berbagai sajian makanan mulai di hadirkan dengan konsep dan nuansa yang berbeda. Berbagai merk baik yang local maupun asing dari yang milik pribadi atau waralaba terus melebarkan sayap usahanya dan membuka cabang-cabang baru di tiap sudut jalan yang memiliki potensi pelanggan.

Hal ini memicu pada pertumbuhan jumlah restoran yang beroperasi di khusus nya di area Jakarta Timur yang merupakan satu kawasan bagian dari DKI Jakarta.yang memiliki motto bambu apus – sri dunting

Pajak di DKI Jakarta sendiri di kelola oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang dulunya namanya Dinas Pelayanan paja (DPP). BPRD saat ini memiliki lima suku badan di lima wilayah DKI Jakarta antara lain :

- a. BPRD kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. BPRD kota Administrasi Jakarta Barat
- c. BPRD kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten kepulauan seribu
- d. BPRD kota Administrasi Jakarta Selatan
- e. BPRD kota Administrasi Jakarta Timur

Sedangkan masing-masing BPRD di kota Adminstrasi memiliki Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPRD). Dan di kota administrasi Jakarta Timur sendiri memilli sepuluh UPPRD ditiap kecamatan diwilayahnya.

Ditiap UPPRD memiliki tugas melayani pemungutan jenis pajak dan pelaporan pajak antara lain :

- a. Pajak PBB-P2
- b. BPHTB
- c. Reklame
- d. Pajak Air Bawah Tanah (PABT)
- e. Pajak Hotel
- f. Pajak Restoran
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Hiburan
- i. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Disamping itu UPPRD selaian menerima setoran pajak juga melayani mulai dari penilaian, pemeriksaan dan pengawasan, penetapan dan penagihan, pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang ada di wilayahnya .

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki luas kurang lebih 188 km² jika di dibandingkan dengan luas DKI Jakarta yang kurang lebih 661.5 km², maka luas kota Adminstrasi Jakarta Timur ini sekitar 28.5% dari luas wilayah DKI Jakarta. Dengan area yang cukup luas ini maka penulis akan melihat berapa potensi yang dan kontribusi yang diberikan terhadap PAD DKI Jakarta untuk pajak Restoran di wilayah kota Admininstrasi Jakarta Timur itu sendiri.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan

menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut (Suleman, 2017).

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Suleman, 2018)

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (waluyo dalam (Suleman, 2018)

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut (Masdiasmo, 2011)

Definisi pajak menurut undang-undang nomor no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 pasal 1 tahun 2007 menjelaskan bahwa : “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

Menurut (Resmi, 2014) ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi pajak menurut (Diana, 2013) memiliki dua fungsi utama, diantaranya :

- a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

- b. Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
- c. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
- d. Sebagai fungsi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat (Mardiasmo, 2016)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (waluyo , 2011).

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah.
- b. Retribusi daerah retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
 - 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN.
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok.

d. Lain-lain pendapatan yang sah pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan.

Hukum pajak pemungutan pajak Daerah di DKI Jakarta adalah Sebagai berikut :

Tabel 1. Dasar Hukum Pajak DKI Jakarta

No	Jenis Pajak	Peraturan Daerah	Tarif
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Nomor 2 Tahun 2015	2%-10%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Nomor 9 Tahun 2010	0.75%-10% (BBN1) 0.075%-1% (BBN II)
3	Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor	Nomor 10 Tahun 2010	5%
4	Pajak Hotel	Nomor 11 Tahun 2010	10%
5	Pajak Hiburan	Nomor 3 Tahun 2015	5%-35%
6	Pajak Penerangan Jalan	Nomor 15 Tahun 2010	1.5%-3%
7	Pajak Air Tanah	Nomor 17 Tahun 2010	20%
8	Pajak Parkir	Nomor 16 Tahun 2010	20%
9	BPHTB	Nomor 18 Tahun 2010	5%

10	Pajak Restoran	Nomor 11 Tahun 2011	10%
11	Pajak Reklame	Nomor 12 Tahun 2011	25%
12	PBB pedesaan dan kota	Nomor 16 Tahun 2011	0.01%-0.3%
13	Pajak Rokok	Nomor 2 Tahun 2014	10%

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

3. Pendapatan Asli Daerah

mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Siahaan, 2010).

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

4. Pajak Restoran

Pajak restoran dapat digolongkan pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang di berikan kepada konsumen ini, bebabnya berapa pada konsumen. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. (suleman, 2017)

Menurut perda Nomor 11 tahun 2011 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dalam pemungutan pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu di ketahui, terminology tersebut menurut peraturan daerah no.11 Tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam

- lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan usaha dibidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran atas pemilik rumah makan.
 - d. Bon penjual (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.

Subjek pajak restoran sesuai perda Nomor 11 tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Objek pajak restoran itu sesuai perda nomor 11 tahun 2011 adalah :

- a. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
- b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat ataupun di tempat lain.

Ada beberapa pengecualian dalam pajak restoran antara lain :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolannya satu manajemen dengan hotel
- b. Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per tahun.

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 40 paling tinggi ditentukan sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan Daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi kabupaten/kota masing-masing.

Dasar pengenaan pajak restoran menurut perda No 11 tahun 2011 adalah jumlah pembayaran yang di lakukan kepada restoran berlaku juga untuk pelayanan kepada instansi pemerintahan.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai perhitungan berikut (Siahaan, 2010)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran} \\ &\quad \text{diterima atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{diterima Restoran} \end{aligned}$$

Menurut Pergub nomor 22 Tahun 2007 pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan artinya seluruh

proses pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Setiap pengusaha restoran wajib memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Artinya fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak restoran.

Menurut (Siahaan, 2010) masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dalam bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangk waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Menurut Pergub No.22 tahun 2007 pajak pasal 9 tentang petunjuk pemungutan pajak restoran, pembayaran masa pajak restoran terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Jika ada keterlambatan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Menurut Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2007 pasal 22 dan pasal 24 wajib pajak restoran dengan peredaran usaha atau omset lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standard akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan secara umum. Dan pembukuan serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan akan diterangkan perbandingan data dari tahun ke tahun untuk pajak restoran di kota administrasi Jakarta Timur

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Data mengenai rekapan penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah dinas pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Target dan Realisasi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
2014	111.000.000.000	90.010.667.348	82 %
2015	119.385.000.000	120.367.066.166	101%
2016	149.195.000.000	156.577.884.159	105%

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Dapat Disimpulkan dari Tabel 2 bahwa target Pajak Restoran tiap tahun mengalami kenaikan. Namun demikian untuk wilayah kota Administrasi Jakarta Timur untuk penerimaan pajak restoran selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014 Target terhadap penerimaan pajak restoran tidak mencapai target didapati bahwa hanya sanggup mencapai 92% dari target yang di tetapkan.

$$\begin{aligned} \text{prosentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 90.010.667.348}{\text{Rp. } 111.000.000.000} \times 100\% = 82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 Target terhadap penerimaan pajak restoran dapat mencapai target dan melebihi target yang telah ditetapkan dan mencapai 101% dari target yang di tetapkan.

$$\begin{aligned} \text{prosentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 120.367.066.166}{\text{Rp. } 119.385.000.000} \times 100\% = 101\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 Target terhadap penerimaan pajak restoran dapat mencapai target dan melebihi target yang telah ditetapkan dan mencapai 105% dari target yang di tetapkan.

$$\begin{aligned} \text{prosentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 156.577.884.159}{\text{Rp. } 149.195.000.000} \times 100\% = 105\% \end{aligned}$$

Tabel 3 Realisasi dan PAD Jakarta Timur

Tahun	Penerimaan (Rp)	PAD (Rp)	Prosentase
2014	90.010.667.348	194.325.021.946	46.78%
2015	120.367.066.166	239.776.722.633	50.19%
2016	156.577.884.159	281.115.092.896	55.69%

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa presentase penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2014, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 46.78% didapat dari

rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{pajak Restoran}}{\text{PendapatAsli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 90.010.667.348}{\text{Rp. } 194.325.021.946} \times 100\% = 46.78\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 50.19% didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{pajak Restoran}}{\text{PendapatAsli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 120.367.066.166}{\text{Rp. } 239.776.722.633} \times 100\% = 50.19\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016, persentase penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 55.69% didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{pajak Restoran}}{\text{PendapatAsli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. } 156.577.884.159}{\text{Rp. } 281.115.092.896} \times 100\% = 55.69\% \end{aligned}$$

KESIMPULAN

Penerimaan pajak restoran tiap tahun mengalami kenaikan dan rata-rata kecenderungannya dapat mencapai target dan melebihi dari target tiap tahun kecuali pada tahun 2014 yang pencapaiannya hanya sebesar 82%

Bahwa ternyata untuk Kota Administrasi Jakarta Timur pajak restoran merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar untuk Penerimaan Asli daerah di Jakarta timur ini di buktikan bahwa pajak restoran persentasenya hampir mencapai 50% dari penerimaan pajak daerah

REFERENSI

- Diana. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: refika aditama.
- Ichsan. (2013, November). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Pada STMIK BUDIDARMA Medan Menerapkan Metode Profile Matching. *Kursor*, 5(1), 2.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (XVIII)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masdiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: andi offset.
- Resmi, s. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- sabil. (2017). Peranan penerimaan pajak reklamet terhadap pendapatan asli daerah pada

- kabupaten bogor jawa barat. *Jurnal Moneter*.
- Siahaan, M. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- suleman, d. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Moneter*, Vol. IV No. 2 Oktober pp 139-144.
- Suleman, D. (2018). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, Vol. V No. 1 April pp 58-62.
- Suleman, D. (2018). Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Moneter*, 5(2), 1–6.
- waluyo , P. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Dede Suleman adalah Doktor candidate Marketing di Universitas Mercubuana, Jakarta. Gelar Sarjana dari Universitas Azzahra, jurusan Ekonomi, dan Magister dari Universitas BSI Bandung.

Dede suleman saat ini sebagai pemilik dan sebagai pengelola di industri Restoran dengan sistem waralaba dengan merek My Bento yang telah dikembangkan selama 10 tahun,

Dan juga berkarier sebagai Dosen tetap di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Minat penelitiannya termasuk pengembangan dunia operasional waralaba dan manajemen waralaba, pemasaran dan perilaku konsumen serta perpajakan, keuangan, e-business, e-marketing dan e-commerce

Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS

Sarlina Sari

Universitas Bina Sarana Informatika
e-mail: sarlinasari.new@gmail.com

(Srlina Sari, 2019)

Sarlina Sari. (2019). Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS. *Moneter*, 6(1), 13–22.

Abstract - *This study aims to examine and analyze whether earnings management after the implementation of SFAS convergence with IFRS is lower than earnings management prior to implementation of SFAS convergence with IFRS on top leadings in market capitalization companies listed on BEI (Indonesia Stock Exchange) in period of 2010-2011. Earnings management is measured by absolute discretionary accruals using Modified Jones Model developed by (Dechow P., Sloan R., 1995). This study is hypothesis testing research. The population in this study are all companies included "50 top leadings in market capitalization" that listed on BEI. This study uses census and there were 10 companies fulfilling the population criteria. The type of data used are secondary data from company's financial statements obtained from BEI's official website. Data were analyzed by comparing average value of discretionary accruals before and after the implementation of SFAS convergence with IFRS. This result indicates that earnings management after the implementation of SFAS convergence with IFRS is lower than earnings management prior to implementation of SFAS convergence with IFRS on top leadings in market capitalization companies listed on BEI in period of 2010-2011.*

Keywords: *Earnings management, discretionary accruals, SFAS convergence with IFRS*

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan didanai oleh investor dan dikelola oleh manajemen. Manajer bertanggungjawabkan seluruh transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan yang dikelolanya melalui laporan keuangan. (Kieso, D. E., J. J. Weygandt, 2008) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan manajemen untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.

Menurut SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No. 1 tahun 1978, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba mempermudah pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya praktik manajemen laba (Widyaningdyah, 2001).

(Nugroho, 2011) menyatakan sebagai berikut:

"Manajemen laba bukanlah hal baru dalam khasanah dunia akuntansi keuangan. Istilah manajemen laba

telah menjadi sebuah fenomena yang telah turut menambah wacana perkembangan teori akuntansi dan merupakan salah satu kajian yang menarik dalam riset akuntansi. Istilah manajemen laba muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer atau pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya laba (*earnings*), demi kepentingan pribadi dan/atau perusahaan. Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan".

Menurut (Scott, 2006) seorang manajer akan memilih satu metode atau kebijakan tertentu yang diperbolehkan GAAP (*General Accepted Accounting Principles*) dengan harapan dapat memaksimalkan *utility* mereka atau meningkatkan nilai perusahaan. Manajer mempengaruhi angka laba sistematis dengan cara memilih kebijakan dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan *utility* manajer dan harga saham. Perilaku demikian disebut sebagai manajemen laba. Manajemen laba juga dapat diartikan sebagai cara akuntansi yang dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan untuk memenuhi target laba (Levitt, 1998)).

(Fischer, M., 1995) secara spesifik berpendapat bahwa manajemen laba adalah tindakan manajer

untuk meningkatkan atau menurunkan laporan laba suatu perusahaan tanpa sebenarnya terjadi kenaikan atau penurunan dari profitabilitas jangka panjang perusahaan.

Manajemen laba menjadi penting untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya motivasi tertentu yang membuat mereka “bermain” dengan data keuangan yang dilaporkan. Manajemen laba menjadi tidak selalu harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi tetapi dapat juga dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (*accounting methods*) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan (Nugroho, 2011).

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom, dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Skandal Enron dan WordCom sepanjang tahun 2002 merekayasa laporan keuangannya sehingga menjadi *overstated*, menyesatkan dan membingungkan. Muaranya ialah pada angka laba rugi yang di-*manage*, lalu secara otomatis mempengaruhi harga saham, selanjutnya kemerosotan kepercayaan masyarakat, dan berakhir pada kebangkrutan. Peristiwa tersebut telah menempatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan semakin rendah (Avianti, 2006).

Bapepam (2004) dalam (Avianti, 2006) menyatakan sebagai berikut:

”Kecurangan akuntansi juga terdapat di Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI), antara lain kasus PT. Kimia Farma Tbk., dan PT. Lippo Tbk., pada tahun 2002 yang mengindikasikan adanya praktik manajemen laba. PT. Kimia Farma Tbk., pada tahun 2002 menaikkan laba hingga Rp 32,7 Milyar. Manajemen laba tersebut diduga terkait dengan keinginan manajemen lama untuk dipilih kembali oleh pemerintah guna mengelola perusahaan farmasi tersebut. PT. Indo Farma Tbk., pada tahun 2004 melakukan praktik manajemen laba dengan menyajikan *overstated* laba bersih senilai Rp 28,870 Milyar, sebagai dampak dari persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut *understated*”.

Praktik manajemen laba pada perusahaan dipicu oleh keinginan manajemen untuk memanfaatkan kelonggaran standar akuntansi lokal atau PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengizinkan pemilihan metode dan kebijakan akuntansi yang diinginkan manajemen untuk diterapkan secara konsisten. Hal ini menyebabkan *output* dari proses akuntansi berbagai perusahaan

menjadi berbeda, sehingga rentan terjadi praktik manajemen laba. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi yang berlaku secara global agar kualitas informasi akuntansi yang disajikan manajemen meningkat dan seragam meskipun perusahaan beroperasi di negara yang berbeda.

Menurut (Rudra & A, 2012), isu mengenai manajemen laba menjadi fokus tersendiri atas reliabilitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan publik. Beberapa penelitian di negara-negara maju menyatakan bahwa standar akuntansi internasional/ IFRS (*International Financial Accounting Standards*) mampu meningkatkan nilai informasi akuntansi. Sebaliknya, juga terdapat beberapa penelitian bahwa IFRS pada pasar berkembang (*emerging market*) belum mampu menurunkan aktivitas manajemen laba.

(Rudra & A, 2012) melakukan penelitian di India yang bertujuan untuk menguji apakah perusahaan yang mengadopsi IFRS dapat menurunkan praktik manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang mengadopsi standar akuntansi lokal. Temuan mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi IFRS lebih suka melakukan praktik manajemen laba dibandingkan perusahaan yang tidak mengadopsi IFRS. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator pembuat standar akuntansi mengenai keefektifan pengadopsian IFRS dalam menurunkan praktik manajemen laba oleh perusahaan di negara bersangkutan.

Selain itu, (Gontcharov, I., 2007) menguji apakah terdapat perbedaan tingkat manajemen laba akuntansi konsolidasian perusahaan publik Jerman yang disusun berdasarkan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu German GAAP, IAS (*International Accounting Standards*), dan US GAAP. Mereka menemukan bahwa tingkat manajemen laba perusahaan yang menyusun laporan keuangannya sesuai US GAAP secara signifikan lebih rendah, sedangkan tingkat manajemen laba berdasarkan German GAAP dan IAS cenderung sama. Berdasarkan bukti tersebut, mereka menyimpulkan bahwa pemilihan standar akuntansi yang berbeda dapat mempengaruhi manajemen laba.

(Lantto, 2007) juga meneliti apakah IFRS dapat meningkatkan kegunaan informasi akuntansi di Finlandia dengan melakukan survei pada manajer, analis laporan keuangan, dan auditor. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa baik auditor, manajer, dan analis berpendapat bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS dapat diandalkan dan relevan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi yang berkualitas sangat penting untuk pengembangan

kualitas struktur pelaporan keuangan global, sehingga dapat menurunkan aktivitas manajemen laba oleh perusahaan. Standar akuntansi yang berkualitas terdiri dari prinsip-prinsip komprehensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan, dan dapat diandalkan yang berguna bagi investor, kreditor, dan pihak lain untuk membuat keputusan alokasi modal (SEC, 2000 dalam (Chariri, Anis, 2010) Permasalahan akan kebutuhan standar yang berkualitas tersebut menuntut akan pengadopsian IFRS yang berdasar atas adanya peningkatan kualitas akuntansi dan keseragaman standar internasional.

Penerapan IFRS sebagai standar internasional menyebabkan semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode dan kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan perusahaan, sehingga akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan akuntansi seperti manajemen laba (Prihadi, 2011:4 dalam (Rohaeni, D., 2012). Hal ini dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengadopsian IFRS umumnya mampu meningkatkan kualitas standar akuntansi di sebagian besar negara, yaitu penelitian (C. Leuz & Verrecchia, 2000); Ashbaugh dan Pincus (2001); (Christian Leuz, 2003); (Barth, M. E., W. R. Landsman, 2008); dan Christensen, Lee, dan Walker (2008).

1. IFRS (*International Financial Reporting Standards*)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh IASB (*International Accounting Standar Board*). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). IASB yang dahulu bernama IASC (*International Accounting Standar Committee*) merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999 dalam (Situmorang, 2011) .

Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan IAS. IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan *revaluation model*, yaitu kemungkinan penilaian aset menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis "*true and fair*" (IFRS *framework* paragraf 46). Mengadopsi

IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (Situmorang, 2011).

2. Manajemen Laba

Para pakar kurang seragam dalam mendefinisikan manajemen laba. (Schipper, 1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. (Scott, 2006) menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk suatu tujuan tertentu disebut manajemen laba. Manajemen laba juga dapat didefinisikan sebagai "*some ability to increase or decrease reported net income at will*" (Copeland, 1968). Ini berarti bahwa manajemen laba merupakan usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimalkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen.

Sugiri (1998) dalam (Widyaningdyah, 2001) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu: "Definisi sempit: Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya laba.

Definisi luas: Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut".

(Healy, 1985) menjelaskan bahwa:

"Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba, salah satu cara adalah dengan mengendalikannya transaksi akrual. Transaksi akrual adalah transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas masuk maupun kas keluar. Misalnya pengakuan hutang, biaya atau piutang/pendapatan. Transaksi akrual terdiri dari transaksi yang bersifat *non-discretionary* (bukan mengubah kebijakan atau metode akuntansi) dan yang bersifat *discretionary*. Transaksi yang bersifat *non-discretionary* yaitu transaksi yang dicatat dengan menggunakan satu prosedur apabila prosedur tersebut dipilih, maka manajemen diharapkan konsisten dalam menggunakan prosedur tersebut. Contoh dari transaksi akrual yang *non-discretionary* adalah metode depresiasi, penggunaan metode akuntansi dalam perusahaan minyak antara *full method* dan *successful effort*, metode penentuan harga pokok persediaan FIFO (*First in First Out*) dan LIFO (*Last in First Out*). Transaksi akrual yang *discretionary* memberikan kebebasan kepada manajemen menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel.

Contoh yang termasuk transaksi ini adalah penentuan cadangan kerugian piutang yang nantinya akan menaikkan piutang dagang *netto*, menaikkan persediaan, menurunkan hutang dagang, dan hutang akrual (Scott, 2006)

Secara garis besar (Healy, 1985) menyatakan bahwa penggunaan transaksi *discretionary accruals*, manajemen dapat mempengaruhi laba dengan mengendalikan jumlah transaksi akuntansi. Contoh transaksi *discretionary accruals* yaitu menaksir jumlah piutang tidak tertagih diturunkan dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah piutang *netto* akan naik, dengan asumsi pendapatan tetap, maka laba tahun ini akan relatif tinggi. Selain itu adanya perubahan taksiran umur ekonomis aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud. Proses yang dilakukan oleh manajemen tersebut dengan cara menggeser periode biaya atau pendapatan, sehingga manajemen dapat memperoleh keuntungan dibalik perubahan yang dilakukannya (Lestari, 2010)

3. Kerangka Pemikiran

Standar akuntansi mengatur kebijakan akuntansi secara fleksibel. Fleksibilitas untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi terkadang memotivasi manajer untuk meningkatkan, menurunkan atau meratakan laba dari tahun ke tahun. Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Perhatian para investor yang terpusat pada informasi laba membuat manajemen berpotensi untuk melakukan manajemen laba.

Pengadopsian IFRS memiliki pengaruh yang sangat besar pada perusahaan, khususnya pada pelaporan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula (Situmorang, 2011:2). Manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan serta menghasilkan informasi yang valid untuk aset, hutang, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan (Petreski, 2006).

Penerapan IFRS sebagai standar global akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan akuntansi seperti manajemen laba (Prihadi, 2011:4 dalam (Rohaeni, D., 2012). Sebelumnya telah ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

pengadopsian IFRS umumnya mampu meningkatkan kualitas standar akuntansi di sebagian besar negara, yaitu penelitian (C. Leuz & Verrecchia, 2000); Ashbaugh dan Pincus (2001); (Christian Leuz, 2003); (Barth, M. E., W. R. Landsman, 2008); dan Christensen, Lee, dan Walker (2008).

PSAK dan IFRS memiliki perbedaan yang besar, PSAK Indonesia mengizinkan praktik akuntansi yang fleksibel, yang mana dapat disebut sebagai upaya akuntansi kreatif (manajemen laba). Diharapkan bahwa IFRS secara khusus akan membatasi praktik ini. Hasilnya, pelaksanaannya akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi (Situmorang, 2011). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti manajemen laba sebelum dan sesudah diadopsinya IFRS baik secara sukarela maupun diwajibkan.

Hasil penelitian (Daske, H., 2006) menyatakan bahwa pengadopsian IFRS dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. (Barth, M. E., W. R. Landsman, 2008) juga meneliti kualitas akuntansi sebelum dan sesudah dikenalkannya IAS/IFRS dengan menggunakan sampel sebanyak 327 perusahaan di 21 negara yang telah mengadopsi IAS secara sukarela antara tahun 1994 dan 2003. Dalam penelitian mereka ditemukan bukti bahwa setelah diperkenalkannya IFRS, tingkat manajemen laba menjadi lebih rendah, relevansi nilai menjadi lebih tinggi, dan pengakuan kerugian menjadi semakin tepat waktu, dibandingkan dengan masa sebelum transisi di mana akuntansi masih berdasarkan *local GAAP*. (Lantto, 2007) juga mengatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik Finlandia yang disusun berdasarkan IFRS dapat diandalkan dan relevan.

Hasil yang berbeda ditemukan oleh (Rudra & A, 2012) yang melakukan penelitian di India dengan tujuan untuk menguji apakah perusahaan yang mengadopsi IFRS dapat menurunkan praktik manajemen laba dibandingkan perusahaan yang mengadopsi standar akuntansi lokal. Temuan mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi IFRS lebih suka melakukan praktik manajemen laba dibandingkan perusahaan yang tidak mengadopsi IFRS. Selain itu, (Jeanjean, T., 2008) juga meneliti dampak keharusan mengadopsi IFRS terhadap manajemen laba dengan mengobservasi 1146 perusahaan dari Australia, Prancis, dan UK mulai tahun 2005 hingga 2006. Penelitian tersebut menemukan bukti bahwa manajemen laba di negara-negara tersebut tidak mengalami penurunan setelah adanya keharusan mengadopsi IFRS, dan bahkan meningkat untuk Prancis.

4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah manajemen laba sesudah penerapan IFRS lebih

rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan IFRS pada perusahaan *top leadings in market capitalization* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS pada perusahaan *top leadings in market capitalization* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 melalui pengujian hipotesis. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian pengujian hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti membandingkan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS.

Situasi studi penelitian tidak diatur. Unit analisis dalam penelitian ini adalah tingkat industri, yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk “50 *top leadings in market capitalization*”. Intervensi peneliti adalah intervensi minimal. Horizon waktu penelitian ini adalah *cross-sectional*, yaitu studi dilakukan untuk mengetahui hubungan komparatif beberapa subjek penelitian. Studi *cross-sectional* umumnya merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu (Lastansi, 2008)

2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang termasuk “50 *top leadings in market capitalization*”. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan yang memiliki total kapitalisasi pasar lebih dari 90 persen, sehingga unit analisis dalam penelitian ini dipilih perusahaan yang termasuk kategori “50 *top leadings in market capitalization*” yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar pula (per Maret 2010-2011). Kapitalisasi pasar merupakan nilai sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar (Rusmanto, 2011).

3. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu manajemen laba. Manajemen laba dapat diukur menggunakan *discretionary accruals* yang dihitung dengan cara menyelisihkan *total accruals* dan *non-discretionary accruals*. Untuk menghitung *discretionary accruals*, digunakan *Modified Jones Model* yang dikembangkan oleh (Dechow P., Sloan

R., 1995). Model perhitungannya sebagai berikut:

$$TACCit = NIit - OCFit$$

$$TACCit/TAi,t-1 = (1/TAi,t-1) + \beta1((\Delta REVit - \Delta RECit)/TAi,t-1) + \beta2(PPEit/TAi,t-1) + it..... \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan (1), *NADCC* dapat dihitung dengan memasukkan kembali koefisien-koefisien:

$$NDACCit = (1/TAi,t-1) + \beta1((\Delta REVit - \Delta RECit)/TAi,t-1) + \beta2(PPEit / TAi,t-1) + it..... \quad (2)$$

$$DACCit = (TACCit/TAi,t-1) - NDACCit..... \quad (3)$$

Keterangan:

- TACCit* : Total Accruals perusahaan i pada periode t
NI : Net Income perusahaan i pada periode t
OCFit : Operating Cash Flow perusahaan i pada periode t
TAi,t-1 : Total Aset perusahaan i pada periode t-1
 $\Delta REVit$: Revenue perusahaan i pada periode t kurang revenue periode t-1
 $\Delta RECit$: Receivable perusahaan i pada periode t kurang receivable periode t-1
PPEit : Nilai aset tetap (*gross*) perusahaan i pada periode t

4. Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

a. Metode Analisis

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS Ver. 20, sedangkan teknik analisis yang digunakan meliputi: statistik deskriptif dan uji beda rata-rata berpasangan. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus tidak dilakukan uji signifikansi. Kesimpulan langsung diambil dari nilai rata-rata populasi sasaran (μ).

Untuk lebih jelasnya, berikut tahap-tahap perhitungan nilai rata-rata *discretionary accruals* masing-masing populasi sasaran (μ_1 dan μ_2).

- 1) Menghitung nilai *total accruals* dengan cara menghitung selisih laba bersih dengan arus kas operasi. Nilai *total accruals* dijadikan sebagai variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk menentukan nilai *non-discretionary accruals* menggunakan model persamaan regresi berganda berikut:

$$TACCit/TAi,t-1 = (1/TAi,t-1) + \beta1((\Delta REVit - \Delta RECit)/TAi,t-1) + \beta2(PPEit/TAi,t-1) + it.....(1)$$

- 2) Koefisien yang diperoleh dari hasil persamaan regresi berganda (1) kemudian dimasukkan kembali ke persamaan tersebut untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accruals* yang akan digunakan untuk menghitung *discretionary*

- accruals* (sebagai proksi manajemen laba).
- 3) Setelah nilai *non-discretionary accruals* diperoleh, kemudian *total accruals* dikurangi dengan *non-discretionary accruals* untuk memperoleh nilai *discretionary accruals* sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS.
 - 4) Menghitung rata-rata nilai *discretionary accruals* masing-masing populasi sasaran (μ_1 dan μ_2) sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS.
 - 5) Membandingkan rata-rata nilai *discretionary accruals* masing-masing populasi sasaran (μ_1 dan μ_2) sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS.

b. Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \mu_2 \geq \mu_1$$

Manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS tidak lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

$$H_a : \mu_2 < \mu_1$$

Manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

Dimana:

μ_1 = Rata-rata manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

μ_2 = Rata-rata manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS.

H_0 diterima artinya manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS tidak lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS. H_a diterima artinya manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals* absolut menggunakan *Jones Modified Model* yang dikembangkan oleh (Dechow P., Sloan R., 1995).

Deskripsi variabel penelitian yang mencakup nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi ditampilkan pada Tabel.

Tabel 1 Deskripsi Data

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev
<i>Discretionary</i>					
<i>Accruals</i> Tahun 2010	10	0.055	0.517	0.26750	0.144575
<i>Discretionary</i>					
<i>Accruals</i> Tahun 2011	10	0.001	0.460	0.19610	0.140167
Valid N (listwise)	10				

Sumber: SPSS Output

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa variabel *discretionary accruals* memiliki nilai minimum pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut sebesar 0,055 dan 0,001 yang berarti bahwa nilai *discretionary accruals* terendah masing-masing tahun berturut-turut sebesar 5,5% dan 0,1% dari total aset, terjadi pada PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA). Nilai maksimum *discretionary accruals* sebesar 0,517 pada tahun 2010 dan 0,460 pada tahun 2011 yang berarti bahwa nilai *discretionary accruals* tertinggi masing-masing tahun berturut-turut sebesar 5,17% dan 4,6% dari total aset, terjadi pada PT. International Nickel Indonesia Tbk (INCO).

Rata-rata nilai *discretionary accruals* pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut sebesar 0,26750 dan 0,19590 yang berarti bahwa rata-rata manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan *top leadings in market capitalization* masing-masing tahun berturut-turut sebesar 26,75% dan 19,6% dari total aset dengan standar deviasi pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut sebesar 0,1446 dan 0,1405 atau sebesar 14,46% dan 14,05% dari total aset. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini berarti sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen.

Nilai *discretionary accruals* yang bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat *discretionary accruals* yang bersifat menaikkan laba (*income increasing*), sedangkan nilai *discretionary accruals* yang bernilai negatif menunjukkan bahwa terdapat *discretionary accruals* yang bersifat menurunkan laba (*income minimizing*). Oleh karena itu, nilai *discretionary accruals* diabsolutkan agar tidak mempengaruhi nilai rata-rata data. Rata-rata *discretionary accruals* tahun 2010 dan 2011 memiliki perbedaan, dimana rata-rata *discretionary accruals* tahun 2010 lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accruals* tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa perusahaan *top leadings in market capitalization* mengurangi praktik manajemen laba setelah penerapan PSAK konvergensi IFRS.

2. Uji Hipotesis

- a. Perhitungan *Discretionary Accruals* Periode Sebelum Penerapan PSAK Konvergensi IFRS

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai *total accruals* dengan cara menghitung selisih laba bersih dengan arus kas operasi. Nilai *total accruals* dijadikan sebagai variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi dari *non-discretionary accruals* menggunakan *Jones Modified Model* yang dikembangkan oleh (Dechow P., Sloan R., 1995). Oleh karena itu, model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menentukan nilai estimasi dari *non-discretionary accruals* sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{i,t-1} = (1/TA_{i,t-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{i,t-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{i,t-1}) + it$$

Hasil pengujian persamaan regresi berganda tersebut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Estimasi *Non-discretionary accruals* Periode Sebelum Penerapan PSAK Konvergensi IFRS

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	0.101	0.082	
1/TA _{i,t-1}	-6.677E11	6.132E11	-0.395
(ΔREV _{it} - ΔREC _{it})/TA _{i,t-1}	-0.072	0.209	-0.123
PPE _{it} /TA _{i,t-1}	-0.091	0.075	-0.452

a. Dependent Variable: TACC_{it}/TA_{i,t-1}
Sumber: SPSS Output

Koefisien yang diperoleh dari hasil regresi pada Tabel 2 digunakan untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accruals* yang akan digunakan untuk menghitung *discretionary accruals*. Oleh karena itu, *Jones Modified Model* sebelum perusahaan menerapkan PSAK konvergensi IFRS dapat ditulis kembali sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{i,t-1} = -0.395(1/TA_{i,t-1}) - 0.123((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{i,t-1}) - 0.452(PPE_{it}/TA_{i,t-1}) + it$$

Hasil perhitungan dari persamaan tersebut diperoleh nilai *non-discretionary accruals*, kemudian *total accruals* dikurangi dengan *non-discretionary accruals* untuk memperoleh nilai *discretionary accruals* sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

b. Perhitungan *Discretionary Accruals* Periode Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS

Seperti yang dilakukan pada tahap sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS, terlebih dahulu dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi dari *non-discretionary accruals* dengan persamaan sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{i,t-1} = (1/TA_{i,t-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{i,t-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{i,t-1}) + it$$

Hasil pengujian regresi berganda tersebut disajikan pada Tabel 3.

Koefisien yang diperoleh dari hasil regresi pada Tabel

3 digunakan untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accruals* yang akan digunakan untuk menghitung nilai *discretionary accruals*. Oleh karena itu, *Modified Jones Model* dapat ditulis kembali sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{i,t-1} = -0.537(1/TA_{i,t-1}) + 0.131((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{i,t-1}) - 0.335(PPE_{it}/TA_{i,t-1}) + it$$

Hasil perhitungan dari persamaan tersebut diperoleh nilai *non-discretionary accruals*, kemudian *total accruals* dikurangi dengan *non-discretionary accruals* untuk memperoleh nilai *discretionary accruals* sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS.

Tabel 3 Estimasi *Non-discretionary accruals* Periode Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	0.127	0.097	
1/TA _{i,t-1}	-1.137E12	9.870E11	-0.537
(ΔREV _{it} - ΔREC _{it})/TA _{i,t-1}	0.051	0.179	0.131
PPE _{it} /TA _{i,t-1}	-0.068	0.079	-0.335

a. Dependent Variable: TACC_{it}/TA_{i,t-1}
Sumber: SPSS Output

c. Uji Beda Rata-Rata Berpasangan

Setelah melakukan perhitungan *total accruals*, kemudian dilakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai *non-discretionary accruals*, selanjutnya menghitung selisih *total accruals* dengan nilai *non-discretionary accruals*, maka diperoleh nilai *discretionary accruals* yang akan digunakan sebagai ukuran manajemen laba. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

Hipotesis tersebut diuji dengan membandingkan tingkat *discretionary accruals* sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS. Untuk itu peneliti membagi populasi sasaran menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS. Pengujian hipotesis tidak memerlukan alat uji-t (uji signifikansi) karena penelitian ini menggunakan metode sensus dimana semua elemen populasi sasaran diteliti. Kesimpulan langsung diambil dari nilai rata-rata populasi sasaran (μ).

Nilai *discretionary accruals* sebelum dan sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS ditampilkan pada berikut ini :

Tabel 4 Nilai Discretionary Accruals Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK konvergensi IFRS

No	Kode Emiten	Discretionary Accruals	
		Sebelum Penerapan PSAK Konvergensi IFRS (2010)	Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS (2011)
1	AALI	0.145	0.088
2	ADRO	0.225	0.184
3	ANTM	0.250	0.197
4	BYAN	0.267	0.180
5	GGRM	0.290	0.309
6	INCO	0.517	0.460
7	ITMG	0.220	0.100
8	LPKR	0.201	0.091
9	PTBA	0.055	0.001
10	SMGR	0.505	0.351
Rata-Rata (μ)		0.267 (μ_1)	0.196 (μ_2)

Sumber: Data diolah (2013)

Penelitian ini melakukan uji beda rata-rata berpasangan untuk menguji hipotesis secara empiris. Variabel yang diuji adalah *discretionary accruals* tahun sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS (tahun 2010) dan tahun sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS (tahun 2011).

Rata-rata *discretionary accruals* pada periode sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS memiliki nilai sebesar 0,26750 (26,75% dari total aset) yang relatif lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accruals* periode sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS yang memiliki nilai sebesar 0,19610 (19,6% dari total aset).

Hipotesis alternatif (H_a) yang diajukan bahwa manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS dapat diterima. Ini artinya menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS tidak lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

Hasil pengujian tersebut memberi bukti empiris bahwa penerapan PSAK konvergensi IFRS relatif efektif bagi perusahaan yang termasuk *50 top leadings in market capitalization* yang terdaftar di BEI tahun 2011 untuk mengurangi tingkat manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian ini perusahaan cenderung menerapkan metode dan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK konvergensi IFRS, sehingga laporan keuangan, khususnya informasi laba menjadi lebih berkualitas dibandingkan periode sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS. Hal ini mungkin

dikarenakan penerapan PSAK konvergensi IFRS masih tergolong baru bagi dunia usaha di Indonesia, sehingga keinginan perusahaan untuk mencoba menerapkan PSAK konvergensi IFRS secara baik dan benar lebih tinggi. Dengan demikian perusahaan dapat merasakan dampak yang signifikan dari perubahan standar akuntansi, yakni perubahan dari PSAK ke PSAK konvergensi IFRS. Selain itu, mungkin hal tersebut terjadi karena para manajer perusahaan di Indonesia telah menyadari pentingnya menerapkan PSAK konvergensi IFRS secara efektif dan efisien demi keberlangsungan perusahaan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Asbaugh dan Pincus (2001) yang menyatakan bahwa kualitas laba setelah penerapan IAS oleh perusahaan non-US lebih tinggi dibandingkan sebelum penerapan IAS, sehingga keakuratan prediksi analis terhadap laba perusahaan semakin meningkat.

Penelitian ini hasilnya juga konsisten dengan penelitian (Barth, M. E., W. R. Landsman, 2008) yang menunjukkan bahwa setelah diperkenalkannya IAS, tingkat manajemen laba menjadi lebih rendah, relevansi nilai menjadi lebih tinggi, dan pengakuan kerugian menjadi semakin tepat waktu, dibandingkan dengan masa sebelum transisi di mana akuntansi masih berdasarkan *local GAAP*. Hal yang sama juga telah dibuktikan oleh (C. Leuz & Verrecchia, 2000); (Christian Leuz, 2003); dan Christensen, Lee, dan Walker (2008).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian (Rudra & A, 2012) yang menunjukkan bahwa perusahaan publik di India yang mengadopsi IFRS lebih suka meratakan laba dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IFRS.

Hal yang sama juga telah dibuktikan oleh (Kieso, T., 2008) yang meneliti dampak keharusan mengadopsi IFRS terhadap manajemen laba pada 1.146 perusahaan di Australia, Prancis, dan UK mulai tahun 2005 hingga 2006. Penelitian tersebut menemukan bukti bahwa manajemen laba di negara-negara tersebut tidak mengalami penurunan setelah adanya keharusan mengadopsi IFRS, dan bahkan meningkat untuk Prancis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen laba sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS lebih rendah dibandingkan dengan manajemen laba sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS pada perusahaan *top leadings in market capitalization* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Artinya, hasil penelitian ini menerima hipotesis yang diajukan.

Dengan demikian, kualitas laba perusahaan *top leadings in market capitalization* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode sesudah penerapan PSAK konvergensi IFRS meningkat dibandingkan periode sebelum penerapan PSAK konvergensi IFRS.

REFERENSI

- Avianti, I. (2006). Mengungkapkan Praktik Earning Management di Perusahaan. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Ekonomi*, 7(3), 828–841.
- Barth, M. E., W. R. Landsman, & M. H. L. (2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*, 46, 467–498.
- Chariri, Anis, & S. K. S. H. (2010). Menguji Kualitas Standar Akuntansi Hasil Adopsi IFRS: Studi Empiris pada PSAK No. 55. *Symposium Nasional Akuntansi Ke 13. Universitas Jendral Soedirman*.
- Copeland, R. M. (1968). Income Smoothing. *Journal of Accounting Research*, 6, 101–116.
- Daske, H., & G. G. (2006). International Financial Reporting Standards and Experts' Perceptions of Disclosure Quality. *Abacus*, 42, : 461–498.
- Dechow P., Sloan R., & S. A. (1995). Detecting Earnings management. *The Accounting Review*, 70, 193–225.
- Fischer, M., & K. R. (1995). Attitudes of Students and Accounting Practitioners Concerning the Ethical Acceptability of Earnings management. *Journal of Business Ethics*, 14, 433–444.
- Gontcharov, I., & J. Z. (2007). Do Accounting Standards Influence the Level of Earnings management? Evidence from Germany. *Die Unternehmung. Swiss Journal of Business Research and Practice*, 61, 371–388.
- Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7, 85–107.
- Jeanjean, T., & H. S. (2008). Do Accounting Standards Matter? An Exploratory Analysis of Earnings management Before and After IFRS Adoption. *Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 27: 480–494*, 27, 480–494.
- Kieso, D. E., J. J. Weygandt, & T. D. W. (2008). *Intermediate Accounting* (10th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Lantto, A. M. (2007). Does IFRS Improve the Usefulness of Accounting Information in Code-Law Country. In *IFRS. Law Country*.
- Lastansi. (2008). *Element Research Design*. In *Metode Penelitian*. Jakarta.
- Lestari. (2010). Fenomena Earnings management Sebagai Sebuah Kecurangan. *Akuntansi*, 1, 1–15.
- Leuz, C. (2003). IAS Versus U.S. GAAP: Information Asymmetry–Based Evidence from Germany's New Market. *Journal of Accounting Research*, 41, 445–472.
- Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2000). The Economic Consequences of Increased Disclosure. *Journal of Accounting Research*, 38, 91–124.
- Levitt, C. A. (1998). The Numbers Game. *The CPA Jozitnal*, 68, 14–19.
- Nugroho, G. A. (2011). *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Leverage Terhadap Earning Management pada Perusahaan yang Melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia*. Diponegoro.
- Petreski, M. (2006). The Impact of International Accounting Standards on Firms. In *International Accounting Standards*.
- Rohaeni, D., & T. A. (2012). Tanpa Tahun. Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Income Smoothing dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Symposium Nasional Akuntansi XV*. Retrieved from <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/100-SIPE-22.pdf>
- Rudra, T., & A. C. (2012). Does IFRS Influencing Earnings management? Evidence from India. *Journal of Management Research*, 4, 1–13.
- Rusmanto, D. (2011). Kapitalisasi Pasar (Market Capitalization). Retrieved March 19, 2013, from INFOACEH website: <http://infoaceh.com>
- Sarlina Sari. (2019). Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS. *Moneter*, 6(1), 13–22.
- Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings management. *Accounting Horizons*, 3, 89–102.
- Scott, W. R. (2006). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). Toronto: Pearson Education Canada, Inc.
- Situmorang, M. A. S. (2011). *Transisi Menuju IFRS dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listing di BEI)*. Diponegoro.
- Widyaningdyah, A. U. (2001). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings management pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 89–101.

PROFIL PENULIS

Sarlina Sari yang lahir di Beungga pada tanggal 3 Agustus 1990 merupakan seorang tenaga pengajar di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta bidang sains akuntansi sekaligus direktur Penerbit CV. Bunda Ratu. Ia ahli di bidang akuntansi dan keuangan dan juga telah menulis beberapa buku referensi di bidang akuntansi dan perpajakan.

Sarlina Sari merupakan alumni Univeristas Syiah

Kuala dan Universitas Indonesia. Ia pernah memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa terbaik pada Program Studi Ekonomi Akuntansi sekaligus pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Selain itu, ia juga memperoleh predikat *cumlaude* pada jenjang sarjana dan magister. Ia berasal dari Aceh dan berdomisili di Jakarta.

Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang)

Badar Murifal

Universitas Bina Sarana Informatika
badar.bml@bsi.ac.id

Murifal, B. (2019). Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang). *Moneter*, 6(1), 33–38.

Abstract-Indonesia cut the final income tax rate for small and medium-sized enterprises by half, to 0.5 percent of their annual sales, in a move to help businesses manage their cash flow and expansion. While the current arrangement only demands simple accounting, small and medium-sized enterprises say it also means they have to pay income tax when they are at loss, which disrupts their cash flow (Jakarta Globes, 2018). The Government has shown its strong support for the development of small and medium enterprises (SMEs). After improving the tax facility for venture capital companies who invest in SMEs, the Government has now issued Government Regulation (GR) No.23/2018 (GR-23) which stipulates a new "final tax" rate for SMEs. GR-23 will enter into force on 1 July 2018 and revokes GR No.46/2013 regarding final tax on taxpayers within a certain turnover. The final tax regime, introduced in GR-46, is applicable for taxpayers with annual gross turnover of not more than IDR 4.8 billion (approximately USD 340 thousand), excluding the following income: a. fees from the delivery of certain freelance services by individuals; b. overseas income which has been taxed in the source country; c. income also subject to final tax; and d. non - taxable income. The threshold of IDR 4.8 billion per annum is based on the previous years' activity, including gross turnover sourced from branches. If during a fiscal year the gross turnover exceeds IDR 4.8 billion, the taxpayer remains subject to final tax for the current year but must adopt the "normal tax" rate (Article 17 or Article 31E Income Tax) for the following year. While the provisions on gross turnover generally remain unchanged, GR – 23 now reduces the final tax rate to 0.5% from the previous 1%.

Key words : Final Income Tax , Micro, Small and Medium Enterprises.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak.

Setiap orang pastinya sudah mengenal pajak, apalagi para pengusaha. Sampai-sampai mereka harus berkonsultasi kepada ahli pajak (konsultan pajak) agar mereka dapat membayarkan ketentuan pajak dari bisnisnya. Namun apakah mereka memahami tentang apa itu fungsi sebenarnya dari pajak? Dan sepertinya masyarakat bahkan para pelaku bisnis sekalipun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang apa saja fungsi dari pajak.

Pajak sendiri berupa pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh seseorang dan badan usaha bagi kepentingan Negara dan akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat umum. Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak, akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas umum, melakukan pembangunan jalan dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana untuk pemungutan pajak itu sendiri telah diatur berdasarkan undang-undang.

Sama halnya dengan yang lain, pajak juga memiliki beberapa kriteria yang seharusnya Anda ketahui. Sebagai warga Negara bahkan para pengusaha harus mengerti tentang apa saja setiap masing-masing kriterianya. Jika anda mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) , maka kini Anda sudah berkewajiban membayar pajak. Lantas apa saja Pajak UKM/UMKM, berapa nilai yang harus dibayarkan, dan bagaimana cara membayarnya?

Pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Rochmat Soemitro, 2012)

1. Kriteria pajak

- Kontribusi wajib bagi setiap warganegara
- Bersifat memaksa
- Warganegara tidak mendapat kontra prestasi.
- Berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat pajak bagi suatu negara

Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk :

- a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.

Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

- a. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit
- b. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
- c. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
- d. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
- e. Dana Pemilu
- f. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.

Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

3. Jenis pajak di Indonesia (Diana, A & Setiawati, L : 2014)

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Meterai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014)

4. Pajak Penghasilan (PPh) Final

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penghasilan terbagi menjadi dua; penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Begitu pula cara pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang merupakan objek pajak, juga terbagi menjadi dua. Pertama, dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif pasal 17 (tarif umum), dan pengenaannya dilakukan di SPT Tahunan. Kedua, dikenakan PPh Final. Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh

yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut (Mardiasmo, 2011)

Penghasilan yang dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan bersama, yaitu :

a. Mematuhi Peraturan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

b. Ikut Membangun Indonesia

Salah satu fungsi pajak adalah untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan dibangun membangun dana dari pajak. Selain itu, dana dari pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta memberikan subsidi di bidang pertanian. Jika Anda juga belum tahu, pajak merupakan salah satu anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sangat berpengaruh bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air karena hasil penarikan pajak juga digunakan untuk membiayai Biaya Operasional Sekolah. Sebagai warga negara sekaligus wajib pajak teladan, mari jadikan Indonesia lebih baik lagi melalui pengumpulan pajak. Pajak 1% dari penjualan Anda sangat berarti bagi kemajuan bangsa.

c. Menghindari Risiko Bisnis

Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa laporan pajak usaha atau bisnis Anda. Jika Anda lalai dalam melakukan setor dan lapor pajak, DJP bakal menutup bisnis yang telah Anda bangun

selama ini. Hindari risiko bisnis terjadinya permasalahan tersebut dari sekarang.

5. Pengertian UMKM.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.

Pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."(K. P. RI, 1998)

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beromzet maksimal Rp4,8 miliar setahun bisa bernapas lega atas penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5%. Dengan kebijakan ini, diharapkan makin banyak UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan berkontribusi pada perekonomian nasional.(Universitas Brawijaya, 2018). Tarif baru pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP tersebut menggantikan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013(K. K. RI, 2018). Sementara aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak UMKM, dijanjikan akan segera terbit. Sejak 1 Juli 2018, Pemerintah memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (*cash flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok.

Namanya diskon, tidak semua UMKM bisa menikmatinya. Tarif pajak setengah persen hanya berlaku untuk:

- UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya
- Berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial).

Penggunaan tarif istimewa ini pun ada batas waktunya, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain:

- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun.

- Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun.
- Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

Saat batas waktu tersebut ditutup, UMKM yang dijalankan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak PT tidak bisa lagi menikmati tarif rendah ini. Mereka harus menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dengan rapi, serta membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang PPh.

Tidak ada alasan lagi tidak bisa membuat pembukuan, karena periode waktu yang diberikan sudah cukup bagi UMKM untuk belajar menyusun laporan keuangan. Apalagi di era digital sekarang ini, bikin pembukuan sudah lebih mudah. Tinggal berselancar di dunia maya, keluarlah cara maupun aplikasi pembukuan sederhana yang bisa ditiru. Bisa juga belajar dari bimbingan *Account Representative* Ditjen Pajak.

7. Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018.(Kawan Pajak.com, 2018)

Tabel 1.

Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Keterangan	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Tarif	1% x Peredaran Bruto (Bersifat Final)	0,5% x Peredaran bruto (Bersifat Final)
Jangka Waktu Penggunaan	Tidak Ada	Orang Pribadi → 7 tahun Koperasi, CV, Firma → 4 tahun Perseroan Terbatas → 3 tahun
Dasar penetapan tarif untuk Suami Istri yg memilih NPWP terpisah	Masing – masing total peredaran bruto	Gabungan peredaran bruto suami dan istri
Usaha Rugi dan Omzet tahun lalu dibawah 4,8 M	Wajib menggunakan tarif 1% (Pencatatan)	Tidak wajib menggunakan tarif 0,5%, dengan catatan memberitahukan ke KPP setempat menggunakan tarif umum dan Pembukuan

Sumber:

<https://www.kawanpajak.com/2018/08/perbandingan-pp-46-vs-pp-23.html>

Tabel 2.

Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Keterangan	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Masa berlaku	1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2018	1 Juli 2018 sampai ada peraturan pengganti
Bagi Wajib Pajak baru terdaftar	Dapat menggunakan 1% jika perusahaan telah 12 bulan komersial	Sudah bisa langsung menggunakan tarif 0,5% tanpa harus menunggu 12 bulan komersial
	SKB Wajib legalisir	SKB tidak wajib legalisir sejak 1 Juli 2018
Tarif untuk CV atau Firma	1% tanpa memandang siapa pendirinya	0,5% dengan pengecualian bagi CV/Firma yang pendirinya adalah WP yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Sumber:

<https://www.kawanpajak.com/2018/08/perbandingan-pp-46-vs-pp-23.html>

8. Dampak penurunan PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5%

- Investasi Pemerintah Jangka Menengah-Panjang dan menambah basis perpajakan.
- Mendorong UMKM untuk naik kelas ke industri yang lebih besar.
- Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- Grace period menutup celah penghindaraan pajak-skenario pelaku UMKM “abadi” dengan memecah usaha.
- Mendorong UMKM untuk lebih berorientasi ekspor.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM.
- Memberikan insentif tambahan bagi UMKM dan kepastian berusaha.
- Mendorong lahirnya UMKM baru dan pengembangan UMKM.

9. Keuntungan PPh Final UMKM

Aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan itu, di antaranya:

- UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM *offline* maupun *online* tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif. Sempelkan
- Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya
- Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi
- Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak
- UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank.

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

- Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab,

perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

- Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

Menghitung pajak UMKM sangat mudah, tinggal menjumlahkan omzet dalam sebulan, lalu dikalikan tarif 0,5%. Wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Karena baru efektif berlaku 1 Juli 2018, maka Wajib Pajak dengan omzet sampai Juni yang disetorkan Juli masih dihitung tarif 1%. Sementara untuk omzet Juli yang pajaknya disetorkan pada Agustus sudah menggunakan tarif 0,5% dikali omzet Juli. Begitupula dengan Wajib Pajak UMKM yang baru mendaftar Juli 2018, dan setelahnya bisa langsung kena tarif 0,5% untuk omzetnya. Penyesuaian tarif secara otomatisasi tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada paradigma *interpretatif* dan *konstruktif*, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, bukan eksperimen, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang aspek pajak penghasilan pada UMKM di Indonesia.

1. Data dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen terkait misalnya artikel, buku, *online website provider*.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan melalui tiga prosedur, yaitu:

- Reduksi data

Merupakan proses penilaian, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Teknik analisis ini diperlukan peneliti

agar mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkannya dan membuang yang tidak

b. Penyajian data.

Informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat di mengerti. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti.

c. Menarik kesimpulan.

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Teknik analisis data dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil pelaku usaha dibisnis UMKM.

Alasan pemilihan teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu karena model tersebut akan memudahkan peneliti. Data-data yang telah diperoleh, diseleksi terlebih dahulu, setelah itu disajikan dalam laporan penelitian dengan memberikan analisa-analisa sebelum dilakukan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis , pada laporan keuangan bulanan tahun pajak 2018 didapat data-data sebagai berikut :

Tabel 3. Data Laporan Laba Rugi, Penjualan dan Laba Setelah Pajak bulanan Tahun 2018

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag
Tarif pajak	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0,5%	0,5%
Penjualan	78.573	57.579	75.636	169.049	113.026	58.500	138.064	136.242
HPP	47.868	49.312	59.490	81.743	85.519	65.523	85.615	78.291
Laba Kotor	30.075	7.867	16.145	87.306	27.506	-7.024	52.449	57.951
Biaya operasi	19.661	21.656	18.463	25.087	28.240	24.704	21.563	20.680
Laba Operasi	11.044	(13.789)	(2.318)	62.218	(734)	(31.728)	30.885	37.271
Pendapatan & biaya lain-lain	0	500	(719)	(1.366)	(2.437)	0	(2.437)	0
Laba sebelum pajak	11.044	(14.289)	(1.599)	63.584	1.703	(31.728)	33.323	37.271
Pajak penghasilan final	785	576	756	1.690	1.130	585	690	681
Laba setelah Pajak	10.259	(14.865)	(2.355)	61.894	573	(32.284)	32.633	36.590

Sumber : Hasil penelitian (2018)

Tabel 4. Data Pajak Penghasilan FINAL bulanan 2018

No	Bulan	PP 46, 2013 (1%)	PP 23, 2018 (0,5%)	Total
1	Jan 2018	785	0	785
2	Feb 2018	576	0	576
3	Mar 2018	756	0	756

4	Apr 2018	1.690	0	1.690
5	Mei 2018	1.130	0	1.130
6	Juni 2018	585	0	585
7	Juli 2018	0	690	690
8	Ag 2018	0	681	681
TOTAL :		5.522	1.371	6.893

Sumber : Hasil penelitian (2018)

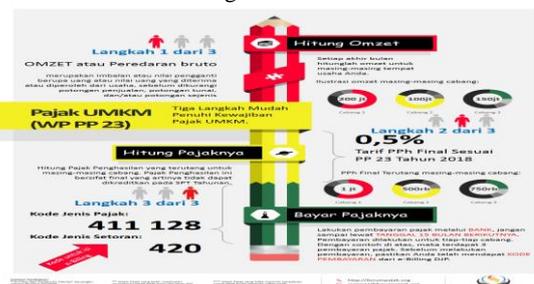
1. Jurnal akuntansi .

Db. PPh Final (rek biaya)	6.893
Kr. Hutang pajak	6.893

2. Cara membayar pajak UMKM

- Sebelumnya bisa buat kode billing di DJP Online (SSE1, SSE2, SSE3), layanan billing-djp/di KPP/KP2KP, Kring Pajak 1500200, petugas *teller/customer service* bank dan kantor pos, *internet banking*, ASP, SMS ID Billing *141*500#, serta via ATM
- Pembayaran pajak penghasilan bisa datang langsung ke kantor pos atau perbankan yang ditunjuk langsung Menteri Keuangan (Menkeu) , *internet banking* dan *mobile banking*
- Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak
- Buat kode billing sekaligus membayar pajak UMKM di mesin ATM. Sebagai contoh di ATM Bank BCA, masukkan PIN, pilih transaksi lainnya, pilih pembayaran, tekan MPN/pajak, pilih PPh Final Bruto Tertentu. Kemudian masukkan 15 digit nomor NPWP, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun pajak. Contohnya untuk masa Agustus 2018: 8817208906550000818.
- Selanjutnya tekan benar. Lalu masukkan jumlah pajak terutang dan pilih benar. Setelah itu, akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin membayar, lalu tekan Ya, transaksi selesai. Simpan struk sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.(Editorial Forum Pajak Indonesia, 2018)

Tabel 4.. Tehnis Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final



Sumber : <https://forumpajak.org/cara-setor-dan-lapor-pph-final-05/>

KESIMPULAN

- Peraturan Pemerintah pada prinsipnya merupakan Insentif yang semakin menarik bagi usaha bagi UMKM lama dan UMKM usaha baru agar mau ikut serta berkontribusi membayar pajak. Walaupun peraturan ini membatasi jangka waktu, kemudahan perhitungan dan rendahnya tarif pajak

- diharapkan mampu memikat pembayar pajak baru.
2. Fasilitas ini bersifat selektif dan elektif. Selektif dimaksudkan adalah Wajib Pajak tertentu yang memenuhi kualifikasi/persyaratan tertentu yang boleh memakai fasilitas ini. Elektif artinya Wajib Pajak diberikan pilihan untuk memakai ketentuan ini atau tidak bersedia menggunakannya. Contoh: perusahaan yang baru berkembang, termasuk *Startup Company* yang masih dalam tahap pengembangan dan/atau belum memungut fee atau penjualan, maupun usaha lain yang masih merugi.
 3. Aturan Pelaksanaan dari PP 23 Tahun 2018 ini masih ditunggu, karena masih banyak hal-hal teknis yang belum diatur dan juga masih ada beberapa ketentuan yang belum jelas antara lain:
 - a. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Surat Keterangan Wajib Pajak yang Dikenakan PPh Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018
 - b. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 ketika WP akan beralih ke aturan tarif PPh Pasal 17 (baik karena tidak dipenuhinya syarat sebagai UMKM atau karena berlalunya jangka waktu penggunaan fasilitas).
 - c. Pihak yang ditetapkan sebagai Pemotong PPh Final (Apakah hanya bendahara saja seperti contoh dalam Penjelasan PP 23 Tahun 2018 atau WP Badan juga dapat melakukan pemotongan).
 - d. Penegasan dan batasan atas Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki keahlian tertentu yang melakukan pekerjaan Bebas namun mempekerjakan orang lain dalam kegiatan usahanya.
 4. Berdasarkan UU, Wajib Pajak Badan berbentuk PT, CV, dan Firma tetap harus menyelenggarakan pembukuan sejak awal pendirian usaha tanpa pengecualian, bahkan dengan atau tanpa adanya skema pajak ini. Karena itu, otoritas pajak seyogyanya mampu menjelaskan lebih tegas mengenai kewajiban pembukuan dalam skema perhitungan pajak ini.
 5. Bagi Wajib Pajak yang dalam suatu Tahun Pajak mengenakan tarif PPh Pasal 17/Angsuran PPh 25, maka tidak diperkenankan untuk memakai kembali PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 sekalipun pemakaian PPh Final belum melewati batas jangka waktu yang diperbolehkan.
 6. Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tergolong pengusaha UMKM diperkenankan untuk menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung pajak sesuai norma penghitungan penghasilan neto.
 7. Menurut Penulis, pembukuan untuk tujuan perpajakan dapat kita artikan dalam 2 tujuan yaitu:
 - a. Pembukuan untuk Perhitungan Pajak. Maksudnya adalah terkait dengan kewajiban PP 23 Tahun 2018 ini, maka Wajib Pajak

- diharapkan mampu rekapitulasi Peredaran Bruto setiap bulan untuk mengetahui jumlah PPh Final yang harus disetorkan setiap masa pajak.
- b. Pembukuan untuk Pelaporan Pajak. Maksudnya adalah terkait dengan kewajiban melaporkan SPT Tahunan, maka setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas) yang menjadi alat pertanggungjawaban bagi jumlah penghasilan terlapor (terutama Laba Ditahan) yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

REFERENSI

- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan, Teori dan Peratueran terkini*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Editorial Forum Pajak Indonesia. (2018). Cara Setor dan Lapor PPh Final. *Jakarta*.
- Jakarta Globes. (2018). Gov't Cuts Tax for Small and Medium Enterprises.
- Kawan Pajak.com. (2018). Perbandingan PP 46 Tahun 2013 VS PP 23 Tahun 2018. *Jakarta*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011* (2011th ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murifal, B. (2019). Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang). *Moneter*, 6(1), 33–38.
- RI, K. K. (2018). *PP 23, TAHUN 2018, TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU*. Jakarta.
- RI, K. P. (1998). Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 tentang: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. In *Jakarta*.
- Rochmat Soemitro. (2012). *Perpajakan, Teori dan Tehnis Pemungutan* (2012th ed.). Graha Ilmu, Bandung.
- Universitas Brawijaya. (2018). Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang PPh Final UMKM,. Malang.

PROFIL PENULIS

Badar Murifal SE.,MM, QWP, CFRM, ZC, AT Pendidikan akhir S2 Magister Manajemen, Ipwija Business School. Sertifikat profesi Qualified Wealth Planner. Di UBSI mengajar sejak 2009 s/d saat ini.

Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT. Citarum Borneo Quantum

Dian Indah Sari¹, Rizky Ulya²

¹Universitas BSI Bekasi
e-mail: dian.dhr@bsi.ac.id

²Universitas BSI Cikarang
e-mail: Iya.cbq@gmail.com

Sari, D. I., & Ulya, R. (2019). Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT. Citarum Borneo Quantum. *Moneter*, 6(1), 23–32.

Abstract - *Manually accounting processing has more risks than using a computerized system, because accounting requires a confidential database so all existing transactions are related to the finances of a company or individual entity. For example, in the simplest case, which is journal entry, it often occurs double input with the same number or voucher code for different transactions. This has an impact on the normal balance and financial statements that will be made. In order to collect data to fulfill the preparation of this application program, the authors conducted several ways, namely: Observation Method, This method is done by the author is to directly visit the location of the company and collect accounting transaction evidence and observe the process that has been running, so that the author can apply it to Zahir Accounting. Interview, the author conducted interviews with employees of PT. Citarum Borneo Quantum to obtain information on the history of the company, the process of recording accounting transactions from capital, sales, purchases, and financial statements. Library Study Method, carried out by reading books related to accounting transactions and related to the material of Programming Using Zahir Accounting Version 5.1. Based on the results of the discussion it can be concluded as follows: Application of Zahir Accounting Version 5.1 in preparing financial statements will produce computerized financial reports. The company was greatly helped by the application of Zahir Accounting Version 5.1 because it recorded financial transactions and financial reporting quickly, accurately and efficiently.*

Keywords: *Zahir, Accounting, Financial Report*

PENDAHULUAN

Teknologi membawa pengaruh yang cukup besar pada dunia pendidikan dan bisnis. Salah satu bentuk teknologi itu adalah komputer. Karena sistem komputer sekarang mulai banyak diterapkan didunia pendidikan dan diaplikasi bisnis, baik itu bisnis skala besar maupun bisnis skala kecil. Hal ini disebabkan komputer merupakan alat yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan yang dapat membuat data lebih cepat, akurat, tepat waktu, serta penghematan ruang penyimpanan sehingga mempermudah penyimpanan dan pengambilan data kembali.

Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu perusahaan, penggunaan komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting karena proses manual dari perusahaan dapat digantikan oleh komputer. Tetapi dalam kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya penggunaan sistem di dalam suatu perusahaan membutuhkan budget yang tidak sedikit.

Pengolahan akuntansi secara manual memiliki lebih banyak resiko dibandingkan dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi, karena akuntansi memerlukan *database* yang *confidential* maka seluruh transaksi yang ada berkaitan dengan keuangan sebuah perusahaan atau badan perseorangan. Misalkan dalam hal yang paling sederhana yaitu penginputan jurnal, seringkali terjadi *double* input dengan nomor atau kode voucher yang sama untuk transaksi yang berbeda. Hal ini berdampak pada saldo normal dan laporan keuangan yang akan dibuat. Maka didalam penelitian ini, penulis mencoba menerapkan sebuah program aplikasi pencatatan akuntansi pada PT. CITARUM BORNEO QUANTUM dengan mengambil judul “Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pt. Citarum Borneo Quantum”.

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Lubis (2017:1) menyimpulkan, bahwa “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, atau pengikhtisaran dan pelaporan yang disajikan

dalam laporan keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. tulisan merupakan inovasi terbaru.(Han & Kamber, 2006)

Menurut Christiyanto & Wahyono (2016) menyimpulkan, bahwa “Akuntansi merupakan kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam satu unit usaha ekonomi”.

Menurut Bimantara (2017) menyimpulkan, bahwa “Pengertian akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi”.

2. Konsep Dasar Akuntansi

Menurut Hery (2015:10) menyimpulkan, bahwa “Dalam proses kegiatannya akuntansi berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu”. Dalam asumsi ini timbul konsep dalam akuntansi. Konsep-konsep akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Konsep Entitas Usaha (*Accounting Entity Concept*)
- b. Konsep Biaya / Harga Pertukaran (*Historical Cost Concept*)
- c. Konsep Kontinuitas Usaha (*Going Concern Concept*)
- d. Konsep Penandingan (*Matching Cost And Revenues*)
- e. Konsep Pengukuran Uang (*Money Measuring Unit*)
- f. Konsep Periode Akuntansi (*Periodicity*)
 - 1) *Cash Basis* (Dasar Kas)
 - 2) *Accrual Basis* (Dasar Akrua)

3. Siklus Akuntansi

Menurut Lubis (2017:11) menyimpulkan, bahwa “Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses”. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatam, sehingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan, yang disebut siklus akuntansi seperti gambar berikut:



Sumber: Lubis (2017:12)

Gambar 1 Siklus Akuntansi

3. Laporan Keuangan

Menurut Lubis (2017:13) menyimpulkan, bahwa “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

Laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Laba Rugi (L/R)
Laporan L/R menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.
- c. Neraca
Neraca menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki serta jumlah dan modal perusahaan selama satu periode akuntansi.
- d. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan .
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menginformasikan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari keuangan perusahaan.

4. Teori Zahir Accounting

Menurut Himayati (2013:2) menyimpulkan bahwa “Zahir *accounting* adalah sebuah program akuntansi yang didesain khusus untuk mengelola keuangan perusahaan secara mudah, fleksibel, yang berfasilitas lengkap dan dapat digunakan untuk berbagai macam perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang”.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka pengumpulan data untuk memenuhi penyusunan program aplikasi ini, penulis melakukan beberapa cara yaitu:

1. Metode Observasi (*Observation Method*)
Metode ini yang dilakukan penulis adalah dengan langsung mengunjungi lokasi dimana PT. Citarum Borneo Quantum berlokasi di Ruko Easton Commercial Centre, Jl. Gunung Panderman Blok A No 7 – Lippo Cikarang – Bekasi – Jawa Barat, kemudian penulis mengumpulkan bukti transaksi akuntansi dan mengamati proses yang sudah berjalan, agar penulis bisa menerapkannya ke dalam Zahir Accounting.
2. Wawancara (*Interview Method*)
Penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. Citarum Borneo Quantum untuk mendapatkan informasi sejarah perusahaan, proses pencatatan transaksi akuntansi dari modal, penjualan, pembelian, sampai laporan keuangan tersaji.
3. Metode Studi Pustaka (*library Method*)
Selain dengan observasi analisis sistem juga melakukan pencarian data dengan metode studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan dan mengkaji data yang ada. Metode studi pustaka yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan transaksi akuntansi dan berhubungan dengan materi Pemogramman Menggunakan Zahir Accounting Versi 5.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Tinjauan Perusahaan

PT. Citarum Borneo Quantum adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, khususnya tambang batu bara. Adapun bisnis seperti perusahaan ini mempunyai saingan-saingan yang bergerak dalam bidang yang sama. PT. Citarum Borneo Quantum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan nomor izin usaha 503.09/1-794/BPMPPT/PK-01/V/2016. Dalam menjalankan usahanya perusahaan PT. Citarum Borneo Quantum belum menggunakan program komputerisasi.

Tabel 1
PT. Citarum Borneo Quantum
Daftar Dan Saldo Awal Akun
01-Jan-17

NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
Kas Kecil	6.276.969	
Bank Mandiri Induk	295.144.203	

Piutang Usaha	3.577.761.940	
Persediaan	272.705.208	
Uang Muka	819.189.425	
Mesin	8.887.560.000	
Akum Penyusutan Mesin	5.770.414.000	
Utang Gaji Karyawan	488.839.200	
Utang Usaha	275.340.737	
PPN Keluaran	1.221.808.464	
Utang Lancar Lainnya	38.856.375	
Modal Saham	3.768.017.403	
Laba Ditahan	2.295.361.566	
TOTAL	13.858.637.745	13.858.637.745

Sumber: PT. Citarum Borneo Quantum (2017)

2. Data Transaksi

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017 – Maret 2017 pada PT. Citarum Borneo Quantum :

Tanggal 02 Januari 2017, PT. CBQ membeli Hose Assy secara tunai sebesar Rp. 450.000,-

Tanggal 03 Januari 2017, PT. CBQ membeli tiket untuk perjalanan dinas Bp. Herry Fathamsyah sebesar Rp. 743.439,-

Tanggal 03 Januari 2017, PT. CBQ membuat invoice kepada PT. BUMA No 001/CBQ-INV/I/2017 Rp. 394.093.461,- yang akan dibayar pada tanggal 28 Februari 2017.

Tanggal 05 Januari 2017, PT. CBQ membayar air sebesar Rp. 466.122 dan membayar listrik sebesar Rp. 847.842,-

Tanggal 05 Januari 2017, terjadi pemindah bukuan dari rekening mandiri induk ke kas kecil sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 06 Januari 2017, PT. CBQ membayar telpon dan speedy sebesar Rp. 1.080.365

Tanggal 07 Januari 2017, PT. CBQ membeli barang Tricone Bit 7 7/8 jumlah 1 unit harga Rp 19.500.000, ppn 10% kepada PT. Pusaka Tandil secara kredit syarat pembayaran 30 hari.

Tanggal 18 Januari 2017, PT. CBQ membayar invoice no I084191 PT. Sandvik Mining & Construction Indonesia sebesar Rp. 20.867.000,-

Tanggal 20 Januari 2017, PT. Bukit Makmur Mandiri membayar invoice no 017/CBQ-INV/XII/2016 sebesar Rp. 580.761.940 kepada PT. CBQ.

Tanggal 23 Januari 2017, PT. CBQ membeli tiket cuti karyawan sebesar Rp. 7.564.447,-

Tanggal 27 Januari 2017, PT. CBQ membayar gaji karyawan HO sebesar Rp. 39.500.000 dan gaji karyawan lapangan Rp. 42.890.000,-

Tanggal 01 Februari 2017, PT. CBQ membuat invoice kepada PT. BUMA No 006/CBQ-INV/II/2017 Rp. 707.218.344,- yang akan dibayar tanggal 20 Maret 2017.

Tanggal 02 Februari 2017, PT. CBQ membeli filter ke CV. Aneka Filter sebesar Rp. 5.200.000,- secara tunai.

Tanggal 04 Februari 2017, PT. CBQ membeli oli CX Hydraulic Oil AW jumlah 2 unit harga per unit Rp 5.472.727 Ppn 10 % kepada PT. Petroleum Lima secara kredit dengan syarat pembayaran 30 hari.

Tanggal 05 Februari 2017, terjadi pemindah bukuan dari rek mandiri induk ke kas kecil sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 07 Februari 2017, PT. CBQ membayar abodemen parkir sebesar Rp. 160.000,-

Tanggal 10 Februari 2017, PT. CBQ membayar Telpon & speedy sebesar Rp. 924.578,- dan membayar listrik sebesar Rp. 867.826,-

Tanggal 14 Februari 2017, PT. CBQ membayar tagihan invoice no AS560044100 kepada PT. Trakindo Utama sebesar Rp. 2.170.850,-

Tanggal 14 Februari 2017, PT. CBQ membayar tagihan invoice no I084417 kepada PT. Sandvik Mining & Construction indonesia sebesar Rp. 35.538.800,-

Tanggal 14 Februari 2017, PT. CBQ membayar air sebesar Rp. 449.522,-

Tanggal 17 Februari 2017, Bp. Herry Fathamsyah meminjam uang perusahaan (pinjaman sementara) sebesar Rp. 10.000.000,-

Tanggal 17 Februari 2017, PT. CBQ membeli barang 7 7/8 Inc F35 Focus TCI jumlah 1 unit harga Rp 27.500.000, ppn 10% kepada PT. Atlas Copco Nusantara secara kredit dengan syarat pembayaran 30 hari.

Tanggal 27 Februari 2017, PT. CBQ membayar gaji karyawan HO sebesar Rp. 43.700.000,- dan gaji karyawan lapangan sebesar Rp. 41.500.000,-

Tanggal 28 Februari 2017, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama membayar invoice no 001/CBQ-INV/I/2017 kepada PT. CBQ sebesar Rp. 386.928.125,-

Tanggal 02 Maret 2017, PT. CBQ membuat invoice kepada PT. BUMA No 010/CBQ-INV/III/2017 Rp. 634.808.176,- yang akan dibayar pada tanggal 10 April 2017.

Tanggal 05 Maret 2017, PT. CBQ membayar invoice no 049/PTR-BPN/02/2017 kepada PT. Petroleum Lima sebesar Rp. 12.039.999,-

Tanggal 05 Maret 2017, terjadi pemindah bukuan dari rek mandiri induk ke kas kecil sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 06 Maret 2017, PT. CBQ membayar air sebesar Rp. 420.642,-

Tanggal 07 Maret 2017, PT. CBQ membeli barang Velve Selenoid jumlah 1 unit harga Rp 3.100.000, ppn 10 % kepada CV. Putri Cahata Lestari secara kredit dengan syarat pembayaran 30 hari.

Tanggal 13 Maret 2017, PT. CBQ membayar invoice

no FN-1312/BP/EK/I/2017 kepada PT. Pusaka Tandir sebesar Rp. 21.450.000,-

Tanggal 19 Maret 2017, PT. CBQ membayar invoice no 673794 kepada PT. Atlas Copco Nusantara sebesar Rp. 30.250.000,-

Tanggal 20 Maret 2017, Bp. Herry Fathamsyah mengembalikan pinjaman sementara kepada PT. Citarum Borneo Quantum tahap 1 sebesar Rp. 5.000.000,-

Tanggal 20 Maret 2017, PT. CBQ membayar listrik Rp. 551.086,- dan telpon & speedy Rp. 1.076.975,-

Tanggal 20 Maret 2017, PT. Bukit Makmur Mandiri Utama membayar invoice no 006/CBQ-INV/II/2017 kepada PT. CBQ sebesar Rp. 694.359.829,-

Tanggal 22 Maret 2017, PT. CBQ membayar catering periode Januari 2017 sebesar Rp. 20.780.000,-

Tanggal 24 Maret 2017, PT. CBQ membayar gaji karyawan HO sebesar Rp. 43.700.000,- dan gaji karyawan lapangan sebesar Rp. 41.960.000,-

Data Penyesuaian Per-31 Maret 2017

Beban penyusutan mesin selama 3 bulan Rp. 288.520.701

3. Pencatatan Dengan Tool Aplikasi

A. Setup Awal

Membuat Database Perusahaan

Berikut ini tahap-tahap untuk membuat database perusahaan baru pada aplikasi Zahir Accounting 5.1, yaitu:

Buka Program Zahir 5.1, klik menu - *All Apps - Zahir System* Standart Edisi Pendidikan System Versi. 5.1 Klik Membuat data baru pada tampilan menu utama Zahir



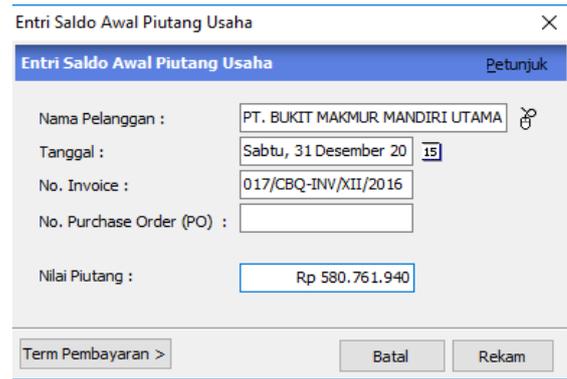
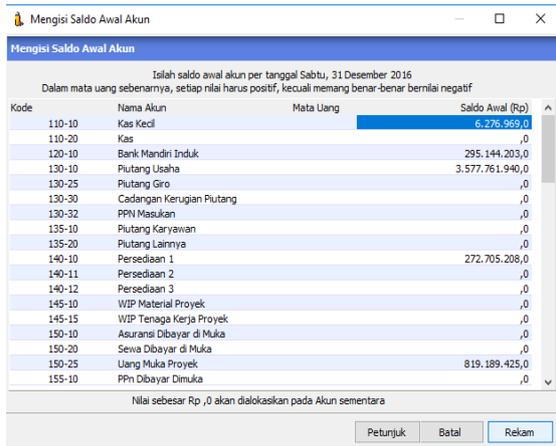
Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 2 Menu Utama Zahir

B. Input Saldo Awal

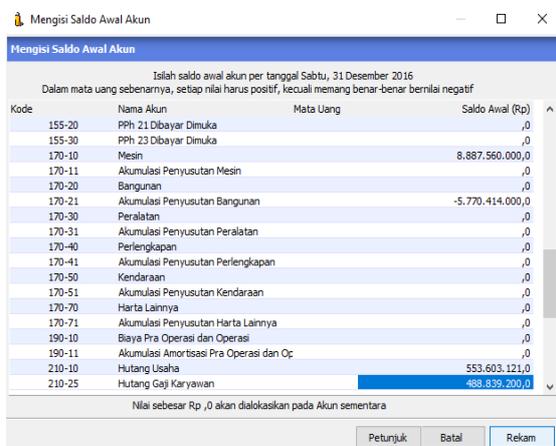
Input Saldo Awal Account

- Klik *Setting* - Saldo Awal - pilih Saldo Awal Akun
- Isikan semua saldo awal yang ada seperti gambar berikut, kemudian Rekam.

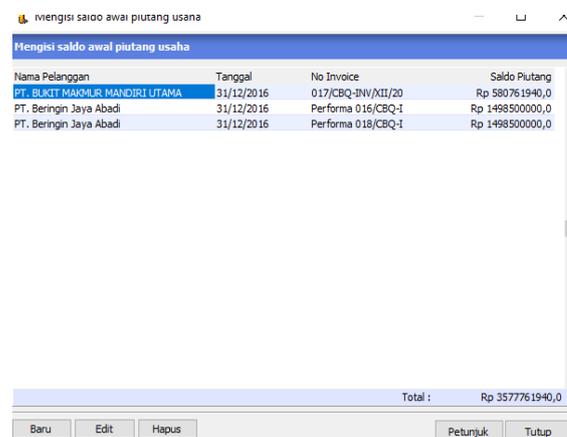


Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 4 Entri Saldo Awal Piutang

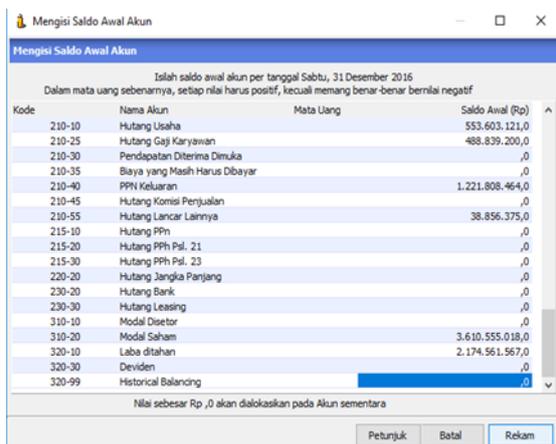


Berikut saldo awal piutang PT. Citarum Borneo Quantum



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 5 Daftar Saldo Awal Piutang



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

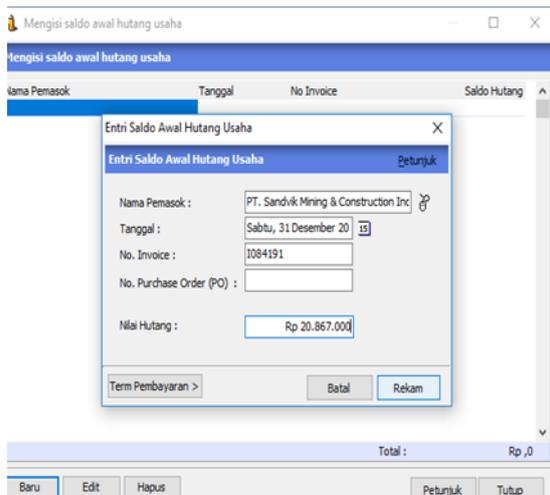
Gambar 3 Entri Saldo Awal Akun

Input Saldo Awal Piutang
Klik *Setting* - Saldo Awal - pilih Saldo Awal Piutang Usaha

Isi semua saldo awal yang ada seperti gambar berikut, kemudian Rekam.

Input Saldo Awal Hutang
Klik *Setting* - Saldo Awal - pilih Saldo Awal Hutang Usaha

Isi semua saldo awal yang ada seperti gambar berikut, kemudian Rekam.



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 6 Entri Saldo Awal Utang

Berikut saldo awal utang PT. Citarum Borneo Quantum

Nama Pemasok	Tanggal	No Invoice	Saldo Hutang
PT. Tralindo Utama	31/12/2016	AS560044100	Rp 2170850,0
PT. Tridifa Lubrindo	31/12/2016	1046/10/TDL/2016	Rp 6658300,0
PT. Petroleum Lima	31/12/2016	381/PTR-8PN/12/20	Rp 12766000,0
PT. Mexis	31/12/2016	2013MVS-00017	Rp 28560000,0
PT. Atlas Copco Nusantara	31/12/2016	669490	Rp 60500000,0
PT. Tridifa Lubrindo	31/12/2016	1044/10/TDL/2016	Rp 21734900,0
PT. Pusaka Tandl	31/12/2016	FN-803/BP/EK/16	Rp 76450000,0
PT. Sandvik Mining & Construction Indonesia	31/12/2016	1084191	Rp 20867000,0
PT. Sandvik Mining & Construction Indonesia	31/12/2016	1084417	Rp 35538800,0
PT. Power Drillindo	31/12/2016	258-INV	Rp 10100887,0
Total :			Rp 275340737,0

Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

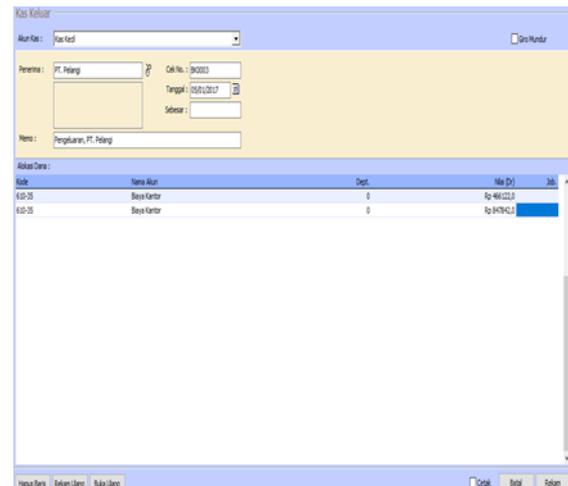
Gambar 7 Daftar Saldo Awal Utang

C. Input Data Transaksi

1. Menginput Transaksi Kas Keluar

Untuk menginput kas keluar digunakan Modul Kas & Bank - Kas Keluar.

Kas keluar digunakan untuk menginput transaksi seperti pembayaran air, listrik, perjalanan dinas, telepon, speedy pembayaran catering, cuti, pembayara gaji dan lain-lain. Berikut salah satu transaksi kas keluar yang terjadi bulan Januari – Maret 2017 pada PT. Citarum Borneo Quantum. Tanggal 05 Januari 2017, PT. CBQ membayar air sebesar Rp. 466.122 dan membayar listrik sebesar Rp. 847.842,-



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 8 Input Transaksi Kas Keluar

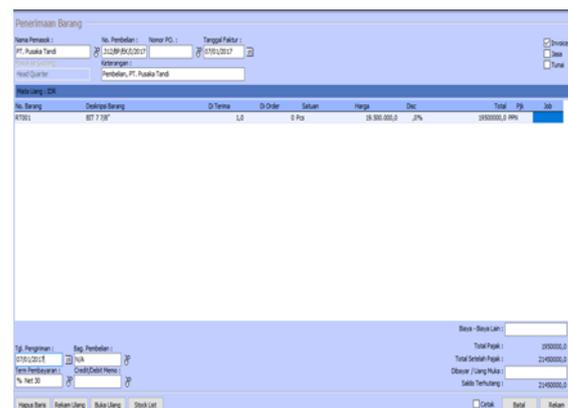
2. Menginput Transaksi Pembelian

Setiap terjadi transaksi pembelian dapat diinput melalui transaksi penerimaan barang (*invoicing*). Transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi, menambah kartu stok dan mengupdate kartu hutang. Isi nama *supplier/pemasok*, memilih *item* barang yang akan dibeli, jumlah dan harganya, kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis.

Pilih modul pembelian - Penerimaan Barang.

a. Kredit

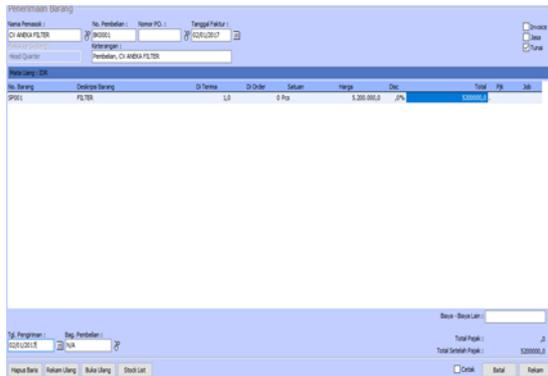
Berikut ini adalah salah satu transaksi pembelian secara kredit pada bulan Januari 2017 PT. Citarum Borneo Quantum.



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 9 Input Transaksi Pembelian Tunai

b. Tunai



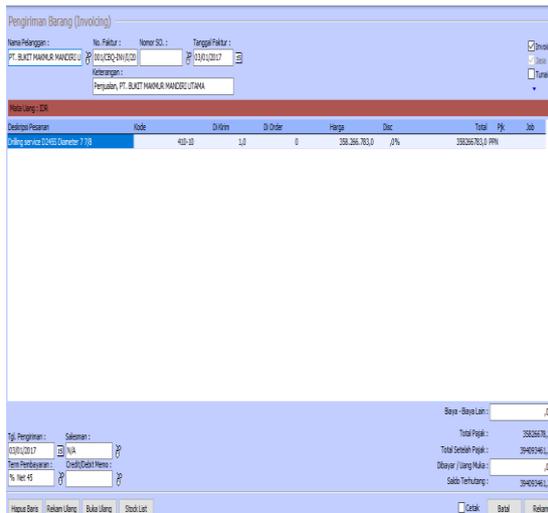
Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 10 Input Transaksi Pembelian Kredit

3. Menginput Transaksi Penjualan

Setiap terjadi transaksi penjualan dapat diinput melalui transaksi pengiriman barang (*invoicing*). Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu piutang. Isi nama *customer*/pelanggan, memilih *item* barang/jasa yang akan dijual, kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis. Pilih modul Penjualan - Pengiriman Barang.

Berikut ini adalah salah satu transaksi penjualan kredit yang terjadi bulan januari 2017 pada PT. Citarum Borneo Quantum : Tanggal 03 Januari 2017, PT. CBQ membuat invoice kepada PT. BUMA No 001/CBQ-INV/I/2017 pembayaran net 45 hari sebesar Rp. 394.093.461,-



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 11 Input Transaksi Penjualan Kredit

Checkmark jasa apabila tidak menggunakan kode barang dan ini untuk perusahaan jasa.

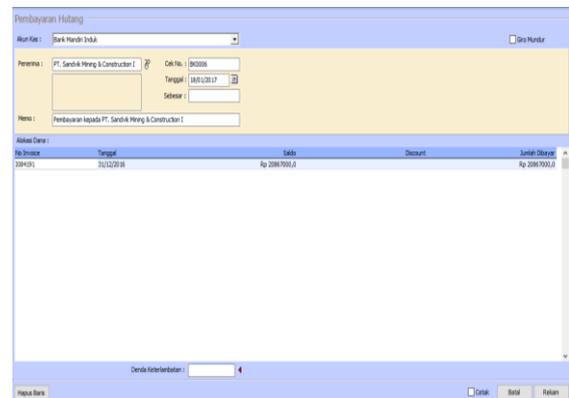
Checkmark invoice agar transaksi otomatis *posting* ke Buku Besar. Jika transaksi kredit maka piutang usaha akan dicatat.

4. Menginput Transaksi Pembayaran Utang

Untuk menginput transaksi pembayaran hutang dilakukan pada *form* pembayaran hutang usaha, pilih *supplier* yang akan menerima pembayaran, kemudian pilih nomor faktur atau *invoice* mana yang akan dibayar, mengisi *discount* pembayaran dan denda keterlambatan jika ada.

Tampilan *form* transaksi pembayaran hutang serupa dengan *form* transaksi kas keluar, dan sama-sama akan mengurangi saldo rekening kas atau bank, namun tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran hutang melalui *form* transaksi kas keluar, karena transaksi kas keluar tidak dapat mengupdate kartu hutang per *supplier*, transaksi kas keluar hanya membuat jurnal akuntansi saja. Pilih Modul Pembelian Pembayaran - Hutang Usaha.

Berikut salah satu transaksi pembayaran utang yang terjadi bulan Januari 2017 pada PT. Citarum Borneo Quantum : Tanggal 18 Januari, PT. CBQ membayar invoice kepada PT. Sandvik No I084191 sebesar Rp. 20.867.000,-



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 12 Input Transaksi Utang

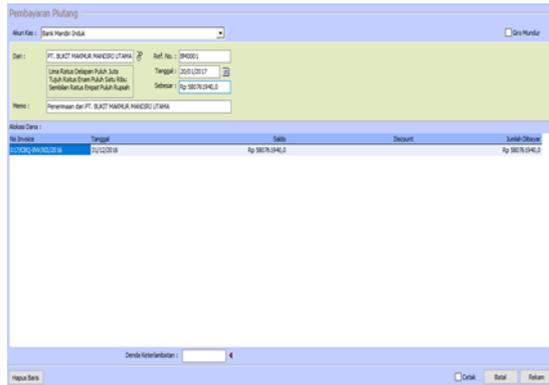
5. Menginput Transaksi Pembayaran Piutang

Untuk menginput transaksi pembayaran piutang dilakukan pada *form* pembayaran piutang usaha, pilih nama *customer* yang akan melakukan pembayaran, kemudian pilih nomor faktur atau *invoice* mana yang akan dibayar, mengisi *discount* pembayaran dan denda keterlambatan jika ada.

Tampilan *form* transaksi pembayaran piutang serupa dengan *form* transaksi kas masuk, dan sama-sama akan menambah saldo rekening kas atau bank, namun tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran piutang melalui *form* transaksi kas masuk, karena

transaksi kas masuk tidak dapat mengupdate kartu piutang per customer, transaksi kas masuk hanya membuat jurnal akuntansi saja. Pilih Modul Penjualan Pembayaran - Piutang Usaha.

Berikut ini salah satu transaksi piutang usaha yang terjadi bulan Januari 2017 pada PT. Citarum Borneo Quantum : Tanggal 20 Januari 2017 PT. Bukit Makmur Mandiri membayar invoice no 017/CBQ-INV/XII/2016 sebesar Rp. 580.761.940,-



Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 13 Input Transaksi Pembayaran Piutang

D. Laporan

1. Laporan Laba Rugi

Klik Modul Laporan – Pilih Laporan Keuangan – Pilih Laba Rugi Standar

PT. Citarum Borneo Quantum

Labarugi

Januari 2017 - Maret 2017

	Saldo
	IDR
Pendapatan	_____
Pendapatan Usaha	
4 10-10 Perjualan Jasa	1.578.290.892.00
Total Pendapatan Usaha	1.578.290.892.00
Total Pendapatan	1.578.290.892.00
Biaya atas Pendapatan	
Biaya Proyek	
5 10-20 Material Proyek	66.695.454.00
Total Biaya Proyek	66.695.454.00
Biaya Lain -lain	
5 20-10 Beban Penyusutan Mesin	288.520.701.00
Total Biaya Lain -lain	288.520.701.00
Total Biaya atas Pendapatan	355.216.155.00
Labarugi Kotor	1.223.074.737.00
Pengeluaran Operasional	
Biaya Administrasi & Umum	
6 10-10 Gaji	293.250.000.00
6 10-15 Transporti / perjalanan Dinas	743.439.00
6 10-20 Biaya Cukai	7.584.447.00
6 10-25 Biaya Kantor	8.844.958.00
6 10-35 Biaya Makan	207.800.000.00
6 10-40 Biaya PPh 23	30.778.702.00
Total Biaya Administrasi & Umum	319.961.546.00
Total Pengeluaran Operasional	319.961.546.00
Labarugi Operasi	903.113.191.00
Pendapatan Lain	
Total Pendapatan Lain	0.00
Pengeluaran Lain	
Total Pengeluaran Lain	0.00
Labarugi Bersih	903.113.191.00

Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 14 Laporan Laba Rugi

2. Laporan Neraca

Klik Modul Laporan – Pilih Laporan Keuangan – Pilih Neraca Standar

PT. Citarum Borneo Quantum
Neraca
Maret 2017

		Saldo
		IDR
Harta		
Kas		
110-10	Kas Kecil	14.432.011,00
Total Kas		14.432.011,00
Bank		
120-10	Bank Mandiri Induk	1.546.913.412,60
Total Bank		1.546.913.412,60
Piutang Usaha		
130-10	Piutang Usaha	3.631.808.176,20
Total Piutang Usaha		3.631.808.176,20
Piutang Non Usaha		
135-10	Piutang Karyawan	5.000.000,00
Total Piutang Non Usaha		5.000.000,00
Persediaan		
140-10	Persediaan 1	272.705.209,00
Total Persediaan		272.705.209,00
Total WIP Proyek		
		0,00
Biaya Dibayar Dimuka		
150-25	Uang Muka Proyek	819.189.425,00
Total Biaya Dibayar Dimuka		819.189.425,00
Pajak Dibayar Dimuka		
155-30	PPh Dibayar Dimuka	6.104.545,40
155-30	PPh 20 Dibayar Dimuka	-30.776.702,60
Total Pajak Dibayar Dimuka		-24.672.157,20
Harta Tetap Berwujud		
170-70	Mesin	8.887.580.000,00
170-71	Akumulasi Penyusutan Mesin	-6.058.934.701,00
Total Harta Tetap Berwujud		2.828.645.299,00
Total Harta Lainnya		
		0,00
Total Harta		9.093.999.375,20

Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 15 Laporan Neraca Periode Maret 2017

3. Laporan Penjualan

Klik Modul Laporan – Laporan Penjualan – Penjualan Sederhana

PT. Citarum Borneo Quantum
Penjualan - Sederhana
Minggu, 01 Januari 2017 - Jumat, 31 Maret 2017

Tanggal	No. Ref.	Order No.	Nama Pelanggan	Mata Uang	Jumlah	Jumlah IDR
03/01/2017	001/CSO-NV		PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (CS001)	IDR	394.093.461,30	394.093.461,30 ✓
01/02/2017	006/CSO-NV		PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (CS001)	IDR	707.218.343,70	707.218.343,70 ✓
02/03/2017	010/CSO-NV		PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (CS001)	IDR	634.808.176,20	634.808.176,20 ✓
Total:				IDR	1.736.119.981,20	

Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 16 Laporan Penjualan

4. Laporan Pembelian

Klik Modul Laporan – Laporan Pembelian – Pembelian Sederhana

PT. Citarum Borneo Quantum
Pembelian - Sederhana

Minggu, 01 Januari 2017 - Jumat, 31 Maret 2017

Tanggal	No. Ref.	No. Pesanan	Nama Pemasok	Mata Uang	Jumlah	Jumlah (IDR)
07/01/17	FIN-1312/PP/E		PT. Pusaka Tandil (SP005)	IDR	21.450.000,00	21.450.000,00 ✓
04/02/17	049/PTTR-BPIN		PT. Petroleum Lima (SP003)	IDR	12.038.999,40	12.038.999,40 ✓
17/02/17	673794		PT. Atlas Copco Nusantara (SP002)	IDR	30.250.000,00	30.250.000,00 ✓
07/03/17	PCL-0013		CV. Putri Cahaya Lestari (SP0015)	IDR	3.410.000,00	3.410.000,00 ✓
Total:				IDR	67.149.999,40	

Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 17 Laporan Pembelian

5. Laporan Daftar Barang

Klik Modul Laporan – Laporan Barang/Persediaan – Daftar Barang Umum

PT. Citarum Borneo Quantum
Daftar Barang - Umum

Kode Barang	Nama Barang	Tersedia	Unit	Mata Uang	Harga Satuan	Total Nilai
Head Quarter						
Rocktools						
RT0001	BIT 7 7/8"	0,00	Pcs	IDR	0,00	0,00
RT0002	BIT 7 7/8"	0,00	Pcs	IDR	0,00	0,00
Total Rocktools:						0,00
Spare Part						
SPT0001	OLI	0,00	Pcs	IDR	0,00	0,00
SPT0002	Valve Solenoid	0,00	Pcs	IDR	0,00	0,00
Total Spare Part:						0,00
Total Head Quarter:						0,00

Sumber : Aplikasi Zahir Accounting V. 5.1

Gambar 18 Laporan Daftar Barang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 dalam menyusun Laporan Keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang terkomputerisasi.
2. Perusahaan sangat terbantu dengan adanya penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 karena pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan cepat, akurat dan efisien

REFERENSI

- Bimantara, Z. A. (2017). ANALISIS PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI PASIEN UMUM (Studi Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro), 45(1), 203–209.
- Christiyanto, A., & Wahyono, H. (2016). 1) , 2) , 3). *Penerapan Aplikasi Komputer Akuntansii*, 179–191.
- Han, J., & Kamber, M. (2006). *Data Mining: Concepts and Techniques. Soft Computing* (Vol. 54). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19721-5>
- Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Himayati. (2013). *Eksplorasi Zahir Accounting*. (W. Yoevestian, Ed.). Jakarta: PT Elex Media

Komputindo.

- Lubis, R. H. (2017). *Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa*. (Maya, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sari, D. I., & Ulya, R. (2019). Penerapan Zahir Accounting Versi 5.1 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT. Citarum Borneo Quantum. *Moneter*, 6(1), 23–32.

PROFIL PENULIS

DIAN INDAH SARI, SE.AK,MM, memperoleh gelar SE.AK lulus tahun 2000, di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi ((UNSRI) Universitas Negeri Sriwijaya Palembang. Memperoleh gelar MM, lulus tahun 2014, jurusan Manajemen di Pascasarjana Universitas BSI Bandung. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas BSI Bekasi.

Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Dedi Suharyadi

Universitas Bina Sarana Informatika
e-mail: dedi.dsi@bsi.ac.id

Suharyadi, D. (2019). Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Moneter*, 6(1), 39–44.

Abstract - Taxes are still one of the largest state revenues that will be used to finance development and also increase welfare for all Indonesians. To be able to achieve the target of tax revenue, awareness and compliance must be fostered for the community, in this case a taxpayer to fulfill tax obligations in accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to find out how the level of compliance of individual taxpayers towards income tax receipts at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. The research method used is by conducting data comparisons for each year, literature studies sourced in several literature. The results showed that the level of taxpayer compliance in reporting annual tax returns in 2013 amounted to 53.21%, in 2014 it rose to 57.61%, in 2015 again increased by 69.14%, in 2016 again increased by 73.60% and in 2017 the increase was quite significant because the level of compliance reached 90.64%. Viewed from the side of achievement compared to the income tax revenue target the level of achievement can be said to be up and down. But seen from the amount of income tax revenue from 2013 to 2017, it tends to increase.

Keywords: *Obedience, Tax Receipts, Taxpayer*

PENDAHULUAN

Pajak masih menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat yang dalam hal ini merupakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Misalkan saja dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk dapat menyampaikan dan melaporkan pajak penghasilan.

Selain dilakukan secara manual, saat ini wajib pajak dapat menyampaikan laporan pajak secara online sehingga ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang selama ini beralasan tidak memiliki waktu ke kantor pajak. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan

mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Suhendra, 2010). Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan kunci terlaksananya *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan, salah satunya yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Tingkat kesadaran wajib pajak menjadi hal yang sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pajak khususnya yang tercatat di wilayah pajak Jakarta Duren Sawit. Dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 82.330 pada tahun 2013, meningkat menjadi 86.087 pada tahun 2017. Tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Penerimaan pajak dapat meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tinggi. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak maka pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tentu saja target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Pelayanan fiskus yang baik tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dan didukung dengan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

1. Kepatuhan

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan

melalui prosedur pemeriksaan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Tiraada, 2013).

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan terdiri dari (Rahayu, 2017):

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP, tepat waktu dalam dalam menyetorkan pajakyang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai orang ketiga).

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan:

a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula.

b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.

c. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu pelaksanaan pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

d. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksa dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan ketetapan pajak

yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas merupakan ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan pajak adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.

- e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan
Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
- f. Kemauan dan kesadaran wajib pajak
Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada

Wajib Pajak (Yeni, 2013). Menurut (Resmi, 2015), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

- a. Kejelasan dan Kepastian
Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation*. atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.
- b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat

(1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak meng-gantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pe-maksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

- c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)
Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.
- d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat
Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan perbandingan data untuk setiap tahun, studi pustaka yang bersumber pada beberapa literatur baik itu buku referensi maupun artikel dan jurnal yang terkait dengan pembahasan dan sebagai penunjang dalam penulisan ini, serta berbagai informasi dari internet yang dapat menambah wawasan. Data yang digunakan dan diolah dalam penelitian adalah data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan juga jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian yang terkait dan relevan, diperoleh data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah yang menyampaikan dan

tidak menyampaikan SPT Tahunan serta data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan data tersebut maka akan dilakukan analisa mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh.

1. Analisa tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penyampaian SPT Tahunan PPh OP

Tahun	Wajib Pajak (Jiwa)		
	Terdaftar	Melaporkan SPT	Tidak Melaporkan SPT
2013	82.330	43.808	38.522
2014	86.978	50.111	36.867
2015	83.099	57.454	25.645
2016	86.651	63.778	22.873
2017	86.087	78.031	8.056

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dapat digunakan rumus:

$$TK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- TK : Tingkat Kepatuhan
 a : Jumlah WP Melaporkan SPT
 b : Jumlah WP Terdaftar

a. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2013

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2013}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2013}} \times 100\% \\ = \frac{43.808}{82.330} \times 100\% = 53,21\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2013 adalah sebesar 53,21 %.

b. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2014

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2014}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2014}} \times 100\% \\ = \frac{50.111}{86.978} \times 100\% = 57,61\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2014 adalah sebesar 57,61 %.

c. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2015

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2015}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2015}} \times 100\% \\ = \frac{57.454}{83.099} \times 100\% = 69,14\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015 adalah sebesar 69,14 %.

d. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2016

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2016}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2016}} \times 100\% \\ = \frac{63.778}{86.651} \times 100\% = 73,60\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2016 adalah sebesar 73,60 %.

e. Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2017

$$= \frac{\text{Jumlah WP Laporan SPT thn 2016}}{\text{Jumlah WP Terdaftar thn 2016}} \times 100\% \\ = \frac{78.031}{86.087} \times 100\% = 90,64\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2017 adalah sebesar 90,64 %.

Hasil analisa perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	Kepatuhan
1	2013	53,21 %
2	2014	57,61 %
3	2015	69,14 %
4	2016	73,60 %
5	2017	90,64 %

Sumber: Data Diolah (2019)

2. Analisa Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Data mengenai jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PPh OP (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2013	227.691.700.508	213.036.204.484
2014	252.499.282.113	236.442.875.846
2015	318.869.596.946	271.294.523.643
2016	611.956.572.906	498.234.262.011
2017	768.869.404.940	688.035.703.646

Sumber: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Untuk menghitung tingkat realisasi terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang telah ditentukan dapat digunakan rumus:

$$TC = \frac{R \text{ thn ke } - n}{T \text{ thn ke } - n} \times 100\%$$

Dimana:

- TK : Tingkat Capaian PPh OP
a : Realisasi Penerimaan PPh OP tahun ke n
b : Target Penerimaan PPh OP tahun ke n

a. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2013

$$= \frac{\text{Realisasi PPh OP Tahun 2013}}{\text{Target PPh OP Tahun 2013}} \times 100\% \\ = \frac{213.036.204.484}{227.691.700.508} \times 100\% = 93,56\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2013 adalah sebesar 93,56 %.

b. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2014

$$= \frac{\text{Realisasi PPh OP Tahun 2014}}{\text{Target PPh OP Tahun 2014}} \times 100\% \\ = \frac{236.442.875.846}{252.499.282.113} \times 100\% = 93,64\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2014 adalah sebesar 93,64 %.

c. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2015

$$= \frac{\text{Realisasi PPh OP Tahun 2015}}{\text{Target PPh OP Tahun 2015}} \times 100\% \\ = \frac{271.294.523.643}{318.869.596.946} \times 100\% = 85,08\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2015 adalah sebesar 85,08 %.

d. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2016

$$= \frac{\text{Realisasi PPh OP Tahun 2016}}{\text{Target PPh OP Tahun 2016}} \times 100\% \\ = \frac{498.234.262.011}{611.956.572.906} \times 100\% = 81,42\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2016 adalah sebesar 81,42 %.

e. Tingkat Capaian PPh OP Tahun 2017

$$= \frac{\text{Realisasi PPh OP Tahun 2017}}{\text{Target PPh OP Tahun 2017}} \times 100\% \\ = \frac{688.035.703.646}{768.869.404.940} \times 100\% = 89,49\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2017 adalah sebesar 89,49 %.

Hasil analisa perhitungan tingkat pencapaian Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Pencapaian PPh OP

No	Tahun	Capaian
1	2013	93,56 %
2	2014	93,64 %
3	2015	85,08 %
4	2016	81,42 %
5	2017	89,49 %

Sumber: Data Diolah (2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2013 sebesar 53,21 %, tahun 2014 naik menjadi 57,61 %, tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 69,14 %, tahun 2016 kembali meningkat sebesar 73,60 % dan pada tahun 2017 peningkatannya cukup signifikan karena tingkat kepatuhan mencapai 90,64 %. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dikarenakan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, mengingat betapa pajak menjadi sumber pemasukan bagi negara yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara disamping kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam memfasilitasi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.
2. Dilihat dari sisi pencapaian dibandingkan dengan target penerimaan pajak penghasilan tingkat pencapaiannya dapat dikatakan naik turun. Tahun 2013 tingkat pencapaiannya sebesar 93,56 %,

naik menjadi 93,64 % di tahun 2014. Di tahun 2015 tingkat pencapaian menurun menjadi 85,08 % dan kembali turun di tahun 2016 sebesar 81,42 %. Di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 89,49 %. Namun dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan orang pribadi tentunya dibutuhkan kolaborasi yang baik antara wajib pajak dan juga pemerintah. Dengan memberikan sosialisasi yang tepat serta

REFERENSI

- Indonesia, R. (2009). Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Salemba 4.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor, 5(2), 7–8.

Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan., 15(1).

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, 1(3), 999–1008.

Yeni, R. (2013). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang*. 2013. Universitas Negeri Padang.

PROFIL PENULIS

Dedi Suharyadi, SE, MM.

Lahir di Curup Provinsi Bengkulu lulusan S1 Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2002 dan menyelesaikan study S2 di tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Mulai bergabung di Bina Sarana Informatika dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Aktif sebagai penulis di beberapa jurnal di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika seperti Junal Moneter, Jurnal Widya Cipta dengan beberapa artikel yang sudah diterbitkan, dan juga penulis di jurnal Nusa Mandiri seperti jurnal Progressive dan JITK.

Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang)

Andreas Rudiwanto

Universitas Bina Sarana Informatika
PSDKU KARAWANG
e-mail : andreas.aed@bsi.ac.id

Rudiwanto, A. (2019). Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan No: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang). *Moneter*, 6(1), 45–52.

Abstract - *The aim of this research is to discover the health level of Saving Loan Cooperative Abdi Sesama in 2017. The research refer to cooperation financial statement 2017 only. The data analysis tehniques base on the Standard of the Minister of Coopertive and Small, Medium Enterprises Republic of Indonesia number: 06/Per/Dep.6/IV/2016. The Data collection techniques used are documentation and interview. Techniques documentation in the form of cooperation financial statement 2017 and interviews are conducted to measure healthy level for management aspect. Primary data and secondary data used in this research. Final results of this research show the Saving Loan Cooperative Abdi Sesama has healthy predicate, with grand total score 81,65.*

Keywords: *Health level, Saving and Loan Cooperative, Cooperation Financial Statement*

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk badan usaha yang diatur oleh pemerintah melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, 1992), memiliki tujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggotanya. Pemerintah sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat disandarkan hanya kepada BUMD, BUMN ataupun perusahaan perusahaan swasta skala kecil maupun skala besar. Kehadiran koperasi juga telah memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Koperasi simpan pinjam dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki sekumpulan orang dalam ikatan pemersatu yang sepakat menabung sehingga terciptanya modal untuk pinjaman antar anggota.

Pada koperasi simpan pinjam, ada tiga prinsip yang melekat, yaitu adanya swadana, senasib sepenang-gungan dan yang terakhir adalah kerja sama dan saling percaya. Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal kerja kepada para anggota dengan tingkat suku bunga kredit rendah. Memberikan solusi keuangan atau permodalan kepada anggota koperasi. Koperasi hendaknya terus meningkatkan kualitas untuk menumbuhkan kepercayaan para anggota, masyarakat dan pihak ketiga (pemerintah dan bank).

Kualitas koperasi tidak hanya diukur dari besarnya modal, besarnya jumlah anggota dan aspek laporan keuangan.

Kualitas koperasi dapat di ukur dari tingkat kesehatan koperasi itu sendiri. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan suatu hal penting di Indonesia. Menurut (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2016) disebutkan bahwa sasaran penilaian kesehatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
3. Meningkatnya citra dan kredibiitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
6. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Lebih lanjut diuraikan ada 22 indikator untuk menilai kesehatan KSP dan USP Koperasi, seperti yang tertuang dalam Peraturan (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2016). 22 indikator tersebut terbagi dalam 7 aspek, yaitu:

1. Aspek Permodalan; terdiri dari (a) Rasio modal sendiri terhadap total asset, (b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, (c) Rasio kecukupan modal sendiri.
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif; terdiri dari (a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, (b) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, (c) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, (d) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.
3. Aspek Manajemen; terdiri dari (a) Manajemen umum, (b) Kelembagaan, (c) Manajemen permodalan, (d) Manajemen aktiva, (e) Manajemen likuiditas.
4. Aspek Efisiensi; terdiri dari (a) Rasio beban operasi terhadap partisipasi bruto, (b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, (c) Rasio efisiensi pelayanan.
5. Aspek Likuiditas; terdiri dari (a) Rasio kas, (b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
6. Aspek Kemandirian dan pertumbuhan; terdiri dari (a) Rentabilitas asset, (b) Rentabilitas modal sendiri, (c) Kemandirian operasional pelayanan.
7. Aspek Jatidiri; terdiri dari (a) Rasio partisipasi bruto, (b) Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)

Mengacu pada (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2016), hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasi dalam empat kategori, yaitu:

1. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq X \leq 100$
2. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq X < 80,00$
3. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq X < 66,00$
4. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 \leq X < 51,00$

Dalam (Goenawan & Natalia, 2016), disebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya dan koperasi dapat mengevaluasi kegiatan yang selama ini telah dilakukan guna keberlangsungan usahanya dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi akan merasa lebih nyaman dan aman apabila berurusan dengan koperasi, baik itu masalah investasi,

pinjaman, kewajiban terhadap pemerintah (pajak) dan lain-lainnya.

Koperasi simpan Pinjam Abdi Sesama, beralamat di jalan kolonel Atmo No. 869 Palembang Sumatera Selatan. Didirikan dengan payung hukum nomor BH: 001931a/BH/Tgl. 23 Juli 1997, dan sampai dengan tahun 2017 sudah memiliki anggota sebanyak 832 orang. Perkembangan jumlah anggota dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dalam dilihat dalam tabel 1 dibawah ini

Tabel 1. Keanggotaan Koperasi

Tahun	Jumlah
2015	823 orang
2016	814 orang
2017	832 orang

Sumber: Data Primer

Modal sendiri dari koperasi Abdi Sesama dihimpun dari simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan. Pertumbuhan modal sendiri dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2. Modal Sendiri/Simpanan Anggota

Tahun	Jumlah (Rp)
2015	4.269.319.984
2016	4.577.032.662
2017	4.866.585.822

Sumber: Data Primer

Sementara untuk pergerakan realisasi pinjaman kepada anggota, total asset dan sisa hasil usaha (SHU) dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.
Realisasi Pinjaman, Total Asset & Total SHU
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Realisasi Pinj	Total Asset	SHU
2015	3.115.800	9.623.495	3.444
2016	2.951.400	10.054.494	158.273
2017	3.483.350	11.607.182	166.873

Sumber: Data Primer

Melihat usia koperasi Abdi Sesama yang tidak muda lagi maka sudah seharusnya koperasi mampu bersaing ataupun berkompetisi dengan koperasi lainnya yang ada di kota Palembang. Untuk dapat berkompetisi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal kerja yang dimiliki atau besarnya jumlah anggota dan ataupun oleh faktor laporan keuangan, tetapi yang terpenting adalah tingkat kesehatan

koperasi yang prima. Melakukan pengukuran terhadap tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu hal penting dan mutlak agar terwujud pengelolaan KSP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengupasnya dalam bentuk jurnal dengan judul Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/TV/2016.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi Abdi Sesama, apakah masuk dalam predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan atau dalam pengawasan khusus.

1. Pengertian Koperasi.

Pengertian koperasi sendiri berasal dari kata *co-operatio* yang berarti usaha bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis (Baswir, 2000).

Di sisi lain, pengertian koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya (Sumarsono, 2003).

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, 1992) ditegaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan..

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, 1992) adalah sebagai berikut; (a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing masing anggota, (d) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal, (e) Kemandirian, (f) Pendidikan perkoperasian, (g) Kerjasama antar koperasi.

(Subandi, 2009), mengelompokan jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi. Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi

sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.

- b. Koperasi Produksi. Koperasi yang kegiatan usahanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi . Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
- c. Koperasi Pemasaran. Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- d. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya untuk bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Laporan Keuangan Koperasi

(Kasmir, 2010) Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan sumber penting dalam sebuah badan usaha ataupun koperasi karena sebagai media informasi yang mencatat ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan. Dimana melalui laporan keuangan, para anggota koperasi dapat mengetahui kondisi kinerja pengurus koperasi pada periode tertentu.

(Jumingan, 2011) Laporan keuangan merupakan suatu proses akuntansi yang menghasilkan wujud atau cerminan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Suatu hasil dari laporan keuangan sangatlah penting untuk dipelajari ataupun dianalisis, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. (Harapan, 2009) Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam untuk menghasilkan keputusan yang tepat.

(Margaretha, 2011) Mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan.

(Fahmi, 2011) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan,

dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan laporan keuangan koperasi adalah hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan koperasi oleh pengurus yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan kinerja koperasi tersebut.

Jadi dengan laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya yang menjadi bagian integral akan dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh dan seberapa besar tingkat kesehatan koperasi itu sendiri.

3. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Tingkat kesehatan koperasi merupakan suatu tolak ukur untuk kondisi ataupun keadaan koperasi pada suatu periode tertentu.

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada para anggotanya dan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan kepada seluruh anggotanya.

Untuk menciptakan koperasi yang berkualitas, efektif dan efisien, Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terus melakukan sosialisasi terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Peraturan tersebut menjadi pedoman penting untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Bagi pemangku kepentingan, mengukur tingkat kesehatan koperasi bukan semata mata untuk menjatuhkan saksi tetapi untuk mengetahui pola pembinaan yang tepat bagi koperasi tersebut. Sebab, koperasi harus mengelola dana dari anggota secara bertanggung jawab dan hati hati.

Sasaran penilaian kesehatan koperasi adalah terwujudnya koperasi yang sehat, menjamin pengelolaan asset, terwujudnya pelayanan yang prima, meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat bagi anggota koperasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. (Idrus, 2009) Pendekatan studi kasus akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam, dan peneliti biasanya akan berusaha

untuk menemukan variabel penting yang terkait dengan subjek yang diteliti.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan pihak manajemen koperasi simpan pinjam Abdi Sesama dan laporan keuangan koperasi Abdi Sesama. Data Sekunder terutama berupa buku buku referensi dan laporan historis yang telah disusun dan dipublikasikan.

Bahan baku yang akan dikupas oleh penulis berdasarkan laporan keuangan koperasi Abdi Sesama per tanggal 31 Desember 2017 seperti yang telah diterbitkan dalam rapat anggota tahunan ke-44. Bahan baku tersebut menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Abdi Sesama.

Pengukuran kesehatan koperasi mengacu pada pada (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup penilaian untuk KSP dan USP Koperasi dilakukan atas 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi.

Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dalam angka 0 (nol) sampai 100 (seratus)

1. Permodalan.

Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 06/Per/Dep.06/IV/2016, aspek permodalan memiliki 3 indikator, dengan bobot penilaian maksimal 15,00, dengan perincian sebagai berikut; (a). Rasio modal sendiri terhadap total aset, memiliki bobot 6, (b).

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, memiliki bobot 6, dan (c). Rasio kecukupan modal sendiri dengan bobot 3.

Dari hasil perhitungan skor yang dilakukan, aspek permodalan KSP Abdi Sesama tahun 2017 memperoleh total skor 14.25. Dengan skor tersebut dapat dikatakan aspek permodalan KSP Abdi Sesama memiliki nilai yang sangat sehat dari aspek permodalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Aspek Permodalan

Indikator	N	B	Skor
Rasio modal sendiri terhadap total asset	100	6	6,00
Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	100	6	6,00
Rasio kecukupan modal sendiri	75	3	2,25
TOTAL		15	14,25

Keterangan: N=Nilai; B=Bobot (%)

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 06/Per/ Dep.6/IV/2016, aspek kualitas aktiva produktif memiliki 4 indikator, dengan bobot penilaian maksimal 25,00, dengan perincian sebagai berikut;

- Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, memiliki bobot 10,
- Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, memiliki bobot 5,
- Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, memiliki bobot 5, dan
- Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, memiliki bobot 5. Untuk memperjelas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Indikator	N	B	Skor
Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan	100	10	10,00
Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	60	5	3,00
Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	70	5	3,50
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	100	5	5,00
TOTAL		25	21,50

Keterangan: N=Nilai; B=Bobot (%)

Dari tabel 5 tersebut diatas memperlihatkan bahwa aspek kualitas aktiva produktif untuk KSP Abdi Sesama tahun 2017 memperoleh total skor sebesar 21.50. Perolehan skor tersebut belum mencapai skor maksimal tetapi sudah tergolong skor yang tinggi dan sehat.

3. Aspek Manajemen.

Penilaian aspek manajemen menurut peraturan pemerintah nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 meliputi 5

indikator dengan bobot maksimal 15. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh indikator dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dan untuk setiap jawaban “ya” memperoleh nilai 0,25. Bobot maksimal 3.
- Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dan untuk setiap jawaban “ya” mendapat nilai 0,50. Bobot maksimal 3.
- Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dan untuk setiap jawaban “ya” mendapat nilai 0,60. Bobot maksimal 3.
- Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dan untuk setiap jawaban “ya” mendapat nilai 0,30, Bobot maksimal 3.
- Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dan untuk setiap jawaban “ya” mendapat nilai 0,60. Bobot maksimal 3.

Dari perhitungan skor yang telah dilakukan untuk aspek manajemen, memperlihatkan bahwa total skor koperasi Abdi Sesama sebesar 14,40. Pencapaian skor tersebut terbilang cukup tinggi dan hampir sempurna. Untuk aspek manajemen tingkat kesehatan koperasi sangat sehat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Aspek Manajemen

Indikator	J	B	Skor
Manajemen umum	12	3	3,00
Manajemen kelembagaan	6	3	3,00
Manajemen Permodalan	5	3	3,00
Manajemen aktiva	8	3	2,40
Manajemen likuiditas	5	3	3,00
TOTAL		15	14,40

Keterangan: J=Jawaban "Ya", B=Bobot

4. Aspek Efisiensi

Pengukuran untuk aspek efisiensi menurut peraturan pemerintah nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 didasarkan pada 3 indikator dengan total bobot maksimal 10, yaitu

- Rasio biaya operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto, memiliki bobot 4,
- Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, memiliki bobot 4 dan
- Rasio efisiensi pelayanan, memiliki bobot 2.

Aspek efisiensi menggambarkan seberapa besar KSP atau USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

Dari perhitungan skor yang telah dilakukan pada aspek efisiensi koperasi KSP Abdi Sesama tahun 2017 menghasilkan skor 9,00.

Berdasarkan hasil skor yang telah didapat tersebut menunjukkan skor yang tinggi walupun belum mencapai skor maksimal sebesar 10,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Aspek Efisiensi

Indikator	N	B	Skor
Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	100	4	4,00
Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	75	4	3,00
Rasio efisiensi pelayanan	100	2	2,00
TOTAL		10	9,00

Keterangan: N=Nilai; B=Bobot (%)

5. Aspek Likuiditas

Mengacu pada peraturan pemerintah nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, pengukuran untuk aspek likuiditas menggunakan 2 indikator dengan total maksimal bobot 15. Dua indikator tersebut adalah

- Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, memiliki bobot 10, dan
- Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, memiliki bobot 5.

Berdasarkan hasil perhitungan skor yang telah dilakukan menunjukkan aspek likuiditas KSP Abdi Sesama sebesar 8,75 atau baru tercapai sebesar 58% dari bobot maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 8. Aspek Likuiditas

Indikator	N	B	Skor
Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar	50	10	5,00
Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	75	5	3,75
TOTAL		15	8,75

Keterangan: N=Nilai; B=Bobot (%)

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan terkait penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi dengan nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016, jumlah bobot maksimal untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah sebesar 10.

Penilaian tersebut didasarkan pada 3 indikator sebagai berikut;

- Rasio rentabilitas asset dengan bobot sebesar 3,
- Rasio rentabilitas modal sendiri dengan bobot sebesar 3 dan
- Rasio operasional pelayanan dengan bobot sebesar 4.

Berdasarkan hasil perhitungan skor yang telah dilakukan, jumlah skor untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan KSP Abdi Sesama tahun 2017 adalah sebesar 5.50. Secara prosentase dari bobot maksimal baru mencapai 55%, sehingga dapat dikatakan skor tersebut cukup rendah jika mengacu pada bobot maksimal yang disyaratkan sebesar 10.

Tabel 9. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Indikator	N	B	Skor
Rasio rentabilitas aset	25	3	0,75
Rasio rentabilitas modal sendiri	25	3	0,75
Rasio kemandirian operasional pelayanan	100	4	4,00
TOTAL		10	5,50

Keterangan: N=Nilai; B=Bobot (%)

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Pengukuran aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan koperasi itu sendiri. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, pengukuran tersebut didasarkan pada 2 indikator yang secara total memiliki bobot maksimal sebesar 10. Dua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Rasio Partisipasi Bruto. Rasio ini untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota. Semakin tinggi prosentase yang dihasilkan maka semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Rasio partisipasi bruto memiliki bobot sebesar 7.
- Rasio Promosi Ekonomi Anggota. Rasio ini untuk mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisien partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Hasil yang didapat, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rasio promosi ekonomi anggota memiliki bobot sebesar 3.

Tabel 10. Aspek Jatidiri Koperasi

Indikator	N	B	Skor
Rasio partisipasi bruto	75	7	5,25
Rasio promosi ekonomi anggota	100	3	3,00
TOTAL		10	8,25

Keterangan: N=Nilai; B=Bobot (%)

Dari tabel 10 tersebut diatas terlihat bahwa skor untuk aspek jatidiri koperasi KSP Abdi Sesama

tahun 2017 sebesar 8,25. Jumlah skor tersebut cukup baik jika dibandingkan dengan bobot maksimal yang disyaratkan sebesar 10.

KESIMPULAN

Pengukuran atau penilaian kesehatan KSP Abdi Sesama yang telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan (Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2016) terhadap 7 aspek.

Tabel 11. Hasil Skor Kesehatan

KSP Abdi Sesama Tahun 2017		
No.	Aspek Pengukuran	B
1	Aspek Permodalan	15
2	Aspek Kualitas Aktiva Produktif	25
3	Aspek Manajemen	15
4	Aspek Efisiensi	10
5	Aspek Likuiditas	15
6	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan	10
7	Aspek Jatidiri Koperasi	10
TOTAL		100

Keterangan; B=Bobot (%)

Mengacu pada hasil tersebut diatas maka KSP Abdi Sesama untuk tahun 2017 dengan perolehan total skor 81,65 masuk kategori sehat. Menurut peraturan pemerintah nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, kategori sehat jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq X \leq 100$.

Namun begitu ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian serius, karena memiliki skor yang rendah, yaitu aspek likuiditas dan aspek kemandirian dan pertumbuhan.

Dua aspek tersebut menjadi kelemahan yang harus diperbaiki untuk tahun tahun kedepan. Untuk aspek dengan perolehan skor yang baik hendaknya terus ditingkatkan agar tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi menjadi sangat tinggi.

Terhadap anggota yang mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya berimbas pada macetnya angsuran hendaknya pengurus koperasi secara aktif melakukan pendampingan positif agar dapat dicarikan solusi terbaik.

Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap 7 aspek penilaian, yaitu pinjaman beresiko atau pinjaman bermasalah menjadi relatif kecil, dana

yang diterima dari anggota akan bertambah.

Dengan pertambahannya dana atau lancarnya anggota membayar angsuran pokok plus bunga akan meningkatkan nilai kas koperasi. Kas bertambah maka kemampuan koperasi dalam meyalurkan pinjaman juga akan menjadi kuat yang pada akhirnya koperasi akan mampu menciptakan SHU yang lebih besar lagi.

REFERENSI

- Baswir, R. (2000). *No Title* (Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016*. Jakarta.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Goenawan, H., & Natalia, D. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 169–191.
- Harapan, S. S. (2009). *Analisis Kritis Dan Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Jumingan. (2011). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan* (Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Margaretha, F. (2011). *Manajemen Keuangan Untuk Non Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Rudiwanto, A. (2019). Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan No: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang). *Moneter*, 6(1), 45–52.
- Subandi. (2009). *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2003). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. (1992). *Perkoperasian*. Jakarta.

PROFIL PENULIS

Andreas Rudiwanto, SE., MM. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta tahun 1996. Lulus Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA tahun 2007. Aktif Mengajar sebagai dosen dari tahun 2010 hingga sekarang di Akademi Komputer Akuntansi BSI . Mengampu mata kuliah akuntansi dasar, akuntansi menengah,

akuntansi lanjutan, analisis laporan keuangan dan akuntansi biaya. Selain aktif mengajar, tercatat juga sebagai pegawai tetap di salah satu perusahaan swasta.

Penerapan Teknologi Gasifikasi Dalam Mencapai Efisiensi Biaya Overhead Bahan Bakar Produksi Serta Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Harga Jual

Syafuddin

Univeristas BSI Bandung
Jl Sekolah Internasional No 1-6 Bandung
syafuddin.sdd@bsi.ac.id

Syafuddin. (2019). Penerapan Teknologi Gasifikasi Dalam Mencapai Efisiensi Biaya Overhead Bahan Bakar Produksi Serta Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Harga Jual. *Moneter*, 6(6), 53–62.

Abstract - *The purpose of this research is to analyze the effects of gasification technology and reduce of production fuel overhead achieved has a significant effect to influenced management to reducing their selling price. This research used the secondary type of data and multiple linear regresi to testing the hypotheses been created. The results gathered within this research is that gasification technology (X1) and the reduce of production fuel overhead (X2) has positive and significance effect where both independent variables creating significant influence on price reducing regulation. Simultaneous, both independent variables also contributed a positive significance affect. Partially, Gasification Technology (X1) contributed positive significance effect whichmean this variables has a positive and significant effect. While variable of the reduce of production fuel overhead (X2) shown negative effect to variable of price reducing regulation (Y).*

Keywords: Coal, Shrimp feed, Gasification Technology, Overhead, Efficiency

PENDAHULUAN

Perusahaan memerlukan sebuah rencana tindakan dalam menggunakan sumber daya, kompetensi khusus dan strategi keunggulan biaya untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Definisi dari keunggulan biaya tersebut adalah, perusahaan harus bisa bersiap menjadi produsen berbiaya terendah dalam industri dengan memberikan harga jual paling murah daripada harga yang diberikan pesaingnya dengan nilai mutu yang sama (Musa & Muhamad, 2014)

Harga pasar keseimbangan menjadi acuan suatu perusahaan dalam menetapkan harga jual. Rujukan harga keseimbangan sekaligus menjadi rujukan keputusan produksi yang mencapai laba maksimum dan jumlah penjualan. Jika ada perusahaan yang menjual harga lebih tinggi dari harga keseimbangan maka pembeli akan beralih ke perusahaan lain yang menawarkan harga keseimbangan. faktor dengan tingkat kepastian yang relatif tinggi yang berpengaruh terhadap penentuan harga jual adalah biaya yang berperan memberikan informasi batas bawah suatu harga jual yang harus diputuskan.

Biaya overhead adalah salah satu komponen harga pokok produksi yang secara langsung memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. Alur hubungan biaya overhead dengan harga jual sebagai harga pokok produksi yang terbentuk dari pemakaian bahan baku dan bahan penolong,

ditambah gaji tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produksi, ditambah lagi dengan biaya overhead pabrik, akan dihasilkan Harga Pokok Produksi. maka besarnya biaya overhead pabrik, terutama dalam variable penggunaan bahan bakar untuk produksi harus terukur untuk menghindari terjadinya pemborosan yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Dalam keperluan menurunkan biaya overhead pabrik tersebut, salah satu langkah paling tepat yang harus diambil oleh manajemen perusahaan adalah melakukan inovasi atau perubahan dalam mekanisme produksinya sehingga efisiensi dapat dicapai. Efisiensi merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai laba yang diharapkan, maka tugas berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh manajemen adalah bagaimana caranya agar tindakan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam mencapai atau memperoleh laba maksimal. Salah satu teknik kebijakan efisiensi yang dapat diambil adalah menurunkan anggaran bahan bakar untuk keperluan produksi. Mayoritas mesin produksi, khususnya mesin Steam Boiler saat ini beroperasi dengan bantuan bahan bakar konvensional (Sludge oil, dll) namun karena perbandingan harga yang lebih murah maka saat ini banyak perusahaan industri yang mulai beralih menggunakan teknologi Gasifikasi yang berbahan bakar dasar batu bara (Perpres No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional).

Penentuan harga jual merupakan masalah kompleks, karena penetapan dari harga jual memerlukan pertimbangan dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi biaya-biaya lain yang relevan, laba yang diinginkan, tujuan perusahaan dan lain sebagainya. Faktor eksternal perusahaan diantaranya persaingan, luasnya pasar, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Tujuan penetapan harga jual bisa mendukung strategi pemasaran berorientasi pada permintaan primer apabila perusahaan meyakini bahwa harga yang lebih murah dapat meningkatkan jumlah pemakai atau tingkat pemakaian atau pembelian ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu. Perubahan harga jual mempunyai tujuan untuk menyesuaikan agar harga baru yang ditetapkan dapat mencerminkan biaya saat ini (current cost) atau biaya masa depan (future cost), return yang diinginkan oleh perusahaan, reaksi pesaing dan sebagainya. Stabilitas posisi sebuah produk di pasar hingga keberhasilan strategi perluasan market share salah satu nya ditentukan oleh faktor penetapan harga jual. Dengan kuatnya keberadaan pesaing saat ini telah menyebabkan ketersediaan barang substitusi semakin banyak. Hal ini harus benar benar dicermati oleh manajemen perusahaan, karena dengan kondisi seperti itu menyebabkan tingkat ketergantungan konsumen akan sebuah produk tidak lagi menjadi hal mutlak.

1. Penelitian Terdahulu Yang Signifikan

- a. In Jumanda K, Mahasiswa Teknik Kimia - Politeknik Negeri Bandung melakukan penelitian berjudul Analisis Sistem Reaksi Gasifikasi Batubara Dan Biomassa (Study Pemodelan & Simulasi). Tujuan penelitian untuk mendapatkan kondisi operasi yang optimal (Temperatur dan tekanan Rasio kebutuhan oksigen dan air) untuk proses gasifikasi dan mengkaji sistem Autothermic Gasification serta membandingkan hasil gasifikasi batu bara dengan biomassa. Berdasarkan keempat analisis sensitivitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada proses gasifikasi menggunakan steam (tanpa oksigen), komposisi produk CO dan H₂ pada syngas terus meningkat seiring dengan peningkatan suhu, baik pada tekanan rendah (1 bar) maupun pada tekanan otinggi (30 bar). Pada suhu 1200 C dan tekanan 1 bar, total komposisi gas CO dan H₂ hampir mencapai 100 % dan komposisi gas lainnya hampir 0. Pada tekanan 30 bar, total komposisi gas CO dan H₂ makin mendekati 100 % pada temperatur yang lebih tinggi (15000 C) dibandingkan pada tekanan rendah.
- b. D. Pakiti, F. Pangkerego, D. Tooy dan D. Ludong, Mahasiswa Program Studi Pertanian UNSRAT pada tahun 2016 pernah membuat jurnal penelitian berjudul Analisis Konsumsi Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Dengan

Substitusi Gasifikasi Sabut Kelapa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsumsi energy dari biomassa gas yang dihasilkan dan perbandingan dengan bahan bakar diesel.. Hasil penelitian dengan kadar air 112,34% menunjukkan bahwa semakin tinggi beban listrik yang digunakan, maka semakin besar bahan bakar yang digunakan. Pengurangan diesel yang dihasilkan pada beban 500W adalah 50,87%, dan pengurangan konsumsi bahan bakar diesel beban 1000W, 1500W dan 2000W adalah 48,81%, 46,98%, dan 44,48%.

- c. Dionisius Ramaditya Putra Fatruan, Mahasiswa Program Sarjana Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2013 menerbitkan jurnal penelitian berjudul Perancangan Sistem Gasifikasi Batu Bara Sebagai Penghasil Syngas Untuk Suplai Bahan Bakar Mesin Diesel. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah downdraft gasifier yang bertujuan untuk menyuplai sebuah diesel engine berkapasitas 50 kVA. Penelitian memfokuskan pada rancangan reaktor yang berfungsi untuk membakar batubara dan melakukan proses gasifikasi agar menghasilkan gas mampu bakar yang mempunyai nilai kalor yang sesuai dengan kebutuhan engine.
- d. Imam Kholiq, Mahasiswa Fakultas Teknik - Universitas Wijaya Putra Surabaya Jawa Timur pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM. Kesimpulan adalah Terdapat beberapa sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan yang bisa diterapkan segera di tanah air, seperti bioethanol, biodiesel, tenaga panas bumi, tenaga surya, mikrohidro, tenaga angin, dan sampah/limbah. Penggunaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan juga berarti menyelamatkan lingkungan hidup dari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan BBM.

2. Tujuan Penetapan Harga Jual

Harga Jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya biaya produksi ditambah biaya non produksi dan ditambahkan dengan laba yang diharapkan (Mulyadi, 2005b).

Menurut (Simamora, 2005), ada empat tujuan penetapan harga jual, yaitu:

- a. Memaksimalkan laba atau keuntungan.
- b. Memaksimalkan pendapatan untuk mendapatkan pertumbuhan pasar.
- c. Memaksimalkan pangsa pasar.
- d. Kepemimpinan Mutu.

Menurut (Supriyono, 2001), Penetapan harga jual merupakan masalah rumit sehingga memerlukan kerjasama dan koordinasi dari ahli statistik,

pemasaran, teknik industri, dan akuntansi, karena harga jual sulit dipastikan dan ditetapkan dalam waktu yang lama (selalu berubah sewaktu-waktu). Keputusan penentuan harga jual sangat penting, karena selain memengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan juga memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. (Fandy & Gregorius, 2012) menjelaskan beberapa alasan mengapa harga perlu dipertimbangkan dengan cermat, yaitu :

- a. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (*a statement of value*). Yang dimaksud sebagai nilai adalah perbandingan antara *perceived benefits* atau persepsi terhadap manfaat potensial.
- b. Harga merupakan aspek yang tampak jelas (*Visible*).
- c. Harga adalah determinan utama permintaan. Berdasarkan hukum permintaan (*The Law Of Demand*), besar kecilnya harga memengaruhi kuantitas produk yang dibeli oleh konsumen.
- d. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba.
- e. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat sesuai dinamika pasar
- f. Harga mempengaruhi citra dan strategi *positioning*.

(Buchari, 2000), mengemukakan tentang pengertian dari kebijakan penetapan harga jual adalah suatu keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu, yaitu dengan maksud untuk mengikuti perkembangan pasar. Kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu panjang tergantung pada keputusan harga jual ini sebagaimana dijelaskan oleh (Mulyadi, 2005a) bahwa harga jual yang ditetapkan harus mampu menutupi semua biaya dan menghasilkan laba jangka panjang, sehingga dapat memberikan *return* yang wajar bagi perusahaan, mempertahankan dan mengembangkan perusahaan.

3. Faktor Yang Memengaruhi Penetapan Harga Jual

(Supriyono, 2001) menjelaskan penentuan harga jual yang berhubungan dengan hal berikut :

- a. Kebijakan penentuan harga jual.
- b. Keputusan penentuan harga jual

(Kamaruddin, 1996), menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi harga jual, yaitu:

- a. Tujuan perusahaan.
- b. Situasi pasar.
- c. Biaya produksi dan operasi.

4. Definisi Biaya

(Mulyadi, 1997) menjelaskan, biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. dapat

disimpulkan bahwa terdapat empat unsur dalam biaya, yaitu:

- a. Pengorbanan sumber ekonomis.
- b. Diukur dalam satuan uang.
- c. Telah terjadi atau kemungkinan terjadi.
- d. Untuk mencapai tujuan tertentu

(Supriyono, 2001) membedakan biaya ke dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Biaya dalam arti *cost* (harga pokok) adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu (harga perolehan yang telah terjadi) maupun pada masa yang akan datang (harga perolehan yang akan terjadi).
- b. Sedangkan *expense* (beban) adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan (*revenues*) dalam suatu periode akuntansi tertentu.

5. Penggolongan Biaya

(Mulyadi, 2005b), mendefinisikan berbagai macam cara penggolongan biaya sebagai berikut :

- a. Penggolongan biaya menurut obyek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama obyek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama obyek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”.
- b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan industri ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi pokok produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum.
 - 1) Biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi terdiri atas:
 - a) Biaya Bahan Baku Langsung, Suatu biaya produksi disebut sebagai biaya bahan baku langsung jika bahan tersebut merupakan bagian integral yang dapat dilihat atau diukur secara jelas dan mudah serta dapat ditelusuri baik fisik maupun nilainya dalam wujud produksi yang dihasilkan.
 - b) Merupakan biaya yang dikeluarkan atau dibebankan karena adanya pembayaran upah kepada tenaga kerja yang langsung ikut serta bekerja dalam membentuk produksi akhir. Biaya ini dapat ditelusuri secara jelas, karena dapat diukur dengan waktu yang digunakannya dalam keikutsertaannya secara langsung yang membentuk produksi akhir.
 - c) Biaya *Overhead* adalah semua biaya pabrik yang bukan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang timbul dan dibebankan terhadap pabrik karena sifatnya sebagai bagian yang memiliki eksistensi dalam produksi akhir maupun

hanya memberikan pelayanan guna menunjang, memperlancar, mempermudah atau sebagai penggerak kegiatan itu sendiri.

- 2) Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau jasa. Biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya promosi, biaya gaji bagian pemasaran, biaya contoh (*sample*).
 - 3) Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan untuk mengoperasikan perusahaan. Contoh biaya administrasi dan umum, yakni biaya gaji bagian akuntansi dan biaya *foto copy*.
- c. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, maka biaya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :
- 1) Biaya langsung, yaitu biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena sesuatu yang dibiayai.
 - 2) Biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.

6. Unsur Biaya Overhead

(Usry, 2004), menjelaskan Biaya *Overhead* Pabrik (*Factory Overhead*) dinamakan juga biaya pabrikasi (*manufacturing overhead*) dapat didefinisikan sebagai biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja yang tidak dapat dinyatakan bahwa biaya *overhead* pabrik mencakup semua biaya pabrikasi kecuali produksi langsung dan tenaga kerja langsung. Yang termasuk dalam biaya *overhead* sebagaimana dijelaskan oleh (Sutrisno, 2000), adalah biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung lainnya, perlengkapan (*supplies*) pabrik, penyusutan, listrik dan air, biaya pemeliharaan dan suku cadang, dan lain lain. (Mulyadi, 2005b) menggolongkan biaya *overhead* pabrik sebagai berikut :

a. Menurut sifatnya

Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan biaya *overhead* pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya *overhead* pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut :

- 1) Biaya bahan penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.
- 2) Biaya reparasi dan pemeliharaan
- 3) Biaya tenaga kerja tidak langsung

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari: upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut.

- 4) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya-biaya yang termasuk kedalam kelompok ini adalah biaya-biaya depresiasi emplesemen pabrik, bangunan pabrik dan peralatan, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.
- 5) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen asuransi mesin dan peralatan, asuransi kendaraan, asuransi kecelekaan karyawan dan biaya amortisasi kerugian *trial-run*.
- 6) Biaya *overhead* pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, biaya *overhead* pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik, dan sebagainya.

b. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya *overhead* pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya *overhead* pabrik dapat dibagi menjadi tiga golongan:

- 1) Biaya *overhead* pabrik variabel adalah adalah biaya *overhead* pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
- 2) Biaya *overhead* pabrik tetap adalah biaya *overhead* pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu.
- 3) Biaya *overhead* pabrik semi variabel dibiayai *overhead* pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

Untuk keperluan penentuan tarif biaya *overhead* pabrik dan untuk pengendalian biaya, biaya *overhead* pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi dua unsur: biaya tetap dan biaya variabel.

c. Penggolongan biaya *overhead* pabrik menurut hubungannya dengan departemen.

Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, maka biaya *overhead* pabrik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Biaya *overhead* langsung departemen, yaitu biaya *overhead* yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut dan
- 2) Biaya *overhead* tidak langsung departemen, yaitu biaya *overhead* pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen.

7. Konsep Umum Efisiensi

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. (Adiwarman, 2006) membahasakan "*Efficient is doing the things right*", yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil optimal. (Musa & Muhamad, 2014), menjelaskan bahwa strategi di tingkat bisnis (*business level strategy*) sebagai sekumpulan komitmen dan tindakan perusahaan yang terpadu dan terkoordinasi yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengeksploitasi komponen inti dalam pasar produk kompetitif.

Di dalam teori ekonomi, ada dua konsep umum mengenai efisiensi, yakni efisiensi yang ditinjau dari konsep ekonomi (*economic concept*) dan efisiensi yang ditinjau dari konsep produksi (*production concept*). Efisiensi yang ditinjau dengan konsep ekonomi mempunyai cakupan lebih luas yang ditinjau dari segi makro dan sementara itu efisiensi dari sudut pandang produksi melihat dari sudut pandang mikro. Efisiensi dalam konsep produksi terbatas pada melihat hubungan teknis dan operasional dalam suatu proses produksi, yaitu konversi *input* menjadi *output* (Sutawijaya & Lestari, 2009)

Efisiensi di dalam konsep produksi cenderung menilai secara teknis dan operasional, sehingga efisiensi di dalam konsep produksi umumnya dilihat dari sudut pandang teknis dan biaya. Menurut (Sadono, 2008), di dalam proses produksi, efisiensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Efisiensi Produktif

Hal ini menilai efisiensi di dalam tahapan produksi. Penilaian efisiensi produktif dapat dilihat dari sisi biaya. Untuk mencapai efisiensi produktif ini harus dipenuhi dua syarat. Pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah paling minimum. Kedua, perusahaan atau industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata paling rendah.

- b. Efisiensi Alokatif menilai efisiensi secara teknis di dalam proses produksi, yakni dari segi pengalokasian sumber-sumber daya tersedia. Efisiensi alokatif akan tercapai ketika alokasi sumber-sumber daya tersebut ke berbagai kegiatan ekonomi/produksi telah mencapai tingkat yang maksimum/optimum.

8. Efisiensi Biaya

(Sadono, 2008), menyatakan bahwa sebuah perusahaan dikatakan mencapai skala ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala ekonomis dapat tercapai, ketika output dapat digandakan dengan biaya (*cost per unit*) kurang dari dua kali lipat atau, perusahaan yang memproduksi dalam skala ekonomis, ketika setiap adanya tambahan produksi, biaya produksi justru semakin menurun, sehingga pada akhirnya membawa pada kondisi yang efisien. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksinya pada skala produksi ekonomis akan senantiasa berada dalam kondisi efisien, sebab kegiatan produksi dilakukan dengan biaya yang rendah. Beberapa faktor penting yang dapat menimbulkan skala ekonomi adalah:

a. Spesialisasi faktor - faktor produksi.

Spesialisasi dilakukan dengan melakukan pembagian unit-unit kerja kedalam bidang-bidang tertentu secara khusus.

b. Penambahan kapasitas produksi (skala usaha).

Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi semakin bertambah efisien. Paling tidak, ada beberapa alasan, yakni biaya *input* yang semakin murah. Makin tinggi produksi, makin banyak *input* yang digunakan, seperti bahan baku, mesin dan peralatan lainnya. Harga dari barang-barang tersebut akan menjadi murah apabila pembelian dalam kapasitas yang banyak.

c. Penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia lebih optimal.

Terkadang produksi dalam kapasitas lebih kecil menimbulkan bahan-bahan yang terbuang (*waste*), sehingga hal tersebut tidak efisien. Namun ketika memproduksi dengan kapasitas besar maka penggunaan bahan-bahan *input* dapat lebih optimal.

9. Pengertian Teknologi Gasifikasi

Gasifikasi adalah proses yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi untuk menghasilkan campuran gas (gas sintesis) dengan mereaksikan campuran gas (gas sintesis) dengan mereaksikan *steam*, oksigen, dan material yang mengandung karbon (Tambunan, 2007).

Teknik Gasifikasi adalah proses konversi bahan bakar padat menjadi gas melalui reaksi dengan satu atau campuran reaktan udara, oksigen, uap air dengan

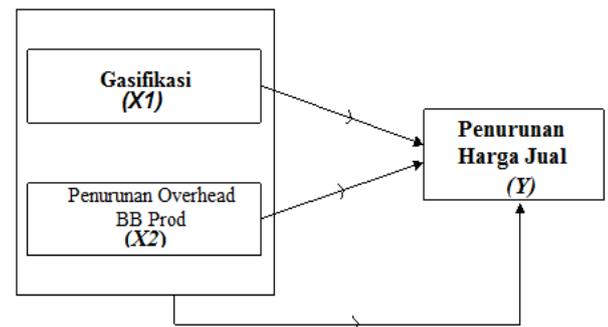
tujuan menghasilkan produk gas menurut penggunaannya sebagai salah satu sumber energi (Raharjo, 2008). Sebagaimana dijelaskan dalam Kepmen ESDM No.1128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional bahwa pada masa mendatang, produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestik), tetapi juga untuk memenuhi permintaan luar negeri (ekspor). Hal ini mengingat sumber daya batubara Indonesia yang masih melimpah. Sumber daya batubara cukup melimpah, yaitu 61,3 miliar ton, dengan cadangan 6,7 miliar ton (Pusat Sumber Daya Geologi, 2005), di lain pihak harga BBM yang tetap tinggi, menuntut industri yang selama ini berbahan bakar minyak untuk beralih menggunakan batubara.

Variabel yang memengaruhi proses gasifikasi diklasifikasikan menjadi empat kelompok (Tambunan, 2007), yaitu:

- Kondisi operasi yang meliputi suhu, tekanan, laju oksidan, laju batubara, dan lain-lain.
- Kondisi fluida penggasifikasi, konsentrasi oksigen, perbandingan oksigen/batubara, perbandingan oksigen/uap air, perbandingan uap air/batubara, dan lain-lain.
- Metoda gasifikasi (teknologi gasifikasi), mencakup jenis pergerakan partikel, tipe gasifier, metoda pasokan oksidan, dan lain-lain.
- Karakteristik batubara, antara lain reaktifitas, kandungan air, oksigen, zat-zat volatil dan sulfur, ukuran partikel, kekerasan batubara, sifat caking, karakteristik abu, dan lain-lain.

10. Manfaat Teknologi Gasifikasi

Proses gasifikasi batubara bertujuan untuk mengkonversi secara termokimia bahan batubara padat menjadi bahan gas, sehingga mudah terbakar (Raharjo, 2008). Proses gasifikasi batubara memanfaatkan batubara mutu kalor rendah dengan teknologi bersih (*clean coal technology*), sehingga akan dihasilkan produk gas dengan emisi yang rendah dan kemudian gas hasil gasifikasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan sebagai sumber bahan bakar, seperti untuk menjalankan mesin pembakaran, digunakan untuk memasak sebagai bahan bakar kompor, ataupun digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sederhana (Inpres No.2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain). Melalui gasifikasi, perusahaan dapat mengkonversi hampir semua bahan organik kering menjadi bahan bakar, sehingga dapat menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber bahan bakar sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya produksi.



Sumber: (Sugiyono, 2013)

Gambar 1. Kerangka Berpikir dan Hipotesis

11. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah;

- H₁: Terdapat pengaruh signifikan dari teknologi gasifikasi terhadap kebijakan penurunan harga jual.
- H₂: Terdapat pengaruh signifikan dari turunnya biaya *overhead* bahan bakar produksi terhadap kebijakan penurunan harga jual.
- H₃: Terdapat pengaruh signifikan dari teknologi gasifikasi dan penurunan biaya *overhead* bahan bakar produksi secara bersama-sama terhadap kebijakan penurunan harga jual.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diolah dengan *Software Statistical Package For Social Sciences* (SPSS).

Hipotesis Statistik

1. Hipotesis pertama:

- H₀: Tidak terdapat pengaruh *teknologi gasifikasi* terhadap *kebijakan penurunan harga jual*.
- H_a: Terdapat pengaruh *teknologi gasifikasi* terhadap *kebijakan penurunan harga jual*.

2. Hipotesis kedua:

- H₀: Tidak terdapat pengaruh *penurunan biaya overhead bahan bakar produksi* terhadap *kebijakan penurunan harga jual*.
- H_a: Terdapat pengaruh *penurunan biaya overhead bahan bakar produksi* terhadap *kebijakan penurunan harga jual*.

3. Hipotesis ketiga:

- H₀: Tidak terdapat pengaruh *teknologi gasifikasi* dan *penurunan biaya overhead bahan bakar produksi* secara bersama-sama terhadap *kebijakan penurunan harga jual*.
- H_a: Terdapat pengaruh *teknologi gasifikasi* dan *penurunan biaya overhead bahan bakar produksi*

secara bersama-sama terhadap *kebijakan penurunan harga jual*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan output perhitungan pada tabel 4.5, diketahui nilai DW sebesar 2.304, dengan nilai signifikansi 0.05, jumlah sampel $N = 6$ dan jumlah variabel bebas adalah 2 ($K=2$), berdasarkan tabel Dubin Watson diperoleh nilai $DU = 0$. Dengan nilai DW yang lebih besar dari DU bisa disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

2. Pengujian Normalitas Data

Dari output pada tabel 4.2, diketahui nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.946 yang lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N	6	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00369062
Most Extreme Differences	Absolute	.214
	Positive	.157
	Negative	-.214
	Kolmogorov-Smirnov Z	.524
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.946

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan output pengujian dalam table 4.3 diketahui :

- Besaran koefisien korelasi antar variabel bebas, terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar 0,038 jauh di bawah 0,60. Disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.
- Menggunakan besaran *tolerance* (a) dan *variance inflation factor* (VIF) jika menggunakan $\alpha/\text{tolerance} = 10\%$ atau 0,10 maka $VIF = 10$. Dari hasil output VIF hitung dari kedua variabel = $1,001 < VIF = 10$ dan semua tolerance variabel bebas $0,999 = 99\%$ diatas 10%, dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 2
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Prod Dgn Gasifikasi	.999	1.001
	Avg Eff BBM	.999	1.001

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

Coefficient Correlations^a

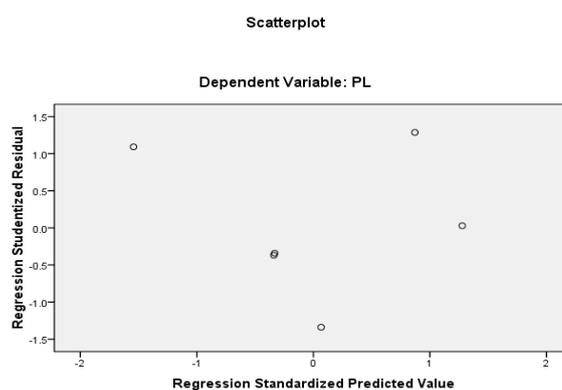
Model		Avg Eff BBM	Prod Dgn Gasifikasi
1	Correlations		
		Avg Eff BBM	1.000
		Prod Dgn Gasifikasi	.038
1	Covariances		
		Avg Eff BBM	.080
		Prod Dgn Gasifikasi	.002

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

4. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil output gambar scatterplot pada table 4.4, didapat titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat disimpulkan variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Tabel 3



Sumber : Diolah menggunakan SPSS

5. Pengujian Koefisien Determinasi

Dari kolom *Adjusted R Square* pada Tabel 4.5 diperoleh hasil pengujian besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen atau korelasi determinasi 0,909, artinya variabel Kebijakan Penurunan Harga Jual (Y) dijelaskan 90% oleh variabel Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2), sedangkan sisanya (10%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4
Model Summary^b

Mod el	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.954 ^a	.909	.849	.00476

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

6. Uji Hipotesis F (Uji F)

a. Penentuan Hipotesis.

1) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$

Artinya, diduga bahwa seluruh variabel independen, yaitu Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2) secara serempak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan penurunan harga jual (Y).

2) $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$

Artinya, diduga bahwa seluruh variabel independen yaitu Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2) secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan penurunan harga jual (Y).

b. Teknik pengambilan keputusan

1) Probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima.

2) Probabilitas ≤ 0.05 maka H_0 ditolak.

3) Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} ,

dengan rumus :

$$df\ 1 = (K-1)$$

$$df\ 2 = (n-K)$$

Dimana :

df = *Degree of Freedom*.

N = Jumlah Sampel.

K = Jumlah Variabel.

Hasil hitung df 1 dan df 2 kemudian digunakan untuk mencari angka pada F_{tabel} dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05). Jika nilai $F_{table} < F_{hitung}$, maka kesimpulannya seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Hasil pengujian hipotesis F

Tabel 5
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	2	.000	15.019	.027 ^a
	Residual	.000	3	.000		
	Total	.001	5			

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

Nilai signifikansi perhitungan uji F pada Tabel 5 menunjukkan angka 0,027, dimana nilai

tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yang ditetapkan yaitu 0.05 sehingga dalam penelitian ini H_0 ditolak, berarti secara serempak variabel X_1 dan X_2 mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y . Jadi terbukti bahwa Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kebijakan Penurunan Harga Jual (Y). Selain itu, melalui hasil perbandingan nilai F_{tabel} yaitu 9.552 yang lebih kecil daripada F_{hitung} yaitu 15.019, diperoleh kesimpulan yang sama yaitu menolak H_0 .

7. Uji Regresi Linear Berganda

Perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (independen) yaitu Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Penurunan harga jual (Y), Model pengaruh antar variabel dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_n + e$$

Dimana :

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Produksi dengan gasifikasi

X_2 = Efisiensi *overhead* bahan bakar

e = *Error*

Hasil pengujian regresi linier berganda untuk penelitian ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 6 Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Standard ized		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.231	.963	1.278	.291
	Prod Ln	.940	.182	.897	5.152
	Avg Eff Ln	-.474	.283	-.291	1.674

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

Bentuk regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 1,231 + 0,940X_1 - 0,474X_2$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi diatas bahwa :

a. Y = Keputusan Penurunan Harga Jual

Adalah variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2).

b. Konstanta = 1,231 Menyatakan bahwa jika Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dan *Average Efisiensi* (X_2) nilainya adalah 0, maka

- memengaruhi Keputusan penurunan harga jual(Y) sebesar 1,231.
- c. $\beta_1 = 0.940$
Koefisien dengan tanda positif menunjukkan pengaruh yang positif antara Produksi dengan Gasifikasi (X_1) dengan Keputusan penurunan harga jual(Y). Jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel Produksi dengan Gasifikasi mengalami kenaikan 1% maka variabel Keputusan penurunan harga jual(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,940, demikian sebaliknya.
- d. $\beta_2 = -0.474$
Koefisien dengan tanda negatif menunjukkan pengaruh negatif antara *Average Efisiensi* (X_2) dengan Keputusan penurunan harga jual (Y). Hasil koefisien regresi *Average Efisiensi* (X_2) sebesar -0.474, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel *Average Efisiensi* mengalami kenaikan 1%, maka variabel Keputusan penurunan harga jual akan turun sebesar -0.474

8. Uji T

Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan.

a. Teknik Pengambilan Keputusan

Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis tidak terbukti dan H_0 diterima.

Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis terbukti dan H_0 ditolak.

b. Hasil Uji T

Berdasarkan hasil tabel 4.5, nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($5,152 > 2,571$) dengan perhitungan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,014). Nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($-1,674 < 2,571$) dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,193. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Produksi dengan gasifikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan penurunan harga jual.
- 2) Efisiensi biaya *overhead* bahan bakar produksi yang diperoleh secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan penurunan harga jual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh aplikasi teknologi gasifikasi dan penurunan biaya *overhead* bahan bakar produksi yang dihasilkan terhadap kebijakan harga jual, dapat dibuat kesimpulan berikut:

1. Produksi dengan teknik gasifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan harga

jual. Hal ini disebabkan alih teknologi dari bahan bakar konvensional ke batubara sehingga menyebabkan tercapainya penghematan biaya produksi karena harga beli batubara yang lebih murah dibandingkan harga beli bahan bakar konvensional seperti solar, bensin, dan sebagainya.

2. Efisiensi *overhead* bahan bakar yang dihasilkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga jual. Hal ini bisa diakibatkan oleh terlalu besarnya kemauan pemilik perusahaan memanfaatkan kondisi efisiensi yang sudah tercapai namun tidak di jadikan pertimbangan bisnis untuk menurunkan harga jual melainkan tetap memanfaatkan situasi untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi lagi.
3. Terlihat dengan jelas bahwa dengan melakukan inovasi dalam pemilihan sumber bahan bakar dapat membantu perusahaan menekan ongkos produksi sehingga harga jual secara teoritis dapat ditekan.

Saran yang bisa disampaikan adalah

1. Manajemen perusahaan perlu membuka wawasan inovasi serta merubah pola pikir konvensional terhadap kemajuan teknologi, demi mendapatkan faidah yang lebih besar bagi rencana kerja yang telah ditargetkan yaitu selain pencapaian efisiensi juga memenangkan atau mengamankan posisi persaingan pasar.
2. Pemilik perusahaan atau pelaku bisnis umumnya harus lebih bersikap realistis serta dapat menurunkan ego dalam menetapkan margin laba karena jika dipaksakan dapat berimbas pada menurunnya *market share* serta loyalitas *customer*.
3. Gabungan antara penerapan *high technology* dengan efek positifnya yaitu efisiensi biaya *overhead* bahan bakar dapat menjadi dasar bagi para pemegang jabatan strategis dalam sebuah perusahaan untuk lebih mengembangkan pemahaman bisnisnya bahwa tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan bukan semata mencari laba namun ada faktor yang harus lebih di prioritaskan yaitu memelihara *customer*.

REFERENSI

- Adiwarman, K. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Buchari, A. (2000). *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV Alfabeta.
- Fandy, T., & Gregorius, C. (2012). *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Andi.
- Kamaruddin, A. (1996). *Akuntansi Manajemen, Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (1997). *Akuntansi Biaya* (V). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Mulyadi. (2005a). *Akuntansi Biaya* (Edisi 5). Yogyakarta: UPPAMP YKPN Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi. (2005b). *Sistem Akuntansi* (III). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Musa, H., & Muhamad, N. (2014). *Manajemen Strategik*. Elex Media Komputindo.
- Raharjo. (2008). Pengaruh Katalis Terhadap Produksi Hidrogen pada Gasifikasi Tandan Kosong Sawit.
- Sadono, S. (2008). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Simamora. (2005). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyono. (2001). *Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan)* (Edisi II). Jogjakarta: BPFE Jogjakarta.
- Sutawijaya, & Lestari. (2009). Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 10*.
- Sutrisno. (2000). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syafuddin. (2019). Penerapan Teknologi Gasifikasi Dalam Mencapai Efisiensi Biaya Overhead Bahan Bakar Produksi Serta Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Harga Jual. *Moneter*, 6(6), 53–62.
- Tambunan, B. H. (2007). Prospek Energi Berbasis Biomassa Di Indonesia. *Universitas Negeri Medan*.
- Usry. (2004). *Akuntansi Biaya : Anggaran Dan Biaya Standar* (XIII). Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS

Syafuddin, Lahir di Jakarta 29 November 1975. Riwayat Pendidikan S1 Universitas Gunadarma Tahun 1999 dan Magister Manajemen Universitas BSI Bandung tahun 2017.

Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan

Dinar Riftiasari

Universitas Bina Sarana Informatika
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Email: dinar.drf@bsi.ac.id

(Riftia, 2019) Riftia, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter*, 6(1), 63–68.

Abstract - Tax is the main source of state revenue used to finance state expenditures, tax classification based on collection, tax consists of central tax and local tax. Central tax is a tax managed by the central government to finance expenses state budget and local tax is a tax managed by the regional government to finance expenses local government budget. The Value Added Tax is central tax, tax payment amount payable by the amount of the tax credit shows the amount of excess have been made that should tax refunds. The purpose of this study was to determine the effect of value added tax restitution of value added tax revenue and procedure for implementing value added tax restitution in the Tax Office Pratama Jakarta Penjaringan. Method used in the study is a quantitative method. This research is value added tax restitution that occurred output tax is greater than input tax in the Tax Office Pratama Jakarta Penjaringan the implementation of restitution does not has any effect toward value added tax revenue. The Standar Operating Procedures of value added tax restitution in the Tax Office Pratama Jakarta Penjaringan is Standar Operating Procedures No KPP50-0004.

Keywords: Value Added Tax , Restitution, Tax Revenues

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai dimana penerimaan Pajak pusat hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang mana dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sumber penerimaan pajak pusat salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diatur dalam Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, PKP memiliki kewajiban menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara, dalam hal penyetoran atau pembayaran PPN ternyata pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka PPN mengalami kurang bayar sebaliknya jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka

kelebihan bayar PPN dapat dikompensasikan atau direstitusi.

PKP yang memiliki jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang berhak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau restitusi. Restitusi dapat dilakukan jika PKP tidak memiliki hutang pajak lainnya, selain itu ada prosedur lainnya yang harus dipenuhi apabila PKP ingin mengajukan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Penjaringan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Jakarta Penjaringan? dan Bagaimana Prosedur pelaksanaan Restitusi PPN pada KPP Jakarta Penjaringan?

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia dalam (Sukardji, 2014) dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung
- b. Pajak objektif
- c. Multi stage tax
- d. PPN terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*
- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri
- f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral
- g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Priantara, 2015) subjek PPN yang bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN

a. Pengusaha

Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

b. PKP

Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

c. Bukan PKP

Dijelaskan dalam UU PPN bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Ini berarti tidak semua pengusaha adalah PKP. Contohnya pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah sakit, dokter praktek. Pada contoh tersebut barang atau jasa yang diserahkan bukan BKP atau JKP. Pengusaha yang tidak menghasilkan BKP dan/atau JKP meskipun tidak termasuk pengusaha kecil adalah bukan PKP. Dengan demikian, yang termasuk bukan PKP adalah Pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan Pengusaha yang menghasilkan dan/atau menyerahkan bukan BKP dan/atau bukan JKP

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Waluyo, 2010) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha kena Pajak

5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam (Mardiasmo, 2018) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah:

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk di tambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengekspor
- e. Nilai lain yang diatur dengan Peraturan menteri Keuangan

6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN berdasarkan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah
- d. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar

untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2018)

7. Batas Waktu Penyetoran Dan Pelaporan SPT Masa PPN

Batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai PER Dirjen Pajak No.14/PJ/2010 dalam (Pohan, 2016) sebagai berikut:

- PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- SPT Masa PPN harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya

Keterlambatan pelaporan SPT masa PPN dikenai denda Rp 500.000, sedangkan keterlambatan penyetoran PPN dikenai denda bunga 2% per bulan dari PPN yang terutang.

8. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam (Sukardji, 2014) Apabila jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Kelebihan pembayaran Pajak Masukan pada suatu masa pajak, dapat disebabkan oleh:

- Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran
- PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong mewah
- Kesalahan Pemungutan

Berdasarkan (Wisanggeni, 2018) pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak:

- Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP setempat
- DJP setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- SKPLB diterbitkan oleh DJP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan DJP
- Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, DJP tidak memberikan

keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

Dalam sistem PPN, terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak masukan menurut Alan Schenk dan Oliver Oldman dalam (Darussalam, Septriadi, & Dhora, 2018) sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut

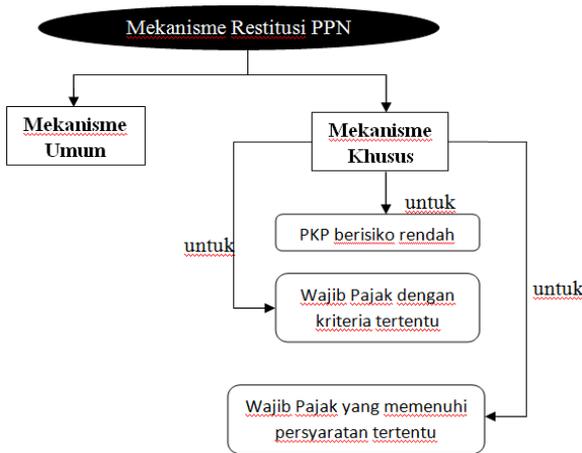


Gambar 1 Metode Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan dalam Sistem PPN

Menurut (Pohan, 2016) Wajib pajak tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian bila diperlukan. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang KUP yaitu 2% per bulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP. Kriteria umum bagi manajemen dalam memutuskan perlu tidaknya mengajukan permohonan restitusi PPN adalah:

- Bila besarnya PPN yang lebih bayar tersebut cukup signifikan/material jumlahnya
- Bila kondisi keuangan perusahaan mengalami gangguan *cash flow*
- Bila sudah diyakini kesiapan perusahaan untuk diperiksa oleh fiskus
- Bila prediksi masa depan pembayaran PPN menunjukkan lebih bayar PPN

Mekanisme restitusi dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme umum dan mekanisme khusus. Mekanisme khusus merupakan mekanisme restitusi yang berlaku bagi PKP berisiko rendah, wajib pajak dengan kriteria tertentu, dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu menurut (Darussalam, Septriadi, & Dhora, 2018)

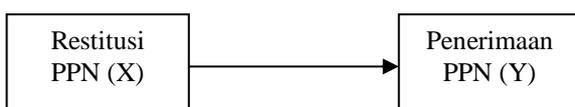


Gambar 2 Mekanisme Restitusi PPN

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif mengenai pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai rekapitulasi Restitusi PPN dan Penerimaan PPN tahun 2013-2017 yang diperoleh peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Restitusi dan penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Sampel penelitian ini adalah hasil Penerimaan Restitusi dan PPN pada tahun 2013-2017.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) Restitusi PPN dan variabel dependen (Y) Penerimaan PPN. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana, cara mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu Restitusi PPN dan variabel terikat yaitu Penerimaan PPN. Menurut Priyatno dalam (Jusmani & Qurniawan, 2016) Analisis Regresi Linier Sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. dengan bentuk persamaan:

$$Y = a + bX$$

Y= variabel dependent (PPN)

X = variabel independent (Restitusi PPN)

A = nilai konstanta

B = koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Restitusi PPN Dan Penerimaan PPN

Nilai restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan tahun pajak 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Data Penerimaan dan Restitusi PPN

Tahun	Restitusi PPN	Penerimaan PPN
2013	Rp 2.865.129.701	Rp 351.272.894.175
2014	Rp 14.813.747.707	Rp 391.441.516.832
2015	Rp 64.861.123.977	Rp 637.971.141.868
2016	Rp 74.030.412.977	Rp 522.256.167.324
2017	Rp 56.715.110.738	Rp 839.782.549.428

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Penjaringan

2. Pengaruh Restitusi PPN Terhadap Penerimaan PPN

Dalam penelitian ini data Restitusi PPN dan Penerimaan PPN di uji menggunakan bantuan program SPSS Statistics 21 yang diolah dengan menggunakan uji analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,694 ^a	,482	,309	6,00581

a. Predictors: (Constant), Restitusi PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai korelasi R adalah 0,694 atau 69,4% dapat diinterpretasikan bahwa Restitusi PPN (X) memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan PPN (Y) di KPP Pratama Jakarta Penjaringan karena berada diatas 0,50. Nilai R Square atau R² sama dengan 0,482 atau 48,2% artinya bahwa variabel bebas yaitu Restitusi PPN (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 48,2% terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y) dan 51,8% lainnya dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain diluar variabel Restitusi PPN (X).

Tabel 3

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	100,653	1	100,653	2,791	,193 ^b
Residual	108,209	3	36,070		
Total	208,863	4			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Restitusi PPN

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,193 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan dimana model regresi linier tidak mempengaruhi variabel dependent. Dengan demikian Restitusi PPN tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

Tabel 4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,262	4,846		2,736	,072
	x	,337	,202	,694	1,670	,193

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4 maka dapat diperoleh persamaan regresi linear antara variabel independent dan variabel dependent adalah $Y = 13,262 + 0,337 X$ dapat diketahui bahwa hubungan antara hasil Restitusi PPN bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan hasil Restitusi PPN akan meningkatkan Penerimaan PPN sebesar 0,337%. Dari hasil output didapat signifikansi untuk restitusi PPN yaitu sebesar 0,193 > 0,05 yang berarti Restitusi PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

3. Prosedur Pelaksanaan Restitusi PPN

Prosedur dalam pelaksanaan Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Penjaringan berdasarkan pedoman SOP (*Standar Operating Procedures*) Nomor KPP50-0004 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan PPN untuk selain Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu di KPP Pratama Jakarta Penjaringan terdapat 4 tahapan yaitu:

a. Tahap Permohonan

- 1) Pemohon yang memiliki Kelebihan Pembayaran PPN dapat mengajukan 2 hal, yaitu kompensasi dan juga Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi). PKP yang memiliki Kelebihan Pembayaran dapat menentukan sendiri untuk melakukan kompensasi atau restitusi.

- 2) Kompensasi dipilih untuk menutupi ulang pajak tahun-tahun berikutnya seandainya terjadi kekurangan pembayaran pajak, sedangkan untuk restitusi salah satu alasan PKP melakukannya adalah karena situasi dari perusahaan tersebut yang kemungkinan membutuhkan dana.
- 3) Penulis berfokus pada Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi).
- 4) Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN beserta lampirannya atau Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- 5) Kelengkapan dari permohonan restitusi dapat diserahkan setelah diterimanya permohonan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima.
- 6) Jika pemohon tidak melengkapi atau kurang melengkapi kelengkapan permohonan, maka pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diterima.
- 7) Jika kelengkapan permohonan disampaikan dalam jangka waktu lebih satu bulan sejak diterimanya permohonan, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding.

b. Tahap Pemeriksaan

- 1) Setelah SPT Masa diterima dan direkam, SPT Masa lebih bayar selanjutnya diserahkan ke seksi pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
- 2) Seksi Pemeriksaan selanjutnya menyerahkan Nota Penghitungan dan LPH sebagai produk dari SOP Tata Cara Pemeriksaan kepada seksi pelayanan.
- 3) Seksi pemeriksaan hanya diberikan waktu 4 bulan untuk mengurus hal tersebut, dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan jika hal tersebut tidak dikeluarkan keputusan tersebut maka permohonan WP dianggap diterima.

c. Tahap Penetapan

- 1) Seksi pelayanan kemudian memproses nota penghitungan dan LHP sesuai dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- 2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak bisa berupa SKPKB, SKPLB, dan SKPN sesuai dengan Nota Penghitungan dan LHP. Dalam hal produk hukum berupa SKPLB, selanjutnya diproses dengan Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar

Kelebihan Pajak (SPMKP) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- 3) Jangka waktu SPMKP yaitu 1 bulan setelah diterbitkan SKPLB, SKPKB, SKPLB, dan SKPN yang sudah dicetak kemudian diproses sesuai dengan Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
 - 4) Proses selesai. Keseluruh proses di atas harus selesai dalam waktu 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan.
- d. Tahap Pencairan
- a) SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak) dikirimkan kepada kantor KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) untuk kemudian dicairkan.
 - b) KPPN mengirimkan Kelebihan Pajak kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dan dana dikirimkan ke rekening Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Restitusi PPN tidak mempengaruhi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan Nilai signifikansi sebesar 0,193 dan nilai korelasi adalah 0,694 dimana kedua variabel memiliki hubungan yang kuat karena berada diatas 0,50 dengan Nilai R Square 48,2% artinya bahwa Restitusi PPN memiliki pengaruh kontribusi sebesar 48,2% terhadap Penerimaan PPN dan 51,8% lainnya dipengaruhi oleh Faktor-faktor lain diluar variabel Restitusi PPN.
2. Prosedur pelaksanaan Restitusi PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan berdasarkan SOP No KPP50-0004 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan PPN.

REFERENSI

- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2018). *Konsep Dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jusmani, & Qurniawan, R. (2016). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Media Wahana EKonomika*, 13(3), 130–142.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Priantara, D. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Riftia, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter*, 6(1), 63–68.
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Vol. 1994)*. (2009).
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak* (3rd ed.; Ema Sri Suharsi, Ed.). Jakarta.
- Wisanggeni, I. (2018). *PPN Pada Sektor Industri Khusus*. Jakarta: Mitra wacana Media.

PROFIL PENULIS

Dinar Riftiasari, Lulus S1 Akuntansi Univ Trisakti thn 2008, Lulus S2 Manajemen Univ Trisakti thn 2012, Sebagai Dosen Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, jabatan fungsional Asisten Ahli.

Analisis Pengaruh Perubahan dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Popon Rabia Adawia¹, Ayu Azizah² Abdul Rokhim³

¹ Universitas BSI Jakarta
popon.pra@bsi.ac.id

² Universitas BSI Bandung
ayu.azz@bsi.ac.id

³ STIE YPN Karawang
rokhimabdul131@gmail.com

(Adawia, Azizah, & Rokhim, 2019) Adawia, P. R., Azizah, A., & Rokhim, A. (2019). Analisis Pengaruh Perubahan dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. *Moneter*, 6(1), 69–80.

Abstract - This research use 3 variable that is change of working capital and working capital turn as independent variable, Net Profit Margin (NPM) as dependent variable. The purpose of this study is to determine whether or not the influence of changes in working capital and working capital turnover to Net Profit Margin (NPM) at PT. Paper Factory Tjiwi Kimia Tbk. partially or simultaneously. To support the success of this study, collected secondary data in the form of balance sheet and income statement / loss PT. Paper Factory Tjiwi Kimia Tbk. from 2010 to 2016 and company documents relating to the research undertaken. Based on the results of research partially obtained the value of correlation (r) of 0.78 (strong) and 0.49 (enough) with t test results obtained value t arithmetic (t_0) is smaller than t table ($t_0.11,612$ and $t_0.2 0.799 < t_{count} 2.776$), while the simultaneous test obtained $r = 0.81$ (very strong) with F arithmetic (F_0) is also smaller than F table ($F_0 3.05 < F_{table} 6.94$). So it can be concluded that the partial or simultaneous changes in working capital and working capital turnover has no positive and significant impact on Net Profit Margin (NPM) at PT. Paper Factory Tjiwi Kimia Tbk.

Keywords: Change of working capital, working capital turnover and Net Profit Margin (NPM)

PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan mendirikan usahanya adalah mendapatkan laba atau nilai yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, pihak-pihak yang paling dominan adalah pihak manajemen dan para pemegang saham. Pihak manajemen berkewajiban untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dengan melihat kelemahan dan kekuatan yang terdapat dalam perusahaan serta menjalankan kebijaksanaan perusahaan dengan baik dan tepat. Kebijakan tersebut meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan dan sebagainya.

Untuk tetap melanggengkan usahanya, perusahaan dituntut untuk terus melakukan aktivitas usahanya. Dimana dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian misalnya untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, membayar hutang dan sebagainya. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan

operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja (*working capital*) (Harjito, 2014)

Modal kerja yang digunakan diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam waktu yang tidak lama. Uang yang diterima dipergunakan lagi untuk kegiatan operasi perusahaan selanjutnya, dan seterusnya dana tersebut berputar selama operasi perusahaan masih beroperasi. Menurut (Kasmir, 2013) mengatakan mengenai modal, Modal kerja yang diartikan sebagai investasi yang ditanamkan pada aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, pesediaan dan aktiva lancar lainnya. Melalui pengelolaan yang baik, dana yang tertanam dalam bentuk modal kerja tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin melalui aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Manajemen keuangan berperan penting dalam perencanaan dan pengalokasian modal, karena berhasil tidaknya tujuan perusahaan tergantung pada pengelolaan modal kerja yang tersedia. Pengelolaan modal kerja yang baik dapat diketahui dari berapa

lama modal kerja itu berputar. Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi diimbangi dengan modal kerja yang cukup dengan tingkat penjualan yang tinggi sehingga modal cepat kembali ke bentuk semula yakni kas dan piutang. Namun adakalanya perputaran modal kerja yang tinggi bukan berarti efektif akan tetapi sebagai akibat perusahaan kekurangan modal kerja sedangkan tingkat penjualan tinggi. Tingkat perputaran modal kerja yang rendah disebabkan karena banyaknya dana yang tidak dimanfaatkan dalam operasi perusahaan sedangkan tingkat penjualan rendah. Untuk itu, manajemen modal kerja yang efektif dan efisien sangat penting untuk meraih keuntungan (laba) semaksimal mungkin dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (*going concern*).

Perusahaan pada umumnya sangat memperhatikan masalah laba atau *profit*, ini adalah alasan utama kenapa perusahaan didirikan. Jumlah laba atau profit yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan keuntungan yang terus meningkat merupakan faktor yang sangat penting dalam menilai profitabilitas perusahaan. Bagi pimpinan, profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya perusahaan yang dipimpinnya. Bagi penanam modal, profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur prospek modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Menurut Sutrisno, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya (Adawia, 2017) Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri.

Profitabilitas dapat diukur dengan *Net Profit Margin (NPM)* atau Marjin Laba Bersih. Menurut Hery (Hery, 2015) *Net Profit Margin* merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak (*net income*) dengan penjualan bersih (*net sales*). Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Dalam era globalisasi ini yang diikuti dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, dunia usaha semakin tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Perusahaan yang kuat akan bertahan sedangkan yang tidak mampu bersaing akan mengalami kebangkrutan dan *collaps*. Perkembangan tersebut dapat kita cermati salah satunya dari sektor industri *pulp* dan kertas. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat mengikis keberadaan industri ini, dimana sekarang ini media cetak telah mampu dikonversi ke dalam dunia digital.

Perkembangan teknologi berdampak pada perilaku masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi dan komunikasi yang serba cepat, dari awalnya hanya dengan membaca text, kini kita bisa mendengar, menonton bahkan berinteraksi langsung dengan pembuat berita (*content provider*-nya). Ini akan memberi dampak bagi pelaku bisnis media cetak kemudian merembet pada industri *pulp* dan kertas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan modal kerja dan perputarannya terhadap tingkat pencapaian profitabilitas, dalam hal ini adalah *Net Profit Margin* yang diperoleh perusahaan *pulp* dan kertas dari tahun ke tahun.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel yang digunakan adalah data laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 (data yang ditemukan dalam BEI), maka teknik pengambilan jumlah sampel menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kuantitatif. Artinya, penelitian ini mengolah dan menganalisis data yang bersifat kuantitatif/*statistic* yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tentang komponen penyusun variabel perubahan modal kerja, perputaran modal kerja, dan *Net Profit Margin* kemudian menghubungkan tiap variabel tersebut untuk diketahui ada atau tidak pengaruh dan hubungannya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan modal kerja (X1) dan perputaran modal kerja (X2), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *Net Profit Margin* (Y).

Untuk memudahkan pengukuran dari variabel-variabel yang telah ditetapkan, berikut ini disajikan pengukurannya dalam bentuk tabel:

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Perubahan Modal Kerja	Modal Kerja Bersih (<i>Net Working Capital</i>)	Modal Kerja Bersih = Aktiva lancar – Hutang lancar	(%)
Perputaran Modal Kerja	Rasio Aktivitas	Perputaran Modal Kerja = $\frac{\text{Perputaran Modal Kerja}}{\text{Penjualan}}$ $\left(\frac{\text{aset lancar awal tahun} + \text{aset lancar akhir tahun}}{2} \right)$	(%)
<i>Net Profit Margin (NPM)</i>	Rasio Profitabilitas	Marjin Laba Bersih = $\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$	(%)

Sumber : (Harjito, 2014)(Hery, 2015)

1 Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan prosedur yang berfungsi untuk melihat hubungan linier antara lebih dari satu variabel yang diidentifikasi sebagai variabel independen atau bebas dengan satu variabel lain yang diidentifikasi sebagai variabel dependen atau tergantung (Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017).

Berikut ini persamaan umum regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k + e$$

(Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017).

Artinya:

Y : Variabel tergantung atau dependen atau disebut juga variable kriteria, yaitu variabel yang nilainya akan diprediksi.

a : Titik potong garis regresi pada sumbu vertikal (Y) atau disebut intersep atau konstanta, yaitu nilai Y yang diprediksikan bila nilai X=0.

b : Tingkat kemiringan garis regresi atau koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan nilai Y bila nilai X berubah sebesar satu satuan.

X : Variabel bebas atau independen atau disebut juga sebagai prediktor, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi nilai Y.

e : Epsilon atau *error* pada garis regresi, merupakan selisih nilai Y yang diprediksikan dengan nilai Y yang diperoleh atau disebut juga sebagai residual (Y-Y₀).

k : Banyaknya semua variabel

Karena dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yakni dua variabel independen/bebas dan satu variabel dependen/terikat maka persamaan regresi seperti di bawah ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dari persamaan di atas kita harus mencari nilai b₁ dan b₂ dan a dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{(SS_2)(SCP_{1y}) - (SCP_{12})(SCP_{2y})}{r_{12,y} = \frac{r_{12} - r_{1y}r_{2y}}{\sqrt{(1 - r_{1y}^2)(1 - r_{2y}^2)}}}$$

$$b_2 = \frac{(SS_1)(SCP_{2y}) - (SCP_{12})(SCP_{1y})}{(SS_1)(SS_2) - (SCP_{12})^2}$$

$$a = Y - b_1X_1 - b_2X_2 = \left(\frac{\sum Y}{n}\right) - b_1 \left(\frac{\sum X_1}{n}\right) - b_2 \left(\frac{\sum X_2}{n}\right)$$

Dengan:

$$SS_1 = \sum x_1^2 = \sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n}$$

$$SS_2 = \sum x_2^2 = \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n}$$

$$SS_y = \sum y^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$SCP_{12} = \sum x_1x_2 = \sum X_1X_2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)}{n}$$

$$SCP_{1y} = \sum x_1y = \sum X_1Y - \frac{(\sum X_1)(\sum Y)}{n}$$

$$SCP_{2y} = \sum x_2y = \sum X_2Y - \frac{(\sum X_2)(\sum Y)}{n}$$

(Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017)

Keterangan:

SS₁ : Jumlah kuadrat deviasi x₁ (Sum Square)

SS₂ : Jumlah kuadrat deviasi x₂ (Sum Square)

SS_y : Jumlah kuadrat deviasi y (Sum Square)

SCP₁₂ : Jumlah perkalian silang antara deviasi x₁ dan deviasi x₂ (SCP, Sum Cross Product)

SCP_{1y} : Jumlah perkalian silang antara deviasi x₁ dan deviasi y

SCP_{2y} : Jumlah perkalian silang antara deviasi x₂ dan deviasi y

b. Koefisien Korelasi Parsial

Koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan yang meliputi kekuatan hubungan dan bentuk atau arah hubungan.

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel secara sendiri-sendiri/parsial (Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017) digunakan rumus statistik sebagai berikut:

1) Menghitung koefisien korelasi variabel Y dan X₁ (X₂ dianggap konstan) digunakan rumus :

$$r_{1y,2} = \frac{r_{1y} - r_{2y}r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{2y}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

2) Menghitung koefisien korelasi variabel Y dan X₂ (X₁ dianggap konstan) digunakan rumus :

$$r_{2y,1} = \frac{r_{2y} - r_{1y}r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{1y}^2)(1 - r_{12}^2)}}$$

3) Menghitung koefisien korelasi variabel X₁ dan X₂ (Y dianggap konstan) digunakan rumus :

Dengan

$$r_{1y} = \frac{SCP_{1y}}{\sqrt{(SS_1)(SS_y)}}$$

$$r_{2y} = \frac{SCP_{2y}}{\sqrt{(SS_2)(SS_y)}}$$

$$r_{12} = \frac{SCP_{12}}{\sqrt{(SS_1)(SS_2)}}$$

Keterangan:

$r_{1y} = r_{x_1y}$ = koefisien korelasi antara X_1 dan Y

$r_{2y} = r_{x_2y}$ = koefisien korelasi antara X_2 dan Y

$r_{12} = r_{x_1x_2}$ = koefisien korelasi antara X_1 dan X_2

Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan interval koefisien korelasi (r):

$$r = -1 \leq r \leq 1$$

jika :

$r = -1$, artinya hubungan antara X dan Y sempurna dan mempunyai hubungan linier negatif.

$r = 0$, artinya tidak ada hubungan antara X dan Y .

$r = 1$, artinya hubungan antara X dan Y sempurna dan mempunyai hubungan linier positif (Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017)

Kemudian tingkat hubungan koefisien korelasi dapat diketahui dengan menggunakan tabel pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 - 0.199	Sangat Rendah
0.20 - 0.399	Rendah
0.40 - 0.599	Cukup
0.60 - 0.799	Kuat
0.80 - 1.000	Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono, 2012)

c. Koefisien Korelasi Simultan

Koefisien korelasi simultan digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel independen secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hubungannya digunakan rumus statistik di bawah ini:

$$R_{y12} = \sqrt{\frac{r_{1y}^2 + r_{2y}^2 - 2r_{1y}r_{2y}r_{12}}{1 - r_{12}^2}}$$

(Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017)

d. Koefisien Determinasi (KD)

Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besarnya proporsi variasi dari

variabel dependen (tergantung) yang dapat dijelaskan oleh proporsi variabel independen (bebas) atau predictor (Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017). Untuk menghitung besarnya koefisien determinasi berganda Rumusnya:

$$KDB = R^2_{y12} \times 100\%$$

2. Uji t (Pengujian Kelayakan Hipotesis Parsial)

Menurut Danang, pengujian hipotesis statistic adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis, digunakan data yang sedang dipersoalkan/diujikan (Azizah, 2017).

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (*t test*) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen/bebas dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat.

Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan pengujian secara parsial menurut (Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017) adalah merumuskan hipotesis penelitian yaitu:

$H_{01} : \beta_1 = 0$ (Variabel X_1 tidak berpengaruh terhadap Y secara signifikan)

$H_{11} : \beta_1 \neq 0$ (Variabel X_1 berpengaruh terhadap Y secara signifikan).

$H_{02} : \beta_2 = 0$ (Variabel X_2 tidak berpengaruh terhadap Y secara signifikan).

$H_{12} : \beta_2 \neq 0$ (Variabel X_2 berpengaruh terhadap Y secara signifikan).

Karena dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% maka nilai probabilitas/ $\alpha/\alpha = 5\%$ atau 0,05.

Menghitung nilai t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai $\alpha = 5\%$ atau 0,05 harus dibagi dua sehingga menjadi 0,025.

Degree of Freedom (DF) = $n - k$ (jumlah data dikurangi jumlah variabel).

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai t hitung dengan menggunakan rumus:

$$t \text{ hitung } (t_0) = \frac{b_k}{sb_k}$$

Dengan:

$$Sb_1 = Sy_{1.2} = \sqrt{\frac{MS_{res}}{SS_1(1-r_{12}^2)}} \quad \& \quad r_{12}^2 = \frac{(SCP_{12})^2}{(SS_1)(SS_2)}$$

$$Sb_2 = Sy_{2.1} = \sqrt{\frac{MS_{res}}{SS_2(1-r_{12}^2)}}$$

MSres diketahui dengan menggunakan rumus:

$$MSres = \frac{SSy - \{b_1(SCP_{1y}) + b_2(SCP_{2y})\}}{k-1}$$

(Jonathan dan Hendra Nur Salim, 2017)

Keterangan:

Sb₁ = kesalahan baku dari intersep b₁

Sb₂ = kesalahan baku dari intersep b₂

Sy_{1,2} = kesalahan baku dari koefisien regresi linier berganda b₁

Sy_{2,1} = kesalahan baku dari koefisien regresi linier berganda b₂

MSres = rata-rata kuadrat residu (MS/Mean Square)

Setelah t hitung ditemukan kemudian membandingkannya dengan t tabel untuk ditarik kesimpulannya dengan kriteria sebagai berikut:

Jika t hitung(t₀) > t tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Jika t hitung(t₀) < t tabel maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modal Kerja

Modal kerja dalam penelitian ini menggunakan konsep kualitatif yakni modal kerja bersih (*net working capital*). Modal kerja bersih di dapat dari hasil pengurangan antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Setelah diketahui modal bersih pertahun, kemudian dianalisis perubahannya (naik/turun) dengan cara membandingkannya dengan modal bersih tahun sebelumnya. Data jumlah modal bersih tersebut diambil dari neraca laporan keuangan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Modal Kerja PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2009 s/d Tahun 2016 (dalam dolar AS)

THN	AKTIVA LANCAR	HUTANG LANCAR	MODAL KERJA
2009	920.801.000	389.011.000	531.790.000
2010	917.699.000	418.397.000	499.302.000
2011	1.150.989.000	598.290.000	552.699.000
2012	1.262.551.000	524.443.000	738.108.000
2013	1.198.904.000	540.105.000	658.799.000
2014	1.067.583.000	561.851.000	505.732.000
2015	829.331.000	579.075.000	250.256.000
2016	598.774.000	429.383.000	169.391.000
TOTAL	7.946.632.000	4.040.555.000	3.906.077.000
RATA-RATA	993.329.000	505.069.375	488.259.625

Sumber : Laporan Keuangan Neraca PT. Tjiwi Kimia 2009 s/d 2016

Tabel 4. Perubahan Modal kerja PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2009 s/d tahun 2016 (dalam dolar AS)

THN	AKTIVA	HUTANG	MODAL	PERU-	(%)
	LANCAR	LANCAR	KERJA	BAHAN	
2009	920.801.000	389.011.000	531.790.000	-	0.00
2010	917.699.000	418.397.000	499.302.000	TURUN	-6.11
2011	1.150.989.000	598.290.000	552.699.000	NAIK	10.69
2012	1.262.551.000	524.443.000	738.108.000	NAIK	33.55
2013	1.198.904.000	540.105.000	658.799.000	TURUN	-10.74
2014	1.067.583.000	561.851.000	505.732.000	TURUN	-23.23
2015	829.331.000	579.075.000	250.256.000	TURUN	-50.52
2016	598.774.000	429.383.000	169.391.000	TURUN	-32.31

Sumber : Laporan Keuangan Neraca PT. Tjiwi Kimia 2009 s/d 2016

Jumlah Aktiva lancar cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sedangkan jumlah hutang lancarnya cenderung mengalami kenaikan, kondisi ini logis karena aktiva lancar khususnya kas digunakan untuk segera melunasi hutang lancar yang telah jatuh tempo dan tidak diimbangi dengan penurunan hutang lancar sehingga menyebabkan modal kerja mengalami penurunan.

Dari keadaan di atas dapat dikatakan bahwa modal kerja yang baik adalah ketika aktiva lancar naik maka diharapkan hutang lancar mengalami penurunan atau kenaikan hutang lancar harus diimbangi pula dengan kenaikan aktiva lancar, sedangkan penurunan aktiva lancar harus diimbangi pula dengan penurunan hutang lancar.

2. Perputaran Modal Kerja

Perputaran modal kerja merupakan bagian dari rasio aktivitas. Rasio perputaran modal kerja digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja (aset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata-rata asset/aktiva lancar. Berikut disajikan data aktiva lancar, rata-rata aktiva lancar, penjualan dan perputaran modal kerja yang diambil dari laporan keuangan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dari tahun 2009-2016:

Tabel 5. Perputaran Modal kerja PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2009 s/d tahun 2016 (dalam dolar AS)

Thn	AKTIVA	RATA-RATA	PENJUALAN	PERPUTARAN
	LANCAR	AKTIVA LANCAR (a)	(b)	MODAL KERJA (%) (b/a)
2009	920,801,000	920,801,000	1,174,106,000	127.51
2010	917,699,000	919,250,000	1,338,766,000	145.64
2011	1,150,989,000	1,034,344,000	1,378,740,000	133.30
2012	1,262,551,000	1,206,770,000	1,321,641,000	109.52
2013	1,198,904,000	1,230,727,500	1,222,356,000	99.32
2014	1,067,583,000	1,133,243,500	1,194,755,000	105.43
2015	829,331,000	948,457,000	1,062,531,000	112.03
2016	598,774,000	714,052,500	996,902,000	139.61

Sumber : Laporan Keuangan Neraca PT. Tjiwi Kimia 2009 s/d 2016

Dari data tabel diatas terlihat rata-rata aktiva lancar PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar \$1,230,727,500 dan data penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar \$1,378,740,000. Sedangkan rata-rata aktiva lancar terendah dan data penjualan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar \$714,052,500 dan \$996,902,000. Pada awal tahun 2010 dan 3 tahun terakhir rata-rata aktiva lancar mengalami penurunan. Penurunan aktiva lancar tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 24,71%. Sedangkan kenaikan aktiva lancar tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 16,67%.

Tidak berbeda dengan kondisi aktiva lancar, kondisi penjualan per tahun juga mengalami penurunan. Diawali dengan kenaikan pada 2 tahun pertama, kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Kenaikan penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,02%, sedangkan penurunan penjualan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,07%.

Pada table 5 memperlihatkan bahwa kenaikan dan penurunan penjualan juga diikuti dengan kenaikan dan penurunan rata-rata aktiva lancar. Kondisi seperti ini merupakan hal yang wajar karena hasil dari penjualan tersebut akan menjadi kas dan piutang dalam perusahaan. Namun bisa jadi kondisi seperti ini tidak efektif, karena jika dihitung dalam rasio perputaran modal kerja akan menghasilkan tingkat perputaran modal kerja yang rendah. Kondisi rata-rata aktiva lancar yang tinggi berarti terdapat komponen modal kerja seperti kas, piutang dan persediaan mengendap atau kurang dimanfaatkan dengan baik.

Keefektifan modal kerja adalah ketika penjualan tinggi namun dengan rata-rata aktiva lancar yang rendah, dengan begitu tingkat perputaran modal kerja yang

dihasilkan akan tinggi. Tingkat perputaran kerja yang tinggi berarti waktu yang digunakan oleh komponen modal kerja (kas, piutang dan persediaan) untuk terbentuk kembali menjadi komponen modal kerja semakin cepat. Dengan begitu akan mempengaruhi pada jumlah produksi barang yang akan dijual, dengan penjualan yang tinggi maka akan menyebabkan keuntungan yang tinggi.

Pada tabel 5 perputaran modal kerja PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 mengalami 4 kali kenaikan dan 3 kali penurunan. Jumlah perputaran tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,46 kali dan perputaran terendah adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,99 kali.

3. Net Profit Margin (NPM)

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Laba operasional sendiri didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dan dikurangi dengan beban usaha.

Berikut disajikan data laba operasional, penghasilan/beban lain-lain dan pajak pada tabel *net income* PT. Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk. tahun 2009-2016:

Tabel 6. Net Income PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Tahun 2009 s/d Tahun 2016 (dalam dolar AS)

Thn	LABA	PENGHASILAN/	PAJAK	NET
	OPERASI-	BEBAN		INCOME
	ONAL	LAIN-LAIN		
2009	119.831.000	(47.423.000)	(40.754.000)	31.654.000
2010	79.022.000	(16.965.000)	(15.485.000)	46.572.000
2011	105.397.000	(14.906.000)	(20.079.000)	70.412.000
2012	85.910.000	(44.283.000)	(6.810.000)	34.817.000
2013	31.199.000	(16.374.000)	12.185.000	27.010.000
2014	21.922.000	(10.840.000)	9.392.000	20.474.000
2015	13.026.000	(24.685.000)	13.111.000	1.452.000
2016	10.938.000	(10.056.000)	6.771.000	7.653.000

Sumber : Laporan Keuangan Neraca PT. Tjiwi Kimia 2009 s/d 2016

Berdasarkan tabel 6, laba bersih/*net income* perusahaan mengalami penurunan setelah dua kali mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 dan 2011. Laba bersih yang kecil bisa disebabkan karena jumlah beban dan pajak yang terlalu tinggi. Jika laba operasional lebih besar dibandingkan dengan beban dan pajak, maka kondisi ini perusahaan dalam keadaan untung. Jika laba operasional lebih kecil dibandingkan dengan beban dan pajak, maka kondisi ini perusahaan dalam keadaan rugi.

Untuk menghitung besarnya rasio *Net Profit Margin* dengan membandingkan laba bersih (*net income*) dengan data penjualan. Berikut disajikan *Net Profit Margin* yang diambil dari laporan keuangan PT. Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk. tahun 2009-2010:

Tabel 7. Net Profit Margin PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tahun 2009 s/d tahun 2016 (dalam dolar AS)

THN	PENJUALAN	NET INCOME	NET PROFIT MARGIN (%)
	(b)	(c)	(c/b)
2009	1,174,106,000	31,654,000	2.70
2010	1,338,766,000	46,572,000	3.48
2011	1,378,740,000	70,412,000	5.11
2012	1,321,641,000	34,817,000	2.63
2013	1,222,356,000	27,010,000	2.21
2014	1,194,755,000	20,474,000	1.71
2015	1,062,531,000	1,452,000	0.14
2016	996,902,000	7,653,000	0.77

Sumber : Laporan Keuangan Neraca PT. Tjiwi Kimia 2009 s/d 2016

Dari tabel 7 terlihat bahwa *Net Profit Margin* untuk 2 tahun pertama (2010 dan 2011) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,48 dan 5,11. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan dan kemudian naik kembali pada tahun 2016. Persentase *Net Profit Margin* tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5.11 % dan persentase *Net Profit Margin* terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,14%. Berkurangnya *Net Profit Margin* disebabkan karena bertambahnya beban dan pajak, sehingga mempengaruhi laba bersih atau *Net income*.

4 Perbandingan antara Perubahan Modal kerja, Perputaran Modal kerja dan *Net Profit Margin* (NPM).

Setelah menghitung jumlah persentase perubahan modal kerja, perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* PT. Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk. dari tahun 2010 sampai dengan 2016 untuk mempermudah pengujian hipotesis maka hasil dari ketiga variabel

tersebut dapat dilihat perbandingannya pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perubahan Modal Kerja, Perputaran Modal Kerja dan *Net Profit Margin* PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Tahun 2006 s/d 2016

THN	PERUBAHAN	PERPUTARAN	NET PROFIT
	MODAL KERJA	MODAL KERJA	MARGIN
	(%)	(%)	(%)
2010	-6.11	145.64	3.48
2011	10.69	133.30	5.11
2012	33.55	109.52	2.63
2013	-10.74	99.32	2.21
2014	-23.23	105.43	1.71
2015	-50.52	112.03	0.14
2016	-32.31	139.61	0.77

Sumber : Laporan Keuangan Neraca PT Tjiwi Kimia Tbk dan Penulis.

5. Pengujian Hipotesis Penelitian

Dari analisis perubahan modal kerja, perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya adalah menentukan variabel perubahan modal kerja sebagai variabel bebas pertama (X1), perputaran modal kerja sebagai variabel bebas kedua (X2), dan *Net Profit Margin* sebagai variabel terikat (Y).

Langkah berikutnya adalah menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan uji statistik. Untuk mempermudah pengujian hipotesis digunakan perhitungan antar variabel yang bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Tabel Penolong Perhitungan Analisis Regresi dan Korelasi PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

No.	X ₁	X ₂	Y	X ₁ ²	X ₂ ²
1	-6.11	145.64	3.48	37.32	21210.07
2	10.69	133.30	5.11	114.37	17767.84
3	33.55	109.52	2.63	1125.34	11994.39
4	-10.74	99.32	2.21	115.45	9864.42
5	-23.23	105.43	1.71	539.83	11115.05
6	-50.52	112.03	0.14	2551.87	12550.12
7	-32.31	139.61	0.77	1044.12	19491.47
Σ	-78.68	844.84	16.05	5528.31	103993.36

Y ²	X ₁ .Y	X ₂ .Y	X ₁ .X ₂
12.10	-21.25	506.63	-889.72
26.08	54.62	680.74	1425.51
6.94	88.37	288.51	3673.93
4.88	-23.74	219.46	-1067.18
2.94	-39.82	180.67	-2449.54
0.02	-6.90	15.31	-5659.18
0.59	-24.81	107.18	-4511.27
53.55	26.47	1998.50	-9477.44

Sumber : Penulis

6. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan prosedur yang berfungsi untuk melihat hubungan linier antara lebih dari satu variabel yang diidentifikasi sebagai variabel independen atau bebas dengan satu variabel lain yang diidentifikasi sebagai variabel dependen atau tergantung. Linieritas dalam hubungan ini menyiratkan fluktuasi nilai variabel bebas diasumsikan mempengaruhi variabel terikat.

Dengan melihat tabel penolong perhitungan analisis regresi dan korelasi (tabel 3.7) maka langkah selanjutnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dari persamaan di atas kita harus mencari nilai **b₁**, **b₂** dan **a** dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b_1 = \frac{(SS_2)(SCP_{1y}) - (SCP_{12})(SCP_{2y})}{(SS_1)(SS_2) - (SCP_{12})^2}$$

$$b_2 = \frac{(SS_1)(SCP_{2y}) - (SCP_{12})(SCP_{1y})}{(SS_1)(SS_2) - (SCP_{12})^2}$$

$$a = Y - b_1X_1 - b_2X_2 = \left(\frac{\sum Y}{n}\right) - b_1 \left(\frac{\sum X_1}{n}\right) - b_2 \left(\frac{\sum X_2}{n}\right)$$

Untuk mencari nilai-nilai di atas, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai SS₁, SS_y, dan SS₂ dengan rumus sebagai berikut:

$$SS_1 = \sum X_1^2 = \sum X_1^2 - \frac{(\sum X_1)^2}{n} = 4644.02$$

$$SS_2 = \sum X_2^2 = \sum X_2^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n}$$

$$= 2028.74$$

$$SS_y = \sum Y^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} = 16.76$$

Mencari nilai SCP₁₂ dengan rumus sebagai berikut:

$$SCP_{12} = \sum X_1X_2 = \sum X_1X_2 - \frac{(\sum X_1)(\sum X_2)}{n} = 18.17$$

Mencari nilai SCP_{1y} dengan rumus sebagai berikut:

$$SCP_{1y} = \frac{\sum X_1Y}{\sum X_1Y} = \sum X_1Y - \frac{(\sum X_1)(\sum Y)}{n} = 206.84$$

Mencari nilai SCP_{2y} dengan rumus sebagai berikut:

$$SCP_{2y} = \sum X_2Y = \sum X_2Y - \frac{(\sum X_2)(\sum Y)}{n} = 61.68$$

Setelah ditemukan nilai-nilai di atas (SS₁, SS₂, SS_y, SCP₁₂, SCP_{1y} dan SCP_{2y}) kemudian di masukkan ke dalam rumus **b₁**, **b₂** dan **a**. Hasil perhitungan diperoleh nilai **b₁** = 0.04, **b₂** = 0.03 dan **a** = -0.83.

Dari hasil analisis regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta (**a**) sebesar -0,83 sedangkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama (**b₁**) sebesar 0,04 dan koefisien regresi bebas kedua (**b₂**) sebesar 0,03 maka didapat persamaan regresi linier yaitu:

$$Y = -0,83 + 0,04X_1 + 0,03X_2$$

Adapun maksud dari persamaan tersebut adalah:

- 1) **a** = -0,83
Net Profit Margin yang terbentuk adalah sebesar -0,83 apabila perubahan modal kerja (X₁) dan perputaran modal kerja (X₂) bernilai 0.
- 2) **b₁** = 0,04
Setiap kenaikan perubahan modal kerja sebesar 1 satuan, maka *Net Profit Margin* akan naik sebesar 0,04
- 3) **b₂** = 0,03
Setiap kenaikan perputaran modal kerja sebesar 1 satuan, maka *Net Profit Margin* akan naik sebesar 0,03.

b. Koefisien Korelasi Parsial

Koefisien korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel secara sendiri-sendiri/parsial. Sebelum menghitungnya, perlu dilakukan perhitungan koefisien korelasi antar masing-masing variabel berikut ini:

1) Koefisien korelasi antara X_1 dan Y

$$r_{1y} = \frac{SCP_{1y}}{\sqrt{(SS_1)(SS_y)}} = 0.74$$

2) Koefisien korelasi antara X_2 dan Y

$$r_{2y} = \frac{SCP_{2y}}{\sqrt{(SS_2)(SS_y)}} = 0.33$$

3) Koefisien korelasi antara X_1 dan X_2

$$r_{12} = \frac{SCP_{12}}{\sqrt{(SS_1)(SS_2)}} = 0.01$$

Hubungan antar variabel secara sendiri-sendiri/parsial adalah:

1) Koefisien korelasi variabel Y dan X_1 (X_2 dianggap konstan):

$$r_{1y.2} = \frac{r_{1y} - r_{2y}r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{2y}^2)(1 - r_{12}^2)}} = 0.78$$

2) Koefisien korelasi variabel Y dan X_2 (X_1 dianggap konstan):

$$r_{2y.1} = \frac{r_{2y} - r_{1y}r_{12}}{\sqrt{(1 - r_{1y}^2)(1 - r_{12}^2)}} = 0.49$$

3) Menghitung koefisien korelasi variabel X_1 dan X_2 (Y dianggap konstan):

$$r_{12.y} = \frac{r_{12} - r_{1y}r_{2y}}{\sqrt{(1 - r_{1y}^2)(1 - r_{2y}^2)}} = -0.83$$

Dengan melihat pedoman tabel 2.2 tingkat interval koefisien korelasi, hasil koefisien korelasi parsial antara perubahan modal kerja dan *Net Profit Margin* diperoleh nilai sebesar 0,78, yang berarti perubahan modal kerja dan *Net Profit Margin* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki tingkat hubungan yang positif dan kuat, sedangkan perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* diperoleh nilai sebesar 0,49, yang berarti perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* memiliki tingkat hubungan yang positif dan cukup kuat. Dan untuk hubungan antara perubahan modal kerja dan perputaran kerja itu sendiri

diperoleh hasil -0,38 yang berarti negatif dan rendah.

c. Koefisien Korelasi Simultan

Koefisien korelasi simultan digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh hubungan variabel independen secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen. Besarnya hubungan variabel perubahan modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap *Net Profit Margin* adalah:

$$R_{y12} = \sqrt{\frac{r_{1y}^2 + r_{2y}^2 - 2r_{1y}r_{2y}r_{12}}{1 - r_{12}^2}}$$

$$R_{y12} = \sqrt{\frac{0.74^2 + 0.33^2 - 2 \times 0.74 \times 0.33 \times 0.01}{1 - 0.01^2}}$$

$$R_{y12} = 0.81$$

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi secara simultan/bersama-sama diperoleh nilai sebesar 0,81. Dengan melihat tabel pedoman interval koefisien korelasi maka nilai tersebut digolongkan dalam tingkat hubungan yang positif dan sangat kuat, ini berarti hubungan antara perubahan modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap *Net Profit Margin* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Adalah positif dan sangat kuat.

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besarnya proporsi variasi dari variabel dependen (tergantung) yang dapat dijelaskan oleh proporsi variabel independen (bebas) atau prediktor. Besarnya koefisien determinasi variabel perubahan modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap *Net Profit Margin* adalah:

$$\begin{aligned} \text{KDB} &= R_{y12}^2 \times 100\% \\ &= 0.81^2 \times 100\% \\ &= 65,61\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi Berganda (KDB) menunjukkan nilai sebesar 65,61%, ini berarti variasi tingkat *Net Profit Margin (NPM)* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Sebesar 65,61% dipengaruhi oleh perubahan modal kerja dan perputaran modal kerja dan sisanya sebesar 34,39% dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti volume penjualan, beban, dan lain-lain.

7. Uji t (Pengujian Kelayakan Hipotesis Parsial)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (*t test*) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen/bebas dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis operasional dalam penelitian ini adalah:

H₀₁: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan perubahan modal kerja terhadap *Net Profit Margin (NPM)*.

H₁₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan perubahan modal kerja terhadap *Net Profit Margin (NPM)*.

H₀₂ : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan perputaran modal kerja terhadap *Net Profit Margin (NPM)*.

H₁₂: Terdapat pengaruh positif dan signifikan perputaran modal kerja terhadap *Net Profit Margin (NPM)*.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan hasil nilai t tabel dengan t hitung dengan kriteria sebagai berikut:

Jika t hitung (t_0) > t tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima

Jika t hitung (t_0) < t tabel maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

Langkah pertama adalah menghitung nilai t table dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai α = 5% atau 0,05 harus dibagi dua sehingga menjadi 0,025.

Degree of Freedom (DF) = n-k (jumlah data dikurangi jumlah variabel).

t tabel = $t_{\alpha/2, DF = n-k} = t_{0,025, DF = 7-3=4} = 2,776$

Nilai t tabel sebesar 2,776 didapat dari melihat pedoman t tabel statistik.

Langkah kedua menghitung nilai t hitung (t_0) dengan rumus:

$$t \text{ hitung } (t_0) = \frac{b_k}{sb_k}$$

- a. Rumus t hitung variabel bebas perubahan modal kerja (X1)

$$t \text{ hitung } (t_{0,1}) = \frac{b_1}{Sb_1}$$

- b. Rumus t hitung variabel bebas perputaran modal kerja (X2)

$$t \text{ hitung } (t_{0,2}) = \frac{b_2}{Sb_2}$$

Dengan menggunakan rumus:

$$Sb_1 = Sy_{1,2} = \sqrt{\frac{MS_{res}}{SS_1(1-r_{12}^2)}}$$

$$Sb_2 = Sy_{2,1} = \sqrt{\frac{MS_{res}}{SS_2(1-r_{12}^2)}}$$

$$MS_{res} = \frac{SS_y - \{b_1(SCP_{1y}) + b_2(SCP_{2y})\}}{k-1}$$

$$r_{12}^2 = \frac{(SCP_{12})^2}{(SS_1)(SS_2)}$$

Maka nilai t hitung (t_0) untuk masing-masing variabel adalah:

- a. Rumus t hitung variabel bebas perubahan modal kerja (X1)

$$t_{0,1} = \frac{b_1}{sb_1}$$

$$= \frac{0.04}{0.025}$$

$$= 1.612$$

- b. Rumus t hitung variabel bebas perputaran modal kerja (X2)

$$t_{0,2} = \frac{b_2}{sb_2}$$

$$= \frac{0.03}{0.038}$$

$$= 0.799$$

Setelah nilai t hitung untuk masing-masing variabel bebas diketahui kemudian membandingkannya dengan nilai t tabel untuk ditarik kesimpulannya.

- a. Untuk variabel bebas perubahan modal kerja (X1)
Nilai t hitung ($t_{0,1}$) didapat sebesar 1,612 dan nilai t tabel sebesar 2,776, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan modal kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Net Profit Margin* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
- b. Untuk variabel bebas perputaran modal kerja (X2)
Nilai t hitung ($t_{0,2}$) didapat sebesar 0,799 dan nilai t tabel sebesar 2,776, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Net Profit Margin* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk..

KESIMPULAN

Dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan di atas maka kesimpulannya adalah:

Hasil korelasi parsial antara perubahan modal kerja dan *Net Profit Margin* diperoleh nilai sebesar 0,78, yang berarti perubahan modal kerja dan *Net Profit Margin* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki tingkat hubungan yang positif dan kuat, namun berdasarkan uji t membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel perubahan modal kerja ($t_{0,1}$) lebih kecil dari t tabel ($t_{0,1} 1,612 < 2,776$) ini berarti perubahan modal kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Tahun 2010-2016.

Dengan hasil ini membuktikan bahwa pihak-pihak dalam perusahaan telah berupaya keras dalam mengelola keefektifan modal kerja, terutama kebijakan dalam hal pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar. Secara teoritis perubahan modal kerja yang meningkat akan meningkatkan jumlah produksi barang sehingga penjualan diharapkan meningkat. Dengan meningkatnya penjualan disertai biaya yang rendah, diharapkan akan meningkatkan laba bersih/*net income* yang nantinya akan berpengaruh terhadap kenaikan *Net Profit Margin (NPM)*.

Hasil korelasi parsial antara perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* diperoleh nilai sebesar 0,49, yang berarti perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* memiliki tingkat hubungan yang positif dan cukup kuat, namun berdasarkan uji t

membuktikan bahwa nilai t hitung untuk variabel perputaran modal kerja ($t_{0,2}$) lebih kecil dari t tabel ($t_{0,2} 0,799 < 2,766$) ini berarti perubahan modal kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Net Profit Margin (NPM)* pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tahun 2010-2016.

Dengan hasil ini membuktikan bahwa pihak-pihak dalam perusahaan telah berupaya secara efektif dalam memutar modal kerja. Secara teoritis perputaran modal kerja yang efektif akan meningkatkan profitabilitas. Karena semakin tinggi perputaran modal kerja akan mempercepat kas yang tertanam menjadi kas kembali, jumlah piutang tak tertagih menjadi sedikit, dan mempercepat arus persediaan barang yang dijual.

Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan laba bersih/*net income* yang nantinya akan berpengaruh terhadap kenaikan *Net Profit Margin (NPM)*.

REFERENSI

- Adawia, P. R., Azizah, A., & Rokhim, A. (2019). Analisis Pengaruh Perubahan dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. *Moneter*, 6(1), 69–80.
- Adawia, Popon Rabia, A. azizah dan R. Y. (2017). Analisis Pengaruh Modal Kerja terhadap Profitabilitas Pada PT. Mandom Tbk. *STAR*, XIV No.3.
- Azizah, A. dan P. R. A. (2017). Analisis Structure Conduct Performance Pada PT. Telekomunikasi Indonesia. *PERSPEKTIF*, Vol.15 No.
- Harjito, D. A. dan M. (2014). *Manajemen Keuangan* (Kedua). Yogyakarta: Ekonisia.
- Hery. (2015). *Laporan Analisa Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Centre of Academic Publisihing Service).
- Jonathan dan Hendra Nur Salim. (2017). *Prosedur-prosedur Popular Statistik untuk Analisa Data Riset Skripsi*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kasmir. (2013). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

PROFIL PENULIS

Popon Rabia Adawia, Penulis 1, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi, STIE YAI Jakarta dan gelar S2 dari program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Saat ini menjadi Dosen Luar Biasa di UBSI Jakarta.

Ayu Azizah, Penulis 2, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, lulus 2010. Gelar S2

Magister Manajemen (MM) Universitas BSI Bandung. Saat ini menjadi Dosen Luar Biasa di UBSI Bandung.

Abdul Rokhim, Penulis 3, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi, STIE YPN, Karawang.

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earnings Ratio (PER) Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia

Sonny Fransisco Siboro

¹Universitas Bina Sarana Informatika
e-mail: sonny.sof@bsi.ac.id

Siboro, S. F. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earnings Ratio (PER) Saham Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Moneter*, 6(1 April 2019), 81–90.

Abstract- *One of the fundamental analysis that usually used by investor and security analyze to value the stock price by Price Earnings Ratio (PER) approach. Price Earnings Ratio shows how much investor is willing to pay per rupiah of companies' profit. These researches have as a purpose to examine influence factor of Dividend Payout Ratio (PER), Return On Equity (ROA), Earnings Per Share (EPS), Leverage, Size to Price Earnings Ratio (PER). The sample using 17 companies on mining companies sector. Type data is secondary data from each mining company listed on Indonesia Stock Exchange for four years 2007, 2008, 2009 and 2010. The samples are taken by purposive sampling. Data analysis used multiple regression analysis method which initial by classic test for normality, multicollinearity, heteroskedastisitas test. Hypothesis test the F test and t test. Result show that Dividend Payout Ratio (DPR) have positive and significant effect on Price Earnings Ratio, Size has a negative and significant effect on Price Earnings Ratio mining company share. However variable Earnings Per Share (EPS), Return On Equity (ROE) and Leverage have no significant effect on Price Earnings Ratio (PER) mining companies stock.*

Keywords: Dividend Payout Ratio, Return On Equity, Earnings Per Share, Leverage, Price Earnings Ratio.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut (Sumantoro, 1990). Secara sederhana investasi dapat diuraikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi.

Ada sejumlah media investasi yang lazim dipilih oleh investor perseorangan dewasa ini, seperti deposito, tabungan, valuta asing, saham, reksa dana, logam mulia, tanah atau rumah. Setiap jenis media investasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang tingkat kemampuannya tinggi, namun tingkat keuntungan investasinya terbatas, seperti tabungan. Ada juga media investasi yang relatif kurang likuid karena memerlukan waktu untuk menjualnya, misal tanah dan rumah (Thian, 2001). Dalam hal investasi pada sekuritas, terdapat daya tarik pada aspek likuiditasnya karena sekuritas-sekuritas tersebut bisa dijual belikan di bursa efek.

Pasar modal merupakan salah satu instrument ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam berinvestasi, yang bertujuan untuk menciptakan fasilitas bagi

keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal.

Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari berbagai pengaruh ekonomi mikro seperti kinerja perusahaan, perubahan strategi perusahaan (misalnya kebijakan merger), pengumuman laporan keuangan atau deviden perusahaan. Selain itu juga lingkungan ekonomi makro yang terjadi seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, turut mengakibatkan berfluktuasinya harga dan perdagangan di pasar modal. Oleh karena itu para analis dan investor dalam mengambil kebijakan untuk melakukan investasi di pasar modal tentunya perlu mempertimbangkan banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perkembangan harga saham.

Perkembangan harga saham di pasar modal adalah salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para analis dan pemodal dalam mengambil kebijakan melakukan analisis di pasar modal. Investor dalam menanamkan dananya pada saham sangat berkepentingan dengan return yang diharapkan di masa yang akan datang, sehingga sebelum menanamkan dananya investor perlu melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, hal ini disebabkan karena investor pada umumnya tidak

menyukai resiko (Muljono, 2002). Menurut (Ang, 1997), pasar modal sendiri merupakan seni karena mengandung unsur psikologis yang memang sulit diprediksi. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan sebagian orang gagal dalam dunia pasar modal.

Dalam mengambil kebijakan untuk investasi para analis dan investor menggunakan salah satunya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah merupakan studi yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keuangan suatu bisnis dengan maksud untuk lebih memahami sifat dasar dan karakteristik perusahaan publik yang menerbitkan saham. Analisis fundamental didasarkan atas kepercayaan bahwa nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jika prospek suatu perusahaan sangat kuat dan baik, maka harga saham diperkirakan akan merefleksikan kekuatan tersebut dan harganya akan meningkat (Ang, 1997).

(Jones, 1996) menyatakan salah satu analisis fundamental yang dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian saham adalah dengan melakukan pendekatan *Price Earnings Ratio* (PER), yaitu rasio antara harga per lembar saham dengan laba per lembar saham. Menurut (Sartono, 1996), banyak para pelaku pasar modal menaruh perhatian terhadap *Price earnings ratio* (PER) yang diartikan sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan.

Model penilaian saham dengan menggunakan pendekatan *Price Earnings Ratio* (PER) lebih populer karena dianggap lebih mudah, sederhana dan lebih praktis digunakan oleh para analis dan pelaku pasar (Heveadi_Asri, 1999). Alasan utama mengapa *Price Earnings Ratio* (PER) digunakan dalam analisis harga saham karena *Price Earning Ratio* (PER) akan memudahkan dan membantu para analis dan investor dalam penilaian harga saham. Menurut Weston & Copeland (1992), PER merupakan rasio pengukuran yang paling komprehensif tentang prestasi perusahaan, karena rasio penelitian tersebut mencerminkan perpaduan antara pengaruh rasio resiko dan rasio pengembalian.

Price Earnings Ratio (PER) menunjukkan seberapa besar investor mau membayar per dollar dari keuntungan yang dilaporkan (Sartono & Mpaata, 1997), *Price Earnings Ratio* (PER) dinyatakan sebagai perbandingan dari harga per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham tersebut. Semakin tinggi *Price Earnings Ratio* (PER) saham suatu perusahaan maka semakin tinggi harga per saham tersebut dibandingkan pendapatan tiap lembar sahamnya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi minat para investor untuk memiliki saham tersebut, *Price Earning Ratio* (PER) juga merupakan cermin dari keberanian investor

untuk membayar setiap rupiah harga saham untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan saham tersebut.

Price Earnings ratio (PER) yang rendah akan memberikan kontribusi tersendiri bagi pelaku pasar modal terutama investor. Selain dapat membeli saham dengan harga murah dan kemungkinan *capital gain* yang diraih semakin besar, investor dapat mempunyai banyak saham dari berbagai perusahaan yang *go public*. Sebaliknya emiten menginginkan *Price Earnings Ratio* (PER) yang tinggi pada waktu *go public*. Adanya perbedaan kepentingan antara investor dan emiten menyebabkan kajian tentang *Price Earnings Ratio* (PER) dan faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi penting.

Sejauh ini pendapat dan hasil dari penelitian masih terdapat perbedaan-perbedaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Price Earnings Ratio* (PER) diantaranya adalah *Dividen Payout Ratio* (DPR), pertumbuhan laba, *Return On Euity* (ROE), *leverage* dan ukuran perusahaan..

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi indeks harga saham pada sektor pertambangan. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan pada latar belakang dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor *Dividen Payout Ratio* (DPR), pertumbuhan laba, *Retun On Equity* (ROE), *Leverage* dan Ukuran perusahaan terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) memberikan hasil yang bervariasi sehingga menimbulkan pertanyaan untuk diteliti lebih mendalam.

1. Price Earnings Ratio (PER)

Price Earnings Ratio (PER) merupakan ukuran untuk menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham perusahaan (Kertonegoro, 1995 : 121). Keinginan investor melakukan analisis kesehatan suatu perusahaan melalui rasio-rasio keuangan seperti *Price Earnings Ratio* (PER), dikarenakan adanya kegiatan investor atau calon investor akan hasil (*Return*) yang layak dari suatu investasi saham. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut yang terdiri dari *Capital Gain* (*loss*) dan *Yield* (Hartono, 1998). Penelitian anugrah (2001) menunjukkan bahwa *Price Earning Ratio* (PER) memberikan petunjuk kepada investor atau calon investor mengenai kemungkinan *return* saham yang di hasilkan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut didukung oleh (Francis, 1991) yang menyatakan bahwa saham-saham perusahaan di Amerika Serikat rata-rata *Price Earning Ratio* (PER) rendah akan menghasilkan *Average Rates Of Return* yang lebih besar. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Utama san Santoso (1998) yang menyatakan bahwa β dan *Price Earning Ratio* (PER) tidak mempunyai korelasi yang signifikan dengan *return* saham.

Model *Price Earning Ratio* (PER) tampaknya lebih mudah digunakan daripada model berdasar atas dividen. Kesederhanaan model tersebut dapat menyebabkan para analisis melupakan bahwa estimasi masa depan yang tidak pasti. Model *Price Earning Ratio* (PER) sebagaimana namanya menunjukkan, mendasarkan diri pada rasio antara harga saham per lembar dengan *earning per share* (Harianto & Sudomo, 1998)

(Jones, 1996), menyatakan analisis fundamental yang dapat digunakan untuk penilaian saham adalah dengan menggunakan pendekatan *Price Earning Ratio* (PER). Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan nilai saham dengan cara membagi harga saham (*price*) pada saat ini dengan *Earning Per Share* (EPS). Pendekatan ini tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Saham yang dimiliki *Price Earning Ratio* (PER) tinggi (*overvalued*) dianggap harganya terlalu tinggi dari nilai intrinsiknya, sedangkan *Price Earning Ratio* (PER) yang rendah (*undervalued*) menunjukkan harganya terlalu rendah, yaitu lebih kecil dari nilai intrinsiknya.

Menurut (Suad, 1996) saham yang mengalami *overvalued* sebaiknya di hindari atau dilakukan penjualan karena kondisi seperti ini di masa yang akan datang kemungkinan besar akan terjadi koreksi pasar. Sedangkan saham yang *undervalued* sebaiknya dibeli atau di pertahankan, karena besar kemungkinan di masa yang akan datang terjadi lonjakan harga saham.

2. Dividen Payout Ratio

Dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang di bagikan kepada pemegang saham, pembagian dividen tergantung pada *dividen policy* perusahaan dan dapat berupa *cash dividen*, *stock dividen* dan *stock split*. *Dividen Payout Ratio* (DPR) merupakan rasio laba yang di bayarkan perusahaan sebagai dividen kepada investor pada periode tertentu. *Dividen Payout Ratio* (DPR) merupakan perbandingan antara *Dividen Per Share* (DPS) dengan *Earning per Share* (EPS), semakin besar dividen yang di bagikan maka akan semakin besar *Dividen Payout Ratio* (DPR)-nya dan hal tersebut sangat menarik buat investor (Ang, 1997). Kenaikan *Dividen Payout Ratio* (DPR) akan meningkatkan harga saham dan selanjutnya nilai *Price Earning Ratio* (PER) akan meningkat atau dengan kata lain *Dividen Payout Ratio* (DPR) berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio* (PER).

Pengaruh *Dividen payout Ratio* (DPR) terhadap *Price Earning Ratio* (PER), seperti yang dinyatakan oleh Whitbeck-kisor (Manurung, 1997) bahwa *Dividen Payout Ratio* (DPR) berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio* (PER), hal ini berarti bahwa semakin tinggi *Dividen Payout Ratio* (DPR) yang di bagikan perusahaan kepada investor maka akan semakin tinggi pula *Price Earning Ratio* (PER) sebaliknya, semakin rendah *Dividen Payout Ratio* (DPR) yang dibagikan perusahaan kepada investor maka akan semakin rendah

pula *Price Earning Ratio* (PER). Litner (1956) memberikan pendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang enggan untuk membayar dividen, maka dianggap sebagai signal yang buruk karena perusahaan dianggap membutuhkan dana. Sedangkan menurut (Elton E. J., 1994) menyatakan bahwa pengaruh negative antara β dengan *Dividen Payout Ratio* (DPR) adalah bahwa pembayaran dividen di anggap lebih kecil risikonya dibandingkan *Capital Gain*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Beave el al (1970), Bettacharya (1979), Farrelly et al (1982), Capstaff (1992) yang mendukung Linner maka jika *Dividen Payout Ratio* (DPR) pada *Earning per lembar* saham tinggi berarti dividen per lembarnya semakin rendah. Maka dengan demikian semakin tinggi *Dividen Payout Ratio* (DPR), semakin kecil resiko sahamnya.

3. Pertumbuhan Laba

Pada umumnya pemegang saham dan calon pemegang saham sangat tertarik akan pertumbuhan laba yang tercermin pada *Earning Per Share* (EPS) yang besar, karena hal itu merupakan salah satu indikator keberhasilan emiten. Dengan memperhatikan pertumbuhan laba per lembar saham tersebut dapat dilihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Tingkat pertumbuhan atau *earning growth* berpengaruh langsung pada *Price Earning Ratio* (PER). Bila harga saham mencerminkan kapitalisasi dari laba yang diharapkan di masa mendatang, maka peningkatan laba akan meningkatkan harga saham dan total kapitalisasi pasar. Bila investor yakin akan pertumbuhan *Earning Per Share* (EPS) dengan baik, maka *Price Earning Ratio* (PER) akan meningkat.

4. Return on Equity

Return On Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari pendapatan yang tersedia dari para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan (Jones, 1996) Semakin tinggi *Return On Equity* (ROE) yang dihasilkan semakin baik kedudukan pemilik perusahaan, dimana hal ini menggambarkan semakin meningkatnya pendapatan yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan dalam persahaan.

Menurut (Sartono & Mpaata, 1997) *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio* (PER) yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula *Price Earning Ratio*, dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin rendah pula *price Earning Ratio* (PER).

5. Leverage

Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Hal ini menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan hutang dalam struktur modal. Bagi investor leverage merupakan *proxy risiko financial* karena leverage merupakan penggunaan dana yang disertai dengan beban tetap. Dimana semakin besar *leverage*, semakin besar bunga yang harus dibayar oleh emiten yang bersangkutan. Hal ini akan berpengaruh negative terhadap *Price Earning Ratio* (PER), karena risiko berhubungan negative dengan *Price Earning Ratio* (PER).

Seperti yang dinyatakan oleh akhmad Rizgoni, (Sartono & Mpaata, 1997) bahwa *leverage* akan berpengaruh negative terhadap *Price Earning Ratio* (PER), hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* yang ditanggung perusahaan maka akan semakin rendah *Price Earning Ratio* (PER), sebaliknya, semakin rendah *leverage* yang ditanggung perusahaan maka akan semakin tinggi *Price Earning Ratio* (PER)-nya.

6. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan penelitian Basu (1977), Reinganum (1981-1982), Cook dan Roseff (1984), Keown, Pinkerton dan Chen (1987) yang dikutip oleh Constand, Freitas dan Sullivan (1991), di temukan bahwa *Price earning Ratio* (PER) mempunyai hubungan dengan ukuran dengan (*firm size*) dan risiko tidak sistematik lainnya. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil risikonya. Dimana para investor akan semakin aman memiliki saham perusahaan yang berukuran besar. Dengan begitu investor akan lebih berminat untuk memiliki saham perusahaan yang berukuran besar. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga hal ini akan berpengaruh positif terhadap *Price Earning Ratio* (PER), karena harga saham berhubungan positif dengan *Price Earning Ratio* (PER). Dengan kata lain, semakin besar hubungan perusahaan, semakin investor berminat akan saham perusahaan tersebut, sehingga semakin tinggi harga saham tersebut. Dan hal ini akan menaikkan nilai *Price Earning Ratio* (PER)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan akir tahun pembukuan pada tanggal 31 desember 2007 sampai dengan 31 desember 2010. Sumber data dapat di peroleh dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Price Earnings Ratio (PER)*. *Price earnings ratio (PER)* merupakan salah satu metode evaluasi terhadap harga saham. Indikator *price earnings ratio (PER)* berfungsi

untuk mengevaluasi apakah saham *overvalued* atau *undervalued*.

Perhitungan *price earnings ratio* menurut Widioatmodjo (2000:50) dapat dilakukan dengan :

$$PER = \frac{P_o}{EPS} \quad \text{atau} \quad PER = \frac{(1-RR)}{(i-g)}$$

Dimana :

PER : Price Earning Ratio

Po : harga saham yang layak dibeli

EPS : *Earning Per Share* (Laba per saham)

RR : *Retention Ratio* (Rasio laba ditahan dalam perusahaan)

i : *Interest* (Tingkat pengembalian yang diminta)

g : Pertumbuhan deviden

2. Variabel Independen

a. Dividen Payout Ratio (DPR)

Besar kecilnya dividen sangat tergantung oleh besar kecilnya laba yang diperoleh dan proporsi laba yang akan dibagikan dalam bentuk dividen atau *dividend payout ratio*. (Sartono, 1998:88)

Menurut Gitman (2003:570) *dividend payout ratio* dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Dividen Payout Ratio} = \frac{\text{Cash Dividen}}{\text{EPS}}$$

b. Return On Equity (ROE)

Menurut (Sofyan Syafri Harahap, 2004:305), *Return On Equity* (ROE) adalah: "Rasio rentabilitas yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik".

Semakin besar ROE semakin bagus kedudukan perusahaan, sehingga *Return On Equity* (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Rata-rata Modal (Equity)}}$$

c. Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba yang tercermin pada *Earnings Per Share* (EPS) atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau EPS di peroleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Net income} - \text{preferred dividends}}{\text{Average Number of common share Outstanding}}$$

(Meigh, 1999: 646)

Keterangan:

EPS = Earnings Per Share
Net Income = laba bersih setelah pajak
Preferred dividend = dividend saham preferen
Average Number of common share outstanding = rata – rata jumlah saham yang beredar

d. Leverage

Leverage merupakan penggunaan aset dalam sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban bunga) dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* adalah penggunaan dana yang menuntut peningkatan untuk membayar biaya tetap. Financial leverage dapat di hitung dengan rasio hutang (*debt ratio*) sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

e. Size (Ukuran Perusahaan)

Ukuran (size) perusahaan adalah aktiva yang di miliki oleh perusahaan pertambahan selama periode tertentu. Total aktiva merupakan sumber daya yang di miliki perusahaan yang akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang

3. Pemilihan Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah pengujian hipotesis yang di lakukan dengan menguji secara parsial menggunakan uji t dan pengujian secara simultan menggunakan uji F. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006)

4. Pengujian Instrumen

Pengujian instrument di perlukan untuk mengetahui stasioneritas yaitu tentang konsannya rata-rata dan varian observasi. Jika observasi tidak stasioner maka akan mengakibatkan regresi palsu atau lancing (*spurious regression*) dan juga menghasilkan residual

yang stasioner atau di kenal dengan sebutan Koentegrasi.

Tahap-tahap yang harus di lakukan merujuk pada Widarjono (2009) adalah sebagai berikut:

a. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*).

Menurut Nachwori dan Usman (2006) data *time series* menyimpan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah autokorelasi, hal ini yang menyebabkan data tidak stasioner, sehingga apabila data di stasionerkan maka autokorelasi akan hilang dengan sendirinya. Pengujian secara formal dapat di lakukan dengan uji akar unit (*unit root test*)

1) Uji Dickey-Fuller

Uji akar unit dari Dickey-Fuller adalah model sederhana dan ini hanya bisa dilakukan jika dalam *time series* hanya mengikuti pola *Autoregressive*. Akan tetapi dalam banyak kasus, data *time series* mengandung unsur *Autoregressive (AR)* yang lebih tinggi sehingga asumsi tidak adanya autokorelasi variabel gangguan (*et*) tidak terpenuhi. Dickey-Fuller kemudian mengembangkan uji akar unit dengan memasukkan unsure AR yang lebih tinggi dengan modelnya dan menambahkan kelambanan variabel diferensi di sisi kanan persamaan yang dikenal dengan uji *Augmented Dickey Fuller (ADF)*. Dalam prakteknya uji ADF inilah yang seringkali digunakan untuk mendeteksi apakah data stasioner atau tidak

Prosedur untuk menentukan apakah data stationer atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi Mackinoon. Jika dalam absolute statistic ADF lebih besar dari kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan sebaliknya jika nilai absolute statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya maka tidak stasioner. Hal krusial dalam uji ADF ini adalah menentukan panjang kelambanan. Panjang kelambanan bisa ditentukan berdasarkan kriteria *Akaike Information Criterion (AIC)* dan *Schwarz Information Criterion (SIC)* yang tersedia dalam program *Eviews*.

2) Uji Philips-Perron

Akar unit dari Dickey-Fuller (DF) mengamsumsikan bahwa variabel gangguan (*et*) adalah variabel gangguan yang bersifat independen dengan rata-rata nol, varian yang konstan tidak saling berhubungan (non-autokorelasi). Sementara uji Philips-Perron (PP) memasukkan unsur adanya autokorelasi didalam variabel gangguan dengan memasukkan variabel independen berupa kelambanan diferensi. Philips-Perron membuat uji akar unit dengan menggunakan metode statistik nonparametric dalam menjelaskan adanya

autokorelasi antara variabel gangguan dengan memasukkan variabel penjelas kelambanan diferensi sebagaimana uji ADF.

Statistik distribusi t tidak mengikuti statistik distribusi normal tetapi mengikuti distribusi statistik PP sedangkan nilai kritisnya di gunakan nilai kritis yang dikemukakan oleh Mackinnon. Seperti uji ADF sebelumnya, prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik PP dengan nilai kritisnya yaitu distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolute nilai statistik PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolute stastistik PP lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner.

Sebagaimana uji ADF, kita juga harus menentukan apa ujinya tanpa konstanta dan *trend*, hanya dengan konstanta ataukah dengan konstanta *trend*. Berbeda dengan uji ADF, dalam menentukan panjangnya lag uji PP menggunakan *truncation log q* dari Newey-West. Jumlah q menunjukkan periode adanya masalah autokorelasi.

3) Uji Kointegrasi

Menurut Widarjono (2009), data *time serie* seringkali tidak *stasioner* sehingga menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut regresi lancung (*spurious regression*). Regresi lancung adalah situasi di mana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun hubungan antara variabel didalam model tidak saling berhubungan. Data yang tidak stasioner sering kali menunjukan hubungan ketidak seimbangan dalam jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya hubungan keseimbangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, diperlukan uji kointegrasi untuk mengetahui ada tidak nya hubungan jangka panjang di dalam variabel ekonomi yang di teliti.

Metode uji kointegrasi yang diganakan adalah uji kointegrasi dari Eagle-Granger (EG). Uji utama dari uji kointegrasi EG adalah untuk mengkaji apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak. Model yang digunakan untuk pengujian ini adalah uji DF dan ADF. Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang dan sebaliknya maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Perusahaan Pertambangan

	PER	DPR	ROE	EPS	LEV	SIZE
Mean	51.64516	0.314926	0.116821	1.954330	0.445305	14.72136
Median	14.22652	0.000000	0.106718	-0.255684	0.404719	15.71139
Maximum	713.4146	8.443748	1.182603	48.76811	0.969503	18.18198
Minimum	-80.51948	0.000000	-1.258616	-20.65000	0.014406	10.00075
Std. Dev.	128.8237	1.039260	0.377324	9.350574	0.239617	2.295554
Skewness	3.591132	7.205912	-0.966878	3.727786	0.209256	-0.619213
Kurtosis	16.72301	56.73156	6.386950	19.80975	2.020766	2.110878
Jarque-Bera	679.7338	8768.546	43.09739	958.1006	3.213144	6.585342
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200574	0.037154
Sum	3511.871	21.41494	7.943799	132.8945	30.28072	1001.052
Sum Sq. Dev.	1111902.	72.36413	9.539022	5858.026	3.846907	353.0611
Observations	68	68	68	68	68	68
Cross sections	17	17	17	17	17	17

Sumber: (Diolah Eview's 7.0)

Berdasarkan tabel di atas di ketahui terdapat enam variabel penelitian dengan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 68 sampel. Variabel Price Earnings Ratio (PER) mempunyai nilai minimum - 80,51948, sedangkan nilai maksimumnya 713,4146 dan nilai rata-rata 51,64516 dengan standar deviasi 128,8237.

Selama periode penelitian, dengan jumlah sebanyak 68 selama 4 tahun dari 17 perusahaan yang di jadikan sampel, variabel Deviden Payout Ratio (DPR) mempunyai nilai minimum 0,000 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 8,443748 dan nilai rata-rata sebesar 0,314926 dengan standar deviasi sebesar 1,039260.

Selama periode penelitian, dengan jumlah sebanyak 68 selama 4 tahun dari 17 perusahaan yang di jadikan sampel, variabel Return on Equity (ROE) mempunyai nilai minimum -1,258616 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 1,182603 dan nilai rata-rata sebesar 0.116821 dengan standar deviasi sebesar 0,377324

Selama periode penelitian, dengan jumlah sebanyak 68 selama 4 tahun dari 17 perusahaan yang di jadikan sampel, variabel Earning Per Share (EPS) / pertumbuhan laba mempunyai nilai minimum - 20,65000 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 48,76811 dan nilai rata-rata sebesar 1,954330 dengan standar deviasi sebesar 9,350574.

Selama periode penelitian, dengan jumlah sebanyak 68 selama 4 tahun dari 17 perusahaan yang di jadikan sampel, variabel Leverage mempunyai nilai minimum 0,014406 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,969503 dan nilai rata-rata sebesar 0,445305 dengan standar deviasi sebesar 0,239617.

Selama periode penelitian, dengan jumlah sebanyak 68 selama 4 tahun dari 17 perusahaan yang di jadikan sampel, variabel Size / Ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum -10,00075 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 18,18198 dan nilai rata-rata sebesar 14,72136 dengan standar deviasi sebesar 2,295554

Tabel 2 Perbandingan Hasil Estimasi

Variabel	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
	Koefisien	Koefisien	Koefisien
C	73.37621	2329.239 ***	177.5671 **
DPR	-2.258569	10.94669 ***	3.632537
ROE	19.13401	-25.24596	21.86738
EG/EPS	-0.425150	-0.814959	-0.191585
LEV	-0.576137	-70.93608	-89.57181 *
SIZE	-1.505810	-152.4934 ***	-6.070047
R ²	0.003853	0.568253	0.034349
Adjusted R ²	-0.076482	0.371151	-0.043526
F-Statistik	0.998551	2.883042 ***	0.441080

Sumber: (Diolah Eview's 7.0)

Keterangan: * Signifikan pada alpha 10%

** Signifikan pada alpha 5%

*** Signifikan pada alpha 1%

2. Penentuan Model Antara Common Effect dan Individual Effect

Dengan menggunakan data yang tersedia dilakukan pengolahan menggunakan program Eviews 7.0. estimasi dilakukan dengan data panel. Hal pertama yang dilakukan adalah mengestimasi model dengan pendekatan Common Effect (model I). Selanjutnya dilakukan estimasi dengan pendekatan Fixed Effect (model II). Dalam estimasi menggunakan data panel, dilakukan perbandingan antara model I dan model II untuk menentukan model mana yang lebih baik dalam menentukan pengaruh hasil keuangan terhadap Price Earning Ratio (PER) Pengujian dengan Chow Test dilakukan dengan analisis sebagai berikut :

H₀ : α₁ = α₂ = α₃ = ... = α... Common Effect

H₁ : α₁ ≠ α₂ ≠ α₃ ≠ ... ≠ α... Individual Effect

Tabel 3 Hasil Pemilihan Model Regresi Panel – Chow Test

Metode	Probabilita Chi-square	Keputusan	Keterangan
Chow Test	0.0000	Ho ditolak	Individual effect

Dengan melakukan pengujian menggunakan Chow Test dimana hipotesa nol (H₀) adalah model common effect diperoleh nilai Probabilitas dari Chi square sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian hipotesa nol (H₀) ditolak, sehingga model yang lebih baik digunakan adalah estimasi dengan individual effect, maka pengujian selanjutnya adalah membandingkan fixed effect dengan random effect dimana pengujian menggunakan Hausman test.

3. Penentuan model antara fixed effect dengan random effect.

Dengan melakukan pengujian menggunakan Hausman test di hipotesis nol (H₀) adalah model fixed effect diperoleh nilai probabilitas hausman statistik sebesar 0,0000 < 0,05 (alpha 5%). Dengan demikian hipotesa nol (H₀) ditolak, sehingga model yang lebih baik digunakan adalah estimasi dengan fixed effect.

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model Regresi Panel – Hausman Test

Metode	Probabilita Chi-square	Keputusan	Keterangan
Hausman Test	0.0008	Ho ditolak	Fixed effect

Sumber: (Diolah Eview's 7.0)

Dengan melakukan pengujian menggunakan Hausman Test dimana hipotesa nol (H₀) adalah model random effect diperoleh nilai Probabilitas dari Chi square sebesar 0,0008 < 0,05. Dengan demikian hipotesa nol (H₀) ditolak, sehingga model yang lebih baik digunakan adalah estimasi dengan fixed effect.

4. Model Regresi Linier

Metode dalam penelitian ini adalah model regresi berganda, sebagai berikut.:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \beta_1 DPR_{it} + \beta_2 ROE_{it} + \beta_3 EPS_{it} + \beta_4 Lev_{it} + \beta_5 S_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

ΔY_t = Price Earnings Ratio (PER)

α₀ = Koefisien konstanta atau intersep

β₁- β₅ = Koefisien regresi dari variabel independen

i = Jumlah perusahaan pertambahan

t = Periode amatan (jumlah tahun observasi)

DPR = Deviden Payout Ratio

ROE = Return On Equity

EPS = Earnings Per Share

Lev = Leverage

S = Size

5. Pengujian Hipotesa

Tabel 5 Hasil Estimasi Metode *Fixed Effect*

Variabel Dependent: PER			
Variabel Independent	Koefisien	Prob	Std. Error
C	2329.239	0.0000	439.6195
DPR	10.94669	0.0004	2.891124
ROE	-25.24596	0.5795	45.23743
EG/EPS	-0.814959	0.6200	1.632242
LEV	-70.93608	0.4697	97.30556
SIZE	-152.4934	0.0000	26.68319
R-squared		0.568253	
Adjusted R-squared		0.371151	
F-stat		2.883042	
Prob F-stat		0.001365	

Sumber: (Diolah Eview's 7.0)

a. Goodness of Fit Model

Berdasarkan hasil pengolahan dengan metode *fixed effect* didapatkan nilai dari adjusted R-square sebesar 0,371151 atau 37,11%, hal ini menunjukkan kemampuan dari seluruh variable independen dalam menjelaskan variasi dari variable dependent sebesar 37,11% sedangkan sisanya sebesar 62,89% dijelaskan oleh variable independen lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

b. Uji Serentak (Uji F)

H_6 : Secara simultan terdapat pengaruh DPR, ROE, EPS, LEV dan SIZE terhadap PER

Nilai F-stat yang menggambarkan uji ketepatan model adalah sebesar 2,883042, dengan probabiliti F-stat sebesar 0,001365 < 0,05 (alpha 5%), maka hipotesa alternative diterima dan disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95%, variabel-variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Individu (Uji T)

Pengujian individual atau uji T-stat dan probabilitas digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi parsial berbeda secara individu berhubungan dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan metode *Fixed Effect*, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) DPR

$$\beta = 10.94669$$

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan DPR terhadap PER

Artinya, jika DPR naik sebesar 1 satuan, maka PER naik sebesar 10.94669 satuan, dengan asumsi *ceteris paribus*. Estimasi yang dihasilkan sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana DPR memiliki pengaruh positif terhadap PER. Hasil pengujian statistik menunjukkan besarnya nilai probabilita sebesar $0,0004/2 < 0,05$ (alpha 5%), maka disimpulkan hipotesa null ditolak. Oleh karena itu disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95 persen terdapat pengaruh positif dan signifikan DPR terhadap PER.

2) ROE

$$\beta = -25.24596$$

H_2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan ROE terhadap PER

Artinya, jika ROE naik sebesar 1 satuan, maka PER turun sebesar 25.24596 satuan, dengan asumsi *ceteris paribus*. Estimasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana ROE memiliki pengaruh positif terhadap PER. Oleh karena itu pengujian statistik tidak dilakukan kembali dan disimpulkan gagal menolak hipotesa null yang berbunyi tidak terdapat pengaruh positif ROE terhadap PER

3) Pertumbuhan Laba / *Earnings Growth* (EG)

$$\beta = -0.814959$$

H_3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan EPS terhadap PER

Artinya, jika EPS naik sebesar 1 satuan, maka PER turun sebesar 0.814959 satuan, dengan asumsi *ceteris paribus*. Estimasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana EPS memiliki pengaruh positif terhadap PER. Oleh karena itu pengujian statistik tidak dilakukan kembali dan disimpulkan gagal menolak hipotesa null yang berbunyi tidak terdapat pengaruh positif EPS terhadap PER.

4) LEV

$$\beta = -70.93608$$

H_4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan LEV terhadap PER

Artinya, jika LEV naik sebesar 1 satuan, maka PER turun sebesar 70.93608 satuan, dengan asumsi *ceteris paribus*. Estimasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana LEV memiliki pengaruh positif terhadap PER. Oleh karena itu pengujian statistik tidak dilakukan kembali dan disimpulkan gagal menolak hipotesa null yang berbunyi tidak terdapat pengaruh positif LEV terhadap PER.

5) SIZE

$$\beta = -152.4934$$

H₅: Terdapat pengaruh positif dan signifikan SIZE terhadap PER

Artinya, jika SIZE naik sebesar 1 satuan, maka PER turun sebesar 152.4934 satuan, dengan asumsi *ceteris paribus*. Estimasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana SIZE memiliki pengaruh positif terhadap PER. Oleh karena itu pengujian statistic tidak dilakukan kembali dan disimpulkan gagal menolak hipotesa null yang berbunyi tidak terdapat pengaruh positif SIZE terhadap PER.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada perusahaan pertambangan yang telah *Go Public* tahun 2007 – 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t terlihat pada tabel 4.6 didapatkan hasil untuk masing – masing variabel sebagai berikut
 - a. Terdapat pengaruh *Dividend Payout Ratio* (DPR) terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) perusahaan pertambangan yang telah *Go Public* tahun 2007 – 2010. DPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap PER, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi 10.94669 Serta uji t yang menghasilkan *p – value* sebesar 0.0000 kurang dari alpha 1%.
 - b. Terdapat pengaruh *Return On Equity* (ROE) terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) perusahaan pertambangan yang telah *Go Public* tahun 2007 – 2010. ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PER, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi - 25.24596 Serta uji t yang menghasilkan *p – value* sebesar 0.0004 kurang dari alpha 1%.
 - c. Terdapat pengaruh *Earnings Per Share* (EPS) terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) perusahaan pertambangan yang telah *Go Public* tahun 2007 – 2010. EPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PER, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi - 0.814959 Serta uji t yang menghasilkan *p – value* sebesar 0.5795 kurang dari alpha 1%.
 - d. Terdapat pengaruh *Leverage* (LEV) terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) perusahaan pertambangan yang telah *Go Public* tahun 2007 – 2010. LEV berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PER, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi - 70.93608 Serta uji t yang menghasilkan *p – value* sebesar 0.4697 kurang dari alpha 1%.
 - e. Terdapat pengaruh *Size* terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) perusahaan pertambangan yang telah *Go Public* tahun 2007 – 2010. *Size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PER, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi -152.4934 Serta uji t

yang menghasilkan *p – value* sebesar 0.0000 kurang dari alpha 1%.

- f. Terdapat pengaruh DPR terhadap *Price Earnings Ratio* (PER) berpengaruh positif dan signifikan, pengaruh ROE, EPS, Leverage berpengaruh negative dan tidak signifikan sedangkan *Size* berpengaruh negative dan signifikan perusahaan tambang yang telah *Go Public* tahun 2007-2010.
2. DPR, ROE, EPS, LEV, *Size* secara simultan berpengaruh terhadap PER. Hal ini terlihat pada tabel 4.6 dimana nilai signifikan pada uji F sebesar 0,001365 dimana lebih kecil dari alpha 1%
3. Nilai dari adjusted R-square sebesar 0.371151 menunjukkan kemampuan dari seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependent sebesar 37,11% Sedangkan sisanya sebesar 62,89% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.
4. Implikasi Manajerial
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hasil penelitian ini selayaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengkomposisikan DPR, ROE, EG, LEV, dan *Size*
Dengan variabel *Dividend Payout Ratio* (DPR) manajemen perusahaan hendaknya dapat mengelola earnings yang tercermin dari kemampuan laba dalam memenuhi *cash dividend*.
Bila pemegang saham lebih menyukai menerima *cash dividend* sekarang dari pada *capital gain* yang belum pasti maka *dividend payout ratio* yang tinggi akan akan lebih baik bagi para pemegang saham, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga saham.
5. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini hanya menguji apakah terdapat pengaruh antara DPR, ROE, EG, Lev dan *Size* terhadap EPS baik secara parsial maupun simultan. Untuk penelitian selanjutnya di sarankan untuk menggunakan alat analisa lain dan variabel lain yang pengaruhnya lebih signifikan seperti Debt to Equity Ratio (DER), pertumbuhan ekonomi, perubahan kebijakan moneter seperti perubahan tingkat bunga, *cost structure* dan dampak krisis keuangan global sehingga dapat di ketahui pengaruh dari variabel lain yang lebih signifikan.

REFERENSI

- Ang, R. (1997). *Buku Pintar : Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.
- Elton E. J., M. J. G. (1994). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis* (Fourth edi). Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Francis, J. (1991). *Investment Analysis and Management*. Singapore: Mcgraw Hill Book Co.
- Hartono, J. (1998). *Teori Portofolio dan Analisis*

- Investasi* (Kedua). Yogyakarta: BPFE.
- Jones, J. . (1996). Earnings Management During Important Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2).
- Manurung, A. (1997). "Penilaian Harga saham,," *Usahawan*, XXVI(04), 32.
- Muljono. (2002). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Sistematis Dalam Industri Barang-Barang Komsumsi Pada Bursa Efek*. Universitas Diponegoro.
- Sartono, A. (1996). *Manajemen Keuangan* (Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Sartono, A., & Mpaata, K. A. (1997). Factor Determining Price Earnings (P/E) Ratio. *Kelola*, IV, 133–150.
- Suad, H. (1996). *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)* (Edisi 4). Yogyakarta: BPFE.
- Sumantoro. (1990). *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Thian, H. L. (2001). *Bursa Saham* (cetakan pe). Jakarta: Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

PROFIL PENULIS

Sonny Fransisco Siboro, lahir di Jakarta 28 Juni 1981. Meraih gelar sarjana ekonomi (SE) jurusan akuntansi dari STIE Perbanas pada tahun 2004. Kemudian gelar Magister Manajemen (MM) dari Universitas Trisakti tahun 2012. Saat ini bertugas sebagai pengajar di Universitas Bina Sarana Informatika dan berprofesi di kantor akuntan publik Putra Dudit Sinaga. Penulis dapat di hubungi pada email: sonny.sof@bsi.ac.id

Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan

Seno Hadi Saputro

STMIK Atma Luhur
e-mail : seno.hadi@atmaluhur.ac.id

(Saputro, 2019)Saputro, S. H. (2019). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan. *Moneter*, 6(1), 91–96.

Abstract - *The company's survival is influenced by many things, among others is profitability of the company. The company's profitability is determined by various factors, one of which is an external factor. External factor are beyond the company's difficult part is controlled by the company. Macroeconomic factor are the external factors of the company. This study was conducted to evaluate the effect of GDB, BI Rate, Inflation and the exchange rate on the profitability of mining companies. The population using a mining company in Indonesia stock exchange in 2014-2018. Methodology research as the sample used purposive sampling technique sampling with particular determination in order to obtain a representative sample according to the sample criteria that will be used. Detrmination of sampling techniques was obtained 34 mining companies. Data were analyzed using multiple regression method data panel random effect. The result obtained showed the BI Rate has a negative effect on the profitability of mining companies, namely when the BI Rate is low, the company's ability to fund its investment will increase. Whereas GDB, Inflation and exchange rate does not affect the profitability of mining companies.*

Keywords: *GDB, BI rate, Inflation, Kurs, Profitability*

PENDAHULUAN

Di Indonesia semakin banyak jumlah perusahaan yang berkembang saat ini, baik yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. Setiap perusahaan baik yang skala kecil maupun besar mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi perusahaan yang baik merupakan kekuatan untuk perusahaan bertahan dan berkembang demi tercapainya tujuan perusahaan. Namun dalam era globalisasi seperti sekarang ini, mengakibatkan persaingan antara perusahaan semakin ketat (Rahmah, Cipta, & Yudiatmaja, 2016).

Perusahaan atau organisasi melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya untuk mencapai tujuan itu, perusahaan harus dapat beroperasi secara lancar dan dapat mengkombinasikan semua sumber daya yang ada, sehingga dapat mencapai hasil dan tingkat laba yang optimal. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal antara lain profitabilitas perusahaan itu sendiri. Profitabilitas merupakan salah satu faktor untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan. Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. (Barus & Ratio, 2013)

Keberlangsungan sebuah perusahaan ditentukan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan bagian dari luar perusahaan yang sulit dikendalikan oleh perusahaan bahkan krisis ekonomi secara makro dapat menyebabkan banyak perusahaan mengalami

kebangkrutan sehingga perusahaan harus peka terhadap kondisi makroekonomi (Sulaksana, 2016).

Dipilihnya perusahaan pertambangan sebagai sampel penelitian karena ROA perusahaan tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Sebagai contoh PT. Adaro Energy, Tbk. Pada tahun 2017 memiliki ROA sebesar 0,0787 sedangkan pada tahun 2018 memiliki ROA sebesar 0,0330. Apabila dibandingkan ROA tahun 2017 dan 2018 maka ROA perusahaan tersebut mengalami penurunan sebesar -0,5807. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 ROA perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,5077. Dari data tersebut diduga dipengaruhi kondisi makroekonomi. Dalam penelitian ini faktor makroekonomi yang digunakan adalah PDB, BI Rate, Inflasi dan Kurs. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang profitabilitas mempunyai fokus bidang yang berbeda. (Hidayati, 2014) meneliti tentang profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, sedangkan (Krissandy, 2013) meneliti tentang profitabilitas Bank Muammalat Di Indonesia. Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada perusahaan pertambangan.

METODOLOGI PENELITIAN

1 Pengembangan Hipotesis

a. PDB

Menurut Mankiw (2012) dalam (Krissandy, 2013), PDB adalah nilai pasar dari sejumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. PDB dapat mengukur total pendapatan maupun total

pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Sehingga PDB per orang dapat memberitahu kita pendapatan dan pengeluaran dari rata-rata seseorang dalam perekonomian, karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi. PDB dibagi dalam empat komponen pengeluaran : konsumsi, investasi, pembelanjaan pemerintah, dan ekspor netto. Konsumsi termasuk pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, investasi meliputi pembelanjaan perlengkapan dan bangunan, termasuk pembelian tempat tinggal baru oleh rumah tangga. Pembelanjaan pemerintah termasuk dalam pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian dan pusat. Ekspor netto sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri dan dijual diluar negeri (ekspor) dikurangi nilai barang dan jasa yang diproduksi diluar negeri (import). PDB yang meningkat mempunyai pengaruh yang positif terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian (Sahara, 2013) dan (Sodiq, 2015) yang menyebutkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : PDB berpengaruh positif terhadap profitabilitas

b. *BI Rate* dan Profitabilitas

Dalam (Saputro, 2018), *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh gubernur Bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*Liquidity Management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Hampir setiap perusahaan membutuhkan pembiayaan baik itu dari pemegang saham ataupun pihak eksternal seperti Bank. Bisnis membutuhkan pembiayaan untuk mendanai berbagai aktivitas bisnisnya agar terus bisa menghasilkan kesejahteraan bagi pemegang saham. Ketika *BI Rate* naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga lain dalam konteks ini suku bunga kredit. Naiknya suku bunga kredit akan meningkatkan biaya sehingga kondisi ini akan menurunkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut senada dengan penelitian (Kurniawati, Hamzah, & Kunawangsih, 2018) dan (Aldiansyah, 2018) yang menyebutkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 : *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

c. Inflasi dan Profitabilitas

Menurut Sukirno dalam (Saputro, 2018), inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu disbanding dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu :

- 1) Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan pada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen setahun.
- 2) Hyperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat.
- 3) Inflasi sederhana adalah tingkat inflasi di Negara berkembang yang ada kalanya tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak mengalami masalah hyperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata di sebagian Negara tingkat inflasi mencapai 5 sampai dengan 10%.

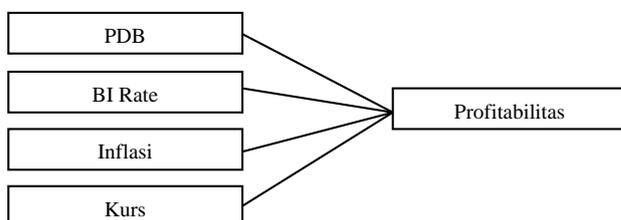
Kenaikan harga barang yang disebabkan inflasi tentunya akan menambah pengeluaran produksi perusahaan pertambangan. Apabila pengeluaran produksi bertambah, maka akan mengurangi laba perusahaan tersebut. Hal tersebut senada dengan penelitian (Kalengkongan, 2011) dan (Putra, 2014) yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan ini, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H3 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

d. Kurs dan Profitabilitas

Menurut Sukirno dalam (Hidayati, 2014), kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Kurs mata uang asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat. Nilai tukar satu mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Ketika mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang negara lain, biaya produksi yang mengandalkan bahan baku impor akan naik. Kondisi ini secara otomatis akan menurunkan laba perusahaan atau margin laba. Hal tersebut senada dengan penelitian (Hidayati, 2014) dan (Prastowo, Malavia, & Wahono, 2014) yang

menyebutkan bahwa Kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan ini, maka hipotesis penelitian ini adalah :
H4 : Kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas



Gambar 1 : Model Penelitian

2. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2012), penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu / *Judgment Sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria sampel sebagai berikut :

- Periode pengamatan dilakukan 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017 sampai dengan Juni 2018.
- Perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan pertambangan yang menyampaikan laporan keuangan sampai dengan bulan Juni 2018.

Dari kriteria sampel yang diberikan diatas, didapatkan data dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Perusahaan Pertambangan Yang Dijadikan Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADRO	Adaro Energy, Tbk
2.	ARII	Atlas Resources, Tbk
3.	ATPK	Bara Jaya Internasional, Tbk
4.	BSSR	Baramulti Suksessarana, Tbk
5.	BUMI	Bumi Resources, Tbk
6.	BYAN	Bayan Resources, Tbk
7.	DEWA	Darma Henwa, Tbk
8.	DOID	Delta Dunia Makmur, Tbk
9.	GEMS	Golden Energy Mines, Tbk
10.	GTBO	Garda Tujuh Buana, Tbk
11.	HRUM	Harum Energy, Tbk
12.	ITMG	Tambangraya Megah, Tbk
13.	KKGI	Resources Alam Indonesia, Tbk
14.	MBAP	Mitrabara Adiperdana, Tbk
15.	PTBA	Bukit Asam, Tbk
16.	MYOH	Samindo Resources, Tbk
17.	PKPK	Perdana Karya Perkasa, Tbk
18.	ARTI	Ratu Prabu Energi, Tbk

19.	BIPI	Benakat integra, Tbk
20.	ELSA	Elnusa, Tbk
21.	ENRG	Energi Mega Persada, Tbk
22.	ESSA	Surya Esa Perkasa, Tbk
23.	MEDC	Medco Energi Internasional, Tbk
24.	RUIS	Radiant Utama Interinsco, Tbk
25.	ANTM	Aneka Tambang, Tbk
26.	CITA	Cita Mineral Investindo, Tbk
27.	CKRA	Cakra Mineral, Tbk
28.	DKFT	Central Omega Resources, Tbk
29.	INCO	Vale Indonesia, Tbk
30.	PSAB	J Resources Asia Pasifik, Tbk
31.	SMRU	SMR Utama, Tbk
32.	TINS	Timah, Tbk
33.	CTTH	Citatah, Tbk
34.	MITI	Mitra Investindo, Tbk

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Growth, PDB, BI Rate, Inflasi dan nilai tukar terhadap ROA perusahaan pertambangan adalah analisis data panel. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 2007 untuk mengelompokkan data dan selanjutnya diolah menggunakan *software* Eviews 6.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan panel data. Menurut Agus Widarjono (2013) dalam (Saputro, 2014), Panel data atau disebut data longitudinal adalah sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu. Panel data merupakan gabungan dari *time series* data dan *cross section* data. Model panel data terdiri dari 3 bentuk yaitu :

- Ordinary Least Square*
Metode *Ordinary Least Square* dikenal dengan estimasi *Common effect*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.
- Fixed Effect*
Pengertian *Fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan *intersep* antara perusahaan namun *intersep* nya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model *fixed effect* juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu
- Random Effect*
Didalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu

4. Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel

- Uji Chow (Chow Test)*
Uji chow dilakukan untuk memilih model yang digunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan Rumus :

$$\text{Chow} = \frac{(ESS1 - ESS2)/(N - 1)}{ESS2/(NT - N - K)}$$

Dimana :

ESS1 = Residual Sum Square hasil pendugaan model *Common Effect*

ESS2 = Residual Sum Square hasil pendugaan model *Fixed Effect*

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K = Jumlah variabel penjelas

Jika nilai Chow statistics hasil pengujian lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak, begitu juga sebaliknya.

b. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji hausman dilakukan untuk memilih model yang digunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Jika nilai hausman hasil pengujian lebih besar dari X^2 tabel, maka H_0 ditolak, begitu juga sebaliknya.

c. Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*)

Uji lagrange multiplier dilakukan untuk memilih model yang digunakan *Common Effect* atau *Random Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Random Effect*

Jika nilai Lagrange Multiplier hasil pengujian lebih besar dari X^2 tabel, maka H_0 ditolak, begitu juga sebaliknya.

5. Evaluasi Model

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial (*t test*) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen, yaitu *Growth*, *PDB*, *BI Rate*, *Inflasi* dan nilai tukar secara individual terhadap variabel dependen, yaitu *Return On Asset (ROA)* tahun 2012-2018. Tahap-tahap pengujiannya adalah :

1) Merumuskan hipotesis.

H_0 : $b_1 \dots b_4 = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : $b_1 \dots b_4 \neq 0$, artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Menentukan tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5 %.

3) Menentukan keputusan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:

Jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel, maka H_0 ditolak

Jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel, maka H_0 diterima

b. R Squared

R-Squared adalah proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. *R-Squared* memiliki range $0 \leq R\text{-Squared} \leq 1$. Jika *R-Squared* bernilai 1 maka 100 persen variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Sedangkan jika *R-Squared* bernilai 0 maka variasi dalam variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pengujian Pemilihan Model Data Panel

a. Uji Chow

Dari uji chow didapatkan hasil 6,439238 sedangkan besarnya F tabel dengan derajat bebas N-1 (33) dan NT-N-K (132) sebesar 1,3940. Karena F hitung > F tabel maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih sesuai digunakan didalam penelitian ini daripada *Common Effect*.

b. Uji Hausman

Dari uji hausman didapatkan hasil -180,0896 sedangkan nilai kritis *Chi Squares* dengan n-1 sebesar 33 pada $\alpha = 5\%$ sebesar 55,758. karena uji hausman < X^2 tabel maka H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih sesuai digunakan didalam penelitian ini daripada *Fixed Effect*.

Model data panel dengan menggunakan model *Random Effects* ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Metode *Random Effects*

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	59,42202	0,767145	0,4446
Log PDB	-21,36002	-1,931105	0,0560
Log BIRate	-2,876459	-2,251354	0,0263
Log Inflasi	-0,275137	-0,336031	0,7375
Log Nilai Tukar	-14,29534	-1,402672	0,1635
R-Squared	0,540990	Mean dependent	-3,511706
Adjusted R-Squared	0,524449	var	
S.E. of regression	1,073503	S.D. dependent	1,556699
Durbin-Watson Stat	1,738649	var	
		Sum squared resid	127,9174

Nilai signifikansi uji t pada PDB sebesar 0,0560 ($\text{sig} > 0,05$) ini berarti PDB tidak signifikan terhadap ROA, koefisien regresi memiliki arah negatif sebesar -21,36002. Apabila dibandingkan antara t hitung dan t tabel maka didapatkan hasil -t hitung > -2,03452 ini berarti PDB tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari hasil analisis tersebut PDB tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari pengujian yang sudah dilakukan, maka hipotesis 1 (H_1) ditolak. Nilai signifikansi uji t

pada BI Rate sebesar 0,0263 ini berarti BI Rate signifikan terhadap ROA, koefisien regresi memiliki arah negatif sebesar -2,876459. Apabila dibandingkan antara t hitung dan t tabel maka didapatkan hasil -t hitung < -2,03452 ini berarti BI Rate berpengaruh terhadap ROA. Dari pengujian yang sudah dilakukan, maka hipotesis 2 (H2) diterima. Nilai signifikansi uji t pada inflasi sebesar 0,7375 ini berarti inflasi tidak signifikan terhadap ROA, koefisien regresi memiliki arah negatif sebesar -0,275137. Apabila dibandingkan antara t hitung dan t tabel maka didapatkan hasil -t hitung > -2,03452 ini berarti inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari pengujian yang sudah dilakukan, maka hipotesis 3 (H3) ditolak. Nilai signifikansi uji t pada kurs sebesar 0,1635 ini berarti nilai tukar tidak signifikan terhadap ROA, koefisien regresi memiliki arah negatif sebesar -14,29534. Apabila dibandingkan antara t hitung dan t tabel maka didapatkan hasil -t hitung > -2,03452 ini berarti kurs tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari hasil analisis tersebut kurs tidak berpengaruh terhadap ROA.

2. R Squared

Hasil estimasi dengan menggunakan model efek random (*Random Effect*) menunjukkan nilai R² atau koefisien determinasi pada hasil estimasi tersebut dapat diketahui bahwa 54,09 persen keragaman ROA perusahaan pertambangan yang menjadi sampel pada periode waktu 2014-2018 dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (PDB, BI Rate, inflasi dan nilai tukar), sedangkan 45,91 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti kinerja perusahaan pertambangan tersebut, kebijakan pemerintah terhadap pembatasan ekspor dan impor perusahaan pertambangan dan sebagainya.

3. Pengaruh PDB Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Meningkatnya PDB mempunyai pengaruh yang positif terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun berdasarkan penelitian ini hal tersebut tidak terjadi karena ketika pada PDB mengalami peningkatan pada tahun tertentu, profitabilitas mengalami kenaikan. Akan tetapi di tahun yang berbeda, ketika PDB mengalami peningkatan, profitabilitas mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018, Pada perusahaan PT. Adaro Energy, Tbk (ADRO), PDB mengalami peningkatan sebesar 0,019 sedangkan ROA mengalami penurunan sebesar -0,581. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017, perusahaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,02 sedangkan ROA mengalami kenaikan sebesar 0,508. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Sahara, 2013) dan (Sodiq, 2015) yang menyebutkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh BI Rate Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Tingkat suku bunga acuan (BI Rate) akan berdampak pada kinerja perusahaan pertambangan terutama terhadap kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan. Perusahaan memerlukan pembiayaan untuk mendanai operasi dan investasinya. Aktivitas investasi sangat diperlukan untuk menjamin perusahaan dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya yaitu profitabilitas perusahaan. Apabila suku bunga meningkat, maka kemampuan perusahaan untuk mendanai investasinya berkurang karena kenaikan BI Rate juga akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit pada bank umum. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat suku bunga acuan rendah, maka kemampuan perusahaan untuk mendanai investasinya akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kurniawati et al., 2018) dan yang menyebutkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

5. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Naiknya harga barang tidak berpengaruh terhadap keuntungan yang dihasilkan. Walaupun perusahaan menaikkan harga produk mereka, tidak akan menurunkan daya beli konsumen terhadap produk perusahaan, sehingga perusahaan masih dapat menghasilkan laba. Karena perusahaan masih dapat bertahan dan masih dapat menghasilkan laba ditengah inflasi yang terjadi, maka mampu menarik investor. Dana yang didapat dari investor tersebut dapat digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya sehingga tidak akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan pertambangan. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Kalengkongan, 2011) dan (Putra, 2014) yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

6. Pengaruh Kurs Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurs tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Nilai tukar mata uang atau kurs rupiah yang menguat terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Sehingga menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing dapat menurunkan suku bunga yang berlaku yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Namun berdasarkan penelitian ini hal tersebut nampaknya tidak terjadi pada perusahaan pertambangan karena ketika kurs mengalami peningkatan pada tahun tertentu, profitabilitas mengalami kenaikan. Akan tetapi di tahun yang berbeda, ketika kurs mengalami peningkatan, profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Hidayati, 2014) dan

(Prastowo et al., 2014) yang menyebutkan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan perusahaan pertambangan sebagai obyek penelitian dan menggunakan model data panel sebagai metode analisis data. Pemilihan model data panel menggunakan model data panel *Random Effect* setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan *Chow test* dan *Hausman test*. Hasil uji signifikansi secara individu menunjukkan hasil bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan sedangkan *PDB*, inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian terdapat keterbatasan yaitu penelitian ini hanya menggunakan indikator eksternal yang digunakan serta periode tahun penelitian hanya 5 tahun yaitu tahun 2014-2018. Perusahaan yang dijadikan sampel didalam penelitian ini hanya perusahaan pertambangan

REFERENSI

- Aldiansyah, T. (2018). *Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 6(1), 133–153.
- Barus, A. C., & Ratio, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 3, 111–121.
- Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *An-Nisbah*, 01(01), 73–97.
- Kalengkongan, G. (2011). Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Pengaruhnya Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Industri Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Emba*, 1(4), 737–747.
- Krissandy. (2013). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Semnas Fekon*, 513–521.
- Kurniawati, S., Hamzah, Z., & Kunawangsih, T. (2018). *Analisis Pengaruh CAR, LDR, DER, BI Rate dan Inflasi Terhadap ROA Pada 10 Bank Besar Yang Ada di Bursa Efek Indonesia*.

- (1999), 1183–1190.
- Prastowo, P. R., Malavia, R., & Wahono, B. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Perbankan. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 27–41.
- Putra, R. E. (2014). *Pengaruh Risiko Kredit, Inflasi dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Pemerintah Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia*. (1), 14059104.
- Rahmah, A. M., Cipta, W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas Dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1).
- Sahara, A. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), 149–157.
- Saputro, S. H. (2014). *Pengaruh Growth, Size, Kinerja Perusahaan Dan Indikator Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur*. 25(3), 179–185.
- Saputro, S. H. (2018). Analisis Pengaruh Growth, Size, Eva Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Perubahan Laba Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Moneter STMIK Atma Luhur*, V(1).
- Saputro, S. H. (2019). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan. *Moneter*, 6(1), 91–96.
- Sodiq, A. (2015). Pengaruh variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009 - 2014. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 344–363.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sulaksana, T. (2016). Analisis Rasio keuangan Dan Variabel Ekonomi Makro Dalam Memprediksi Financial Distress Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas*, 2016.

PROFIL PENULIS

Seno Hadi Saputro, MM adalah dosen tetap di Program Studi Sistem Informasi STMIK Atma Luhur, Pangkalpinang. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gelar MM diperoleh dari Jurusan Manajemen Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur, Jakarta.